



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2020

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA, 2021



BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
GEDUNG BALAIKOTA DKI JAKARTA BLOK G, LT 10

Jakarta
a city of collaboration





**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penulisan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini. Mereka mampu menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu.

Ini merupakan laporan pertama yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan regulasi Penyusunan LPPD berdampak signifikan terhadap laporan kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa seluruh kewenangan daerah Provinsi dan kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan demikian beban dan tanggung jawab Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta jauh lebih besar dibandingkan Provinsi lain yang hanya melaksanakan sebagian kewenangan Daerah. Status khusus memang mensyaratkan beban dan tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu, dalam menyelenggarakan pembangunan di Jakarta kami menggunakan pendekatan kolaborasi. Bukan hanya pemerintah, tetapi warga dan swasta pun ikut turun tangan. Mereka terlibat dan dilibatkan secara aktif. Agar rasa memiliki kota ini tumbuh secara kolosal. Dengan begitu, pembangunan di kota ini akan terjadi secara sinambung. Semua ini tercantum di dalam LPPD ini.

Laporan ini disusun semaksimal mungkin, baik indikator makro, Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* maupun IKK *Output* setiap Urusan Pemerintahan, termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Tugas Pembantuan dan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Harapan kami LPPD ini bisa menggambarkan kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 serta bermanfaat untuk bahan evaluasi dan bahan perumusan kebijakan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Jakarta, 30 Maret 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.



LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.1.1. Penjelasan Umum	I-1
a. Undang – Undang Pembentukan Daerah	I-1
b. Data Geografis Wilayah	I-1
c. Jumlah Penduduk	I-8
d. Jumlah Kabupaten / Kota	I-9
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Kepegawaian	I-10
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I-11
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I-13
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-13
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	I-18
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I-24
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I-29
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-32
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-1
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-2
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-84
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-110
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
A. Tugas Pembantuan	III-1
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi	III-2
3.1.1. Target Kinerja	III-2
3.1.2. Realisasi	III-3
3.2. Permasalahan dan Kendala	III-5
3.3. Saran dan Tindak Lanjut	III-5
B. Dekonsentrasi	III-5
1. Instansi Pemberi Dekonsentrasi dan Instansi Pelaksana	III-5
2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya	III-6

BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1.	Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-2
4.1.3.	Realisasi	IV-2
4.1.4.	Alokasi Anggaran	IV-15
4.1.5.	Dukungan Personil	IV-15
4.1.6.	Permasalahan dan Solusi	IV-15
4.2.	Urusan Kesehatan	IV-16
4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-16
4.2.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-18
4.2.3.	Realisasi	IV-18
4.2.4.	Alokasi Anggaran	IV-29
4.2.5.	Dukungan Personil	IV-34
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi	IV-35
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	IV-39
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-39
4.3.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-41
4.3.3.	Realisasi	IV-42
4.3.4.	Alokasi Anggaran	IV-46
4.3.5.	Dukungan Personil	IV-46
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	IV-49
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	IV-52
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-52
4.4.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-53
4.4.3.	Realisasi	IV-53
4.4.4.	Alokasi Anggaran	IV-62
4.4.5.	Dukungan Personil	IV-62
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi	IV-63
4.5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	IV-64
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-64
4.5.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-65
4.5.3.	Realisasi	IV-66
4.5.4.	Alokasi Anggaran	IV-72
4.5.5.	Dukungan Personil	IV-73
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi	IV-78
4.6.	Urusan Sosial	IV-84
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-84
4.6.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-85
4.6.3.	Realisasi	IV-86
4.6.4.	Alokasi Anggaran	IV-107
4.6.5.	Dukungan Personil	IV-108
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi	IV-110
BAB V	PENUTUP	V-1
A.	Kesimpulan	V-1
B.	Saran	V-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a) Undang – Undang Pembentukan Daerah

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

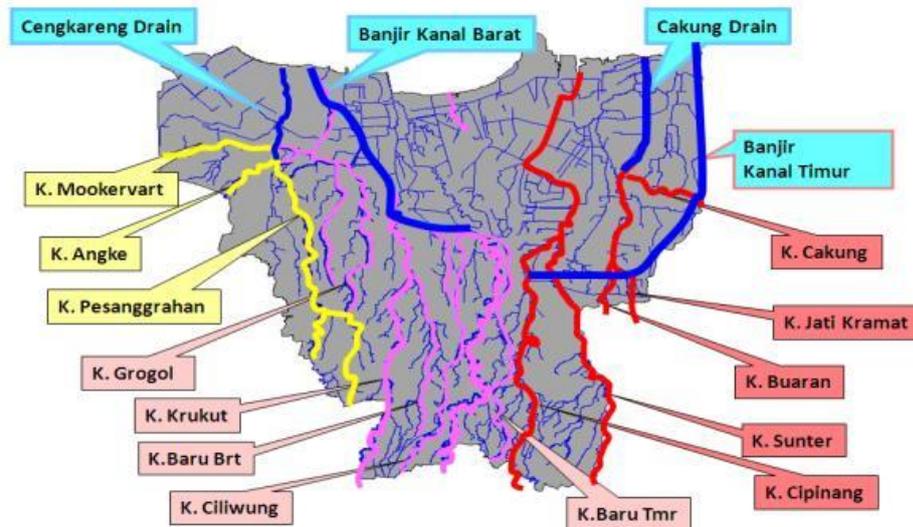
b) Data Geografis Wilayah

Kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam bentuk informasi tentang batas administrasi daerah dan luas wilayah, iklim, dan geologi.

a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 5° 19' 12" Lintang Selatan - 6° 23' 54" Lintang Selatan dan 106° 22' 42" Bujur Timur - 106° 58' 18" Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata \pm 7 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007 Tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah DKI Jakarta. Secara geografis luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta adalah 7.660 km², dengan luas daratan 662,33 km² (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan 6.998 km².

Gambar 1.1
Sungai, Kanal, dan Flood Way yang Mengaliri DKI Jakarta

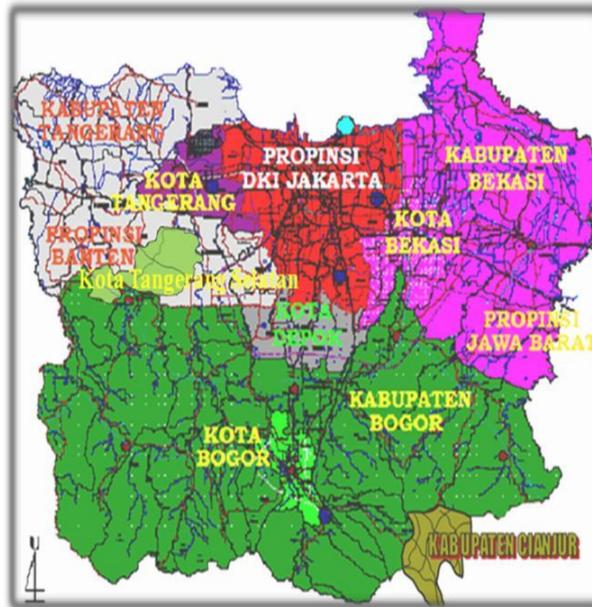


Sumber : Dinas Penataan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang \pm 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 *flood way* 2 buah kanal, yang berbatasan dengan Laut Jawa. Letak geografis di wilayah Utara sebagai muara 13 sungai yang melintas di Jakarta, menyebabkan Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob). Sementara itu disebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten.

Disamping itu Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, sebagaimana disajikan dalam peta berikut.

Gambar 1.2
Peta Administrasi Kawasan Strategis Nasional
Jabodetabekpunjur



Sumber : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008

b. Iklim

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2020 curah hujan tertinggi di Jakarta sebesar 102.95 mm² yang terjadi pada bulan Maret dan termasuk kedalam kategori menengah. Puncak musim hujan di Jakarta terjadi pada bulan Januari dengan banyaknya hari hujan adalah 25 hari, terbanyak diantara bulan – bulan yang lain. Pada periode Mei – Oktober, curah hujan di Jakarta berada dalam kategori sangat rendah (< 20 mm²) karena pada periode tersebut sudah memasuki musim kemarau dengan puncaknya pada bulan Juli hingga September tidak terjadi hujan sama sekali.

Tabel 1.1
Tabel Curah Hujan dan Hari Hujan di Jakarta Tahun 2020

	Curah Hujan Maksimal (mm ²)	Banyaknya Hari Hujan (hari)
Januari	107.1	25
Februari	49.3	17
Maret	102.95	24
April	29.7	20
Mei	14.75	9

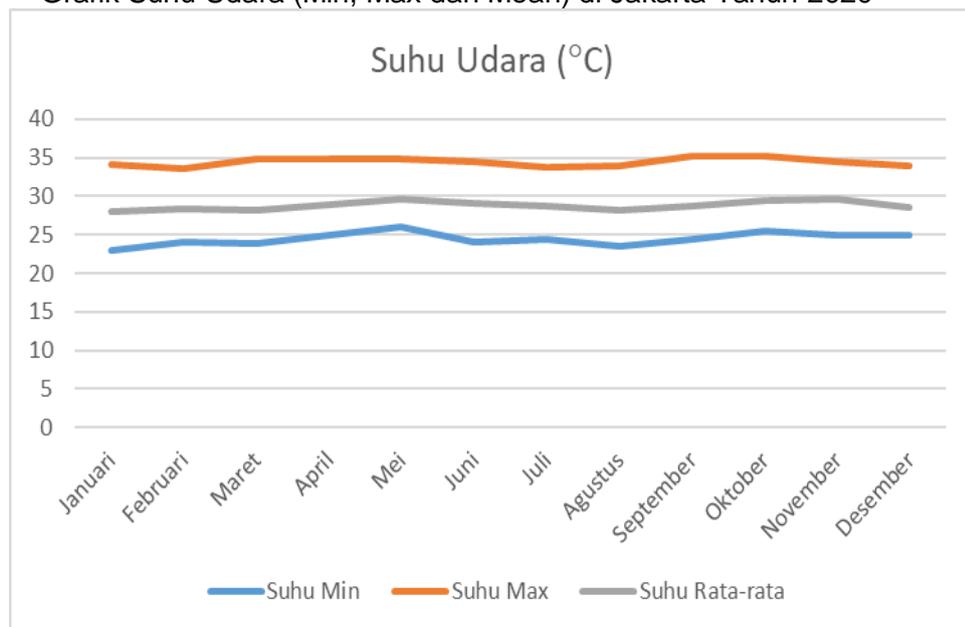
	Curah Hujan Maksimal (mm ²)	Banyaknya Hari Hujan (hari)
Juni	18.1	2
Juli	0	0
Agustus	0	0
September	0	0
Oktober	1	1
November	30.25	10
Desember	70.25	18

Sumber: <http://dataonline.bmkg.go.id>

(Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Tanjung Priok) diolah

Sedangkan rata-rata suhu udara di Jakarta selama tahun 2020 sebesar 28,82 °C dengan rata-rata suhu maksimum dan minimum sebesar 34,42 °C dan 24,49 °C. Suhu terendah di Jakarta selama tahun 2020 terjadi dibulan Januari dengan rata-rata suhu udara sebesar 29,1 °C. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya frekuensi hujan yang turun selama bulan tersebut. Selengkapnya suhu maksimum, minimum dan rata-rata di Jakarta selama tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

Grafik 1.1
Grafik Suhu Udara (Min, Max dan Mean) di Jakarta Tahun 2020



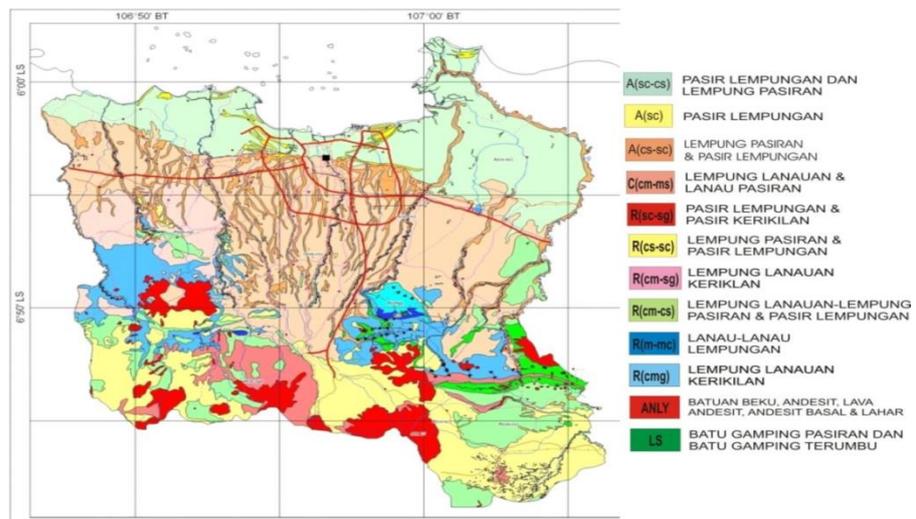
Sumber: <http://dataonline.bmkg.go.id> (Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Tanjung Priok) diolah

c. Geologi

Wilayah Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian besar terdiri dari lapisan batu endapan zaman Pleitosen yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah permukaan tanah. Bagian selatan merupakan bagian aleuvial Bogor yang terdiri atas lapisan alluvial, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km dan di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena seluruhnya merupakan endapan alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10–25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8–15 m, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40m.

Berdasarkan lapisannya tanah di wilayah endapan Jakarta dapat dibagi dalam dua bagian. Bagian selatan adalah tanah latosol dengan tekstur variabel dari lempung sampai sedikit berpasir. Di bagian utara dekat pantai karena merupakan endapan batuan muda, maka sifatnya tidak padat dan air tanahnya terpengaruh oleh air laut.

Gambar 1.3
Morfologi Tanah



Sumber : Sawarendro (NA RTRW Prov DKI Jakarta 2030)

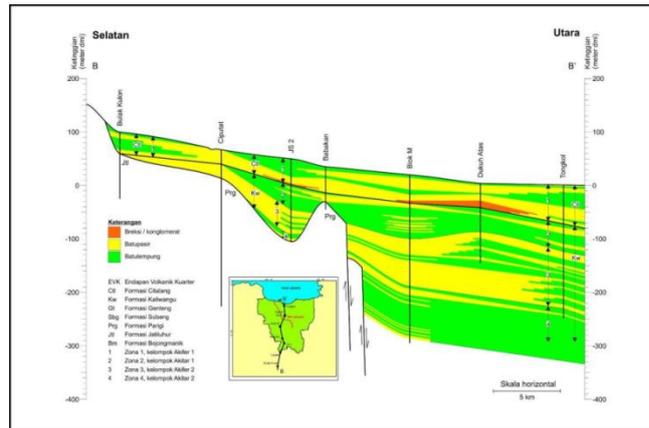
Sedangkan dari aspek morfologi tanah di sebelah selatan tanggul-tanggul pantai seperti tersebut di atas lebih mirip tanah laterit kemerah-merahan karena merupakan hasil pelapukan dari batuan

dan tanah di sebelah utara tebing lebih banyak berwarna keabu-abuan yang merujuk pada endapan lempung laut.

Wilayah Jakarta memiliki lithologi sebagai berikut :

- 1) Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran. Semakin kearah Utara mendekati pantai berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya berkisar antara 3-12 m dengan ketebalan secara keseluruhan diperkirakan mencapai 300 m.
- 2) Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari perselang- selangan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5 – 13 m.
- 3) Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan ini tersusun berselang-selang antara lempung pasiran dan pasir lempungan.
- 4) Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal lapisan antara 3 – 13,5 m.
- 5) Potongan melintang Selatan-Utara Jakarta menunjukkan endapan vulkanik kuarter yang terdiri dari Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 m dengan bagian atasnya merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan pada beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat, terutama di sekitar Blok M dan Dukuh Atas. Sementara itu, Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian Utaranya lebih dari 300 m dan Formasi Parigi di sekitar Babakan mendesak ke atas hingga kedalaman 80 m. Formasi ini di dominasi oleh batu lempung diselang-selingi oleh batu pasir.

Gambar 1.4
Potongan Melintang Selatan - Utara

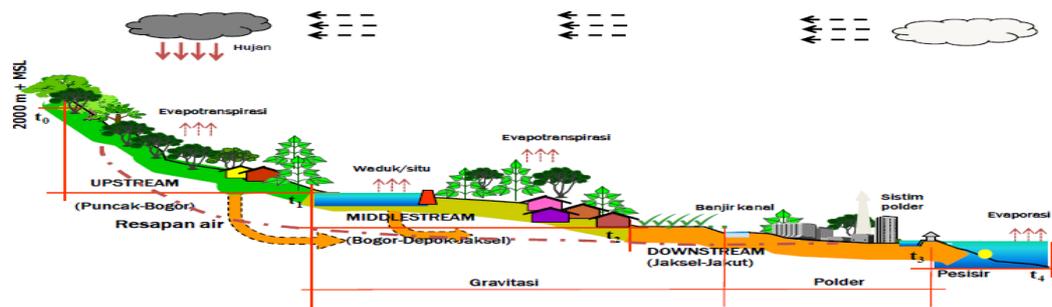


Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2011-2030

Jakarta merupakan kota delta yang dilintasi oleh 13 sungai dan diapit 2 sungai besar di sebelah timur Sungai Citarum dan sebelah barat Sungai Cisadaden. Dua sungai besar ini membawa lebih banyak bahan erosi sehingga terjadi pengendapan yang lebih banyak dari sungai lainnya. Keadaan ini menyebabkan pergeseran garis pantai pada wilayah kedua muara sungai, sehingga terbentuk delta dan semenanjung yang menjorok ke laut, akibatnya terbentuklah Teluk Jakarta.

Proses pembentukan wilayah di sepanjang pantai Teluk Jakarta dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor : (1) pembentukan lahan pantai baru yang berada di muara sungai yang kandungan sedimennya tinggi lebih cepat daripada di muara sungai-sungai yang kandungan sedimennya rendah. Dalam masa ribuan tahun terbentuklah dataran lebar yang disebut dataran alluvial (dataran endapan). Proses sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun mengakibatkan terbentuknya dataran Jakarta semakin melebar, menggeser garis pantai rata-rata enam sampai 9 (sembilan) meter per tahun. Dengan bertambah lebarnya dataran alluvial, maka dataran rendah menjadi lebih landai; (2) iklim yang menimbulkan angin pada musim angin barat meniup ke arah daratan. Hembasan air laut dapat menghalangi pembentukan lahan yang bergantung pada perbandingan antara arus sungai dan besar kecilnya kandungan sedimen yang terbawa. Akibatnya pembentukan Teluk Jakarta ada yang berlangsung cepat, agak lambat bahkan juga terjadi penggerusan dari lahan pantai. Di bagian timur antara Kalibaru sampai Marunda pantai semakin mundur, akibat terkikis oleh abrasi laut.

Gambar 1.5
Topografi DKI Jakarta



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kondisi geografis serta topografi Jakarta sebagai kota delta yang sebagian kawasan utaranya merupakan daerah rendah di bawah permukaan laut serta adanya fenomena perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan intensitas dan variabilitas curah hujan serta peninggian muka air pasang, menjadikan Jakarta sebagai wilayah rawan banjir.

c) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2020 sebanyak 11.201.121 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.634.845 jiwa dan perempuan 5.566.276 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau disebut rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tercatat 101%. Angka tersebut menjelaskan bahwa di DKI Jakarta pada tahun 2020 terdapat kelebihan penduduk laki-laki.

Tabel 1.1
Registrasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis
Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2020

No	NAMA KOTA / KAB	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Kep. Seribu	14,815	14,415	29,230
2	Jakarta Pusat	581,698	572,430	1,154,128
3	Jakarta Utara	930,539	913,923	1,844,462
4	Jakarta Barat	1,295,742	1,274,490	2,570,232
5	Jakarta Selatan	1,185,792	1,183,001	2,368,793
6	Jakarta Timur	1,626,259	1,608,017	3,234,276
Grand Total		5.573.375	5,634,845	5,566,276

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Desember 2020

Berdasarkan Tabel 1.3, terlihat bahwa Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tahun 2020 sekitar 0.98 persen disbanding tahun 2019 dengan kepadatan penduduk sebesar 16.911 jiwa/km².

d) Jumlah Kabupaten / Kota

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007, dengan menyandang status khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan maupun anggaran ditentukan pada tingkat provinsi karena lembaga legislatif hanya ada pada tingkat provinsi.

Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2001 yakni dari 5 kotamadya menjadi 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi. Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, yakni kota Jakarta Selatan dengan luas daratan 141,27 km², Jakarta Timur dengan luas daratan 188,03 km², Jakarta Pusat dengan luas daratan 48,13 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 129,54 km² dan Jakarta Utara dengan luas daratan 146,66 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas daratan 8,70 km².

Untuk memudahkan koordinasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, struktur administrasi wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Selama kurun waktu 2020, jumlah RW dan RT pun mengalami perubahan sesuai pada table di bawah ini.

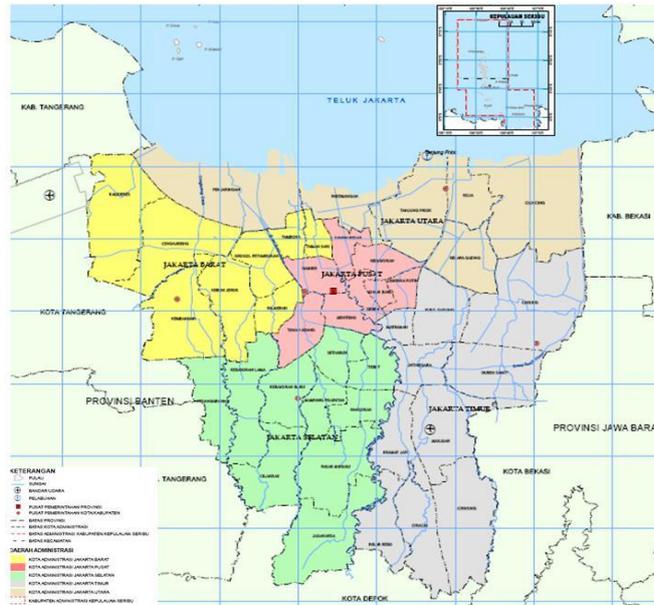
Tabel 1.2

Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga 2020

No	Kota/Kab Administrasi	Luas Area (km ²)	Jumlah				
			Kec	Kel	RW	RT	LMK
1	Jakarta Pusat	48,13	8	44	389	4.559	376
2	Jakarta Utara	146,66	6	31	454	5.279	429
3	Jakarta Barat	129,54	8	56	586	6.499	574
4	Jakarta Selatan	141,27	10	65	579	6.077	571
5	Jakarta Timur	188,03	10	65	709	7.929	707
6	Kep. Seribu	8,70	2	6	24	127	24
Jumlah		662,33	44	267	2.741	30.470	2.681

Sumber : Biro Pemerintahan DKI Jakarta (diolah)

Gambar 1.6
Peta Pembagian Wilayah DKI Jakarta



Sumber: RTRW DKI Jakarta 2030

e) Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Kepegawaian

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007, kelembagaan Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta sampai ke level Kelurahan. Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta bukan Daerah Otonom, melainkan bersifat administrasi.

Jumlah Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perda No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sebanyak 42 Perangkat Daerah, dan Unit Kerja Perangkat Daerah sebanyak 3.826 Unit Kerja Perangkat Daerah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Non ASN yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 59.651 orang ASN dan 63.435 Orang non ASN

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN di Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis Kelamin	Laki - Laki	Perempuan	JUMLAH
1.	ASN	27.607	32.044	59.651
2.	Non ASN	54.765	8.670	63.435

f) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020, ditetapkan APBD Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 82.195.994.476.363,-, namun dalam perubahan terjadi perubahan APBD menjadi Rp, 63.401.103.715.868 seperti pada table di bawah ini.

Tabel 1.4

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 PERIODE SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020 UNREVIEWED				
KODE REKENING	URAIAN	2020 UNREVIEWED		%
		ANGGARAN	REALISASI	
4	PENDAPATAN			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38,085,985,616,631	37,434,537,876,827	98.29
4.1.1	Pajak Daerah	32,480,000,000,000	31,895,381,529,704	98.20
4.1.2	Retribusi Daerah	468,413,750,000	496,330,875,889	105.96
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	844,471,501,251	672,491,534,639	79.63
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4,293,100,365,380	4,370,333,936,595	101.80
4.2	DANA PERIMBANGAN	17,053,362,073,838	16,937,635,313,632	99.32
4.2.1	BAGI HASIL PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	13,647,958,485,055	13,647,958,485,055	100.00
4.2.1.01	BAGI HASIL PAJAK	13,567,076,479,733	13,567,076,479,733	100.00
4.2.1.02	SUMBER DAYA ALAM	80,882,005,322	80,882,005,322	100.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	3,405,403,588,783	3,289,676,828,577	96.60

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2,095,271,075,000	1,570,760,782,044	74.97
4.3.1	Pendapatan Hibah	2,030,094,100,000	1,505,583,807,044	74.16
4.3.4	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	65,176,975,000	65,176,975,000	100.00
JUMLAH PENDAPATAN		57,234,618,765,469	55,942,933,972,503	97.74
5	BELANJA			
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	33,652,193,495,879	29,384,869,082,864	87.32
5.1.1	Belanja Pegawai	15,687,823,944,325	13,565,720,271,911	86.47
5.1.2	Belanja Bunga	76,000,000,000	62,300,098,791	81.97
5.1.3	Belanja Subsidi	4,508,890,241,433	3,628,167,400,666	80.47
5.1.4	Belanja Hibah	2,373,116,610,792	1,892,351,889,978	79.74
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5,113,560,031,000	4,831,504,948,800	94.48
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	371,358,448,200	371,272,698,360	99.98
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,521,444,220,129	5,027,793,129,288	91.06
5.1.9	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	-	5,758,645,070	-
5.2	BELANJA LANGSUNG	25,298,878,219,989	23,101,344,268,257	91.31
5.2.1	Belanja Pegawai	3,303,481,990,471	3,122,134,329,833	94.51
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,098,721,223,094	16,786,500,543,803	92.75
5.2.3	Belanja Modal	3,896,675,006,424	3,192,709,394,621	81.93
JUMLAH BELANJA		58,951,071,715,868	52,486,213,351,121	89.03
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	6,166,484,950,399	5,582,680,038,551	90.53
6.1.1	Saldo Kas Tahun lalu	1,203,971,456,696	1,203,971,456,696	100.00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	1,400,000,000,000	1,474,792,321,413	105.34
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3,562,513,493,703	2,903,596,713,129	81.50
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	319,547,313	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,450,032,000,000	4,217,671,010,242	94.78
6.2.1	Pembentukan dana Cadangan	-	95,680,795,237	-
6.2.2	Penyertaan Modal			92.57

	Investasi	4,416,382,000,000	4,088,360,591,575	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	33,650,000,000	33,629,623,430	99.94
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN		63,401,103,715,868	61,525,614,011,054	97.04
BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN		63,401,103,715,868	56,703,884,361,363	89.44
S I L P A		-	4,821,729,649,691	-
Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi			240,163	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Koreksi dan Penyesuaian			4,821,729,889,854	

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ditargetkan surplus karena peningkatan anggaran pendapatan lebih tinggi dari peningkatan anggaran belanja. Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun, membuat struktur APBD 2020 harus mengalami beberapa kali penyesuaian sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020, terdapat realokasi anggaran dari sisi belanja maupun pengeluaran pembiayaan. Kenaikan Belanja Daerah berasal dari kenaikan pagu BTT yang lebih besar dari pengurangan pagu belanja modal.

Realisasi perekonomian Jakarta pada triwulan II mengalami kontraksi sebesar -8,22 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II disebabkan oleh penurunan Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Lemahnya permintaan global juga berkontribusi terhadap perlambatan perekonomian melalui ekspor yang tumbuhnegatif. Kebijakan pergerakan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta work/school from home, yang berdampak pada penurunan pendapatan serta kemampuan membayar upah sehingga berlanjut pada pemutusan hubungan kerja. Hal ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni

2020 menyebutkan beberapa faktor risiko pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta pada tahun 2020, diantaranya: pertama, penurunan kinerja ekonomi sebagai akibat dari tidak pastinya aktivitas ekonomi. Perilaku wait and see para pelaku ekonomi membuatusaha tidak bergerak dan berdampak pada penambahan jumlah pengangguran serta penurunan daya beli. Kedua, terhambatnya supply chain sebagai akibat kebijakan lockdown di beberapa negara mitra dagang. Hal ini berdampak pada penurunan volume ekspor dan impor. Ketiga, kecepatan penyesuaian cara kerjapara pelaku ekonomi yang lebih perhatian kepada kesehatan dan teknologi akan mempengaruhi kecepatan perekonomian untuk pulih. Keempat, perkembangan harga pangan yang cenderung meningkat akibat terbatasnya pasokan akan beresiko terjadinya inflasi dari sisi suplai.

Pandemi Covid-19 tersebut telah mengubah asumsi ekonomi makro dengan cukup signifikan. Asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang semula diperkirakan sebesar 6,3 persen terkoreksi menjadi -1,1 sd. -0,7 persen. Sementara inflasi yang semula diasumsikan sebesar $3,2 \pm 1$ persen terkoreksi menjadi sebesar 1,5 sd. 1,9 persen. Begitu juga dengan asumsi nilai tukar rupiah. Pada fase penetapan APBD 2020 nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada rentang Rp.14.000,- sd. 15.000,- per Dolar AS, sementara pada fase perubahan asumsi nilai tukar berubah menjadi Rp. 14.400,- sd. 14.800,- per Dolar AS.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya khusus dalam rangka penanganan Covid-19. Upaya tersebut diantaranya dengan mempertahankan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan dan BLUD Kesehatan. Sesuai amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa pelaksanaan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 yang antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga. Sampai dengan pergeseran (refocussing) kelima, Belanja Tidak Terduga yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 5,195 triliun yang

berasal dari Belanja Tidak Terduga murni dan tambahan. Tiga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kesehatan, ekonomi dan jaringan pengamanan sosial.

Dengan dilakukannya refocussing dan realokasi, pembangunan di Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Penyesuaian/rasionalisasi yang dilakukan meliputi 3 aspek, yaitu: rasionalisasi Belanja Pegawai, rasionalisasi Belanja Barang/Jasa serta rasionalisasi Belanja Modal. Rasionalisasi Belanja Pegawai dilakukan dengan memberikan tunjangan kinerja tidak melebihi besaran tunjangan kinerja pusat dan mengendalikan anggaran honorarium. Rasionalisasi Belanja Barang/Jasa dilakukan dengan mengurangi anggaran belanja, perjalanan dinas, barang pakai habis, cetak dan penggandaan, pakaian dinas, pemeliharaan, perawatan kendaraan, sewa gedung, sarana mobilitas dan alat berat sekurang-kurangnya 50 persen. Sedangkan rasionalisasi Belanja Modal dilakukan dengan mengurangi anggaran belanja pengadaan kendaraan dinas, mesin dan alat berat serta pengadaan tanah sekurang-kurangnya 50 persen.

Dampak dari pandemi Covid-19 terdalam diperkirakan terjadi pada triwulan II 2020 seiring penerapan PSBB. Perekonomian diperkirakan membaik pada triwulan III dan IV 2020 seiring berlalunya pandemi dan pulihnya perekonomian global. Kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang dijabarkan melalui RKPD tahun 2020, dihadapkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga agar prioritas pembangunan dapat tercapai. Beberapa permasalahan yang dihadapi dapat antara lain :

A. Pendapatan Daerah

Terkait dengan menurunnya realisasi pendapatan pajak sampai dengan triwulan II, maka dilakukan beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak diantaranya:

1. Perubahan Peraturan Daerah
 - a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.
 - b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.
2. Penyusunan/perubahan Peraturan Gubernur
 - a. Pemberian penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi.
 - b. Nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan PAT.
 - c. Pelaporan, pengambilan, penggunaan dan pemanfaatan BBM Industri.
 - d. Pengenaan pajak hiburan bersifat exclude.
 - e. Nilai sewa reklame.
 - f. Petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak penerangan jalan.
 - g. Pengenaan 0% (Nol Persen) atas BPHTB terhadap perolehan hak pertama kali dengan nilai perolehan objek pajak sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
 - h. Pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administrasi untuk piutang PBB-P2.
 - i. Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak.
 - j. Stimulus bagi pembeli kendaraan baru.
 - k. Tarif layanan parker.
 - l. Pelaporan data transaksi usaha secara elektronik.
 - m. Perijinan usaha.
 - n. Pengukuhan wajib pajak hotel yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
 - o. Pencairan tunggakan dan penagihan aktif.
 - p. Pengenaan pajak hiburan atas bioskop (exclude).
 - q. Sinkronisasi antara PKB dan pajak reklame (atas reklame berjalan).
 - r. Pengukuhan objek BLUD menjadi objek pajak parkir.
 - s. Pemberian sanksi kepada notaris atas pelaporan transaksi di bawah harga wajar.
3. Penyusunan MoU/PKS dengan instansi/stakeholder terkait
 - a. Pertukaran data dan informasi perpajakan dengan DJP.
 - b. Data dan informasi kuota bahan bakar KBm di Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian ESDM.
 - c. Pertukaran data dan informasi dengan virtual hotel operator dan online travel agent.
 - d. Pertukaran data dan informasi dengan penyedia jasa aplikasi transportasi.
 - e. Pertukaran data dan informasi dengan BPN.
 - f. Pemblokiran rekening dengan OJK.

- g. Pemutusan listrik dan air PAM terhadap Penunggak Pajak dengan PLN dan AETRA
- h. Pertukaran data transaksi dengan start-up.
- 4. Perluasan basis pajak melalui proses perizinan (penerbitan izin hotel atas service apartemen)
- 5. Surat Gubernur kepada Kementerian/Lembaga
 - a. Kepada Dirlantas PMJ terkait sosialisasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan optimalisasi ETLE.
 - b. Kepada PT. KAI terkait optimalisasi PAT di 49 stasiun.
 - c. Kepada Kemenkeu terkait status objek restoran yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemda.
- 6. Penerbitan Instruksi Gubernur/Sekda
 - a. Optimalisasi pelaksanaan integrasi data PKB dengan DPMPTSP.
 - b. Pendataan pemanfaatan air tanah dan percepatan penyediaan alat ukur dan alat pencatat meter air.
 - c. Pelibatan Walikota, Camat dan Lurah dalam pendataan/pemutakhiran data rumah kos.
 - d. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame tanpa berkas perizinan.
 - e. Penerbitan himbauan dalam rangka percepatan pembayaran PBBP2.

B. Belanja Daerah

Pada sisi belanja, rasionalisasi dilakukan dengan tetap mempertahankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran garda terdepan di masyarakat seperti honor lembaga kemasyarakatan, RT/RW, Jumantik, Posyandu, LMK, FKDM, Dewan Kota, PKK dan Dasawisma.
- 2) Alokasi anggaran Pelayanan BLUD Kesehatan, Pendidikan, UMKM, Perpustakaan dan Taman Margasatwa Ragunan.
- 3) Alokasi anggaran operasional kantor dan jaringan sebesar 50 persen dari sebelumnya.
- 4) Alokasi anggaran pelayanan masyarakat minimal untuk kesehatan, pendidikan, pengendalian banjir, pemeliharaan jalan, pengelolaan sampah dan BBM KDO Khusus.
- 5) Alokasi anggaran pemeliharaan infrastruktur penanggulangan banjir seperti; kali Sunter, Cipinang Melayu, Cipinang Muara, Kali Krukut, Pesanggrahan, Ciliwung, Jatikramat dan Pondok Bambu, pembayaran rekening PJU dan traffic light.
- 6) Alokasi anggaran program DAK untuk Kesehatan, Pendidikan, UMKM, Dukcapil dan Pariwisata.
- 7) Alokasi anggaran Non PNS pada Perangkat Daerah

tertentu.

C. Pembiayaan Daerah

Pada sisi pembiayaan, permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan RKPD Tahun 2020 yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Investasi) belum dapat dicairkan ke masing-masing BUMD/PT Patungan karena saat ini masih dalam tahap koordinasi pencairan secara bertahap untuk menjaga likuiditas arus kas daerah.

b) Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI DAN MISI



Adapun penjelasan untuk masing-masing elemen dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Pembangunan 2017–2018 adalah:

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.
2. Maju : memiliki arti menjadilebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.
3. Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.
4. Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

5. Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.
6. Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.
7. Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, misi pembangunan 2017-2022 adalah sebagai berikut : Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya - upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Misi Pertama : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya. Jakarta sebagai kota yang aman bagi setiap penghuninya. Perhatian terutama diberikan kepada peningkatan rasa aman bagi perempuan dan anak. Keamanan

tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan layanan Pemerintah, serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan pengawasan keamanan di tempat-tempat publik serta respons atas pengaduan korban kekerasan secara baik dan cepat.

Kesehatan merupakan salah satu indikator pembangunan yang paling penting. Pentingnya cakupan program jaminan kesehatan menjadi salah satu kunci pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil dan berkualitas. Selain itu, Jakarta yang sehat juga akan didorong oleh terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

Jakarta yang pintar diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas. Penjangkauan anak-anak luar sekolah menjadi salah satu upaya untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. Selain itu peningkatan relevansi keahlian masyarakat dengan kebutuhan dan dinamika dunia industri menjadi salah satu upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai motor perubahan pembangunan yang terus relevan.

Kebudayaan menjadi aset utama pembangunan. Jakarta sebagai pusat perekonomian tidak bias mengesampingkan sejarah panjang Jakarta yang mewariskan generasi saat ini dengan kawasankawasan cagar budaya serta koleksi-koleksi museum dan kepurbakalaan yang amat berharga. Selain itu, kesenian dan aspirasi kebudayaan lainnya juga dikembangkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kebudayaan-kebudayaan lokal akan didorong untuk terus dikembangkan, tidak sekedar untuk melestarikan namun juga menjadi pemberi warna atas kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Kebudayaan juga tidak melulu dipandang sebagai kondisi statis, namun terus berkembang. Kreativitas masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebudayaan tetap terus relevan dalam perkembangan zaman.

Jakarta sebagai kota metropolitan sejatinya adalah rumah besar bagi semua orang. Nilai-nilai kekeluargaan menjadi pusat gravitasi semua aktivitas individunya. Nilai moral, kesusilaan, agama dan religious digerakkan di lingkup masyarakat terkecil atau keluarga. Keluarga yang harmonis dan sehat secara mental juga akan melahirkan masyarakat yang mampu menempatkan dirinya dalam dinamika zaman yang terus berubah.

2. Misi Kedua : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta, dan mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausahawirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri. Langkah kedua adalah memastikan keterjangkauan dan kestabilan harga-harga kebutuhan pokok terutama bagi masyarakat tidak mampu. Selanjutnya, pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan pengelolaan tata ruang dan wilayah, serta memastikan meningkatnya daya saing Jakarta melalui kemudahan untuk berbisnis dan berinvestasi.

3. Misi Ketiga : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta

mewujudka tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Jakarta sebagai ruang pembelajaran bagi aparatur negara untuk menumbuh kembangkan kemampuannya. Birokrasi di Jakarta harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur negara juga tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

4. Misi Keempat : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas lingkungan di Jakarta. Pembangunan yang lestari tidak hanya memerhatikan daya dukung lingkungan namun juga menaruh perhatian besar pada daya dukung sosial. Daya dukung sosial ini memerlukan komitmen Pemerintah dan seluruh pihak untuk memastikan adanya keseimbangan antara proses pembangunan yang secara lingkungan lestari dengan pembangunan yang menghormati ruang hidup social masyarakat yang telah dulu ada.

5. Misi Kelima : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia, menjadikan Jakarta sebagaikota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras, dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia.

Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia menjadi miniatur Indonesia yang beragam kelompok, suku, ras dan agama. Semua golongan masyarakat hadir dan membentuk wajah Jakarta yang dinamis dan majemuk serta saling memperkaya khazanah kehidupan sehari-hari di Jakarta. Keberagaman tersebut merupakan sebuah keniscayaan, sehingga sudah selayaknya menjadi modal utama pembangunan Jakarta. Keberagaman tersebut dirayakan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya untuk selalu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta.

c) Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja. Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta. Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

Adapun program-program prioritas yang masuk dalam Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta dapat dijabarkan diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia
 - a. Program Rehabilitasi Sosial
 - b. Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
 - c. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
 - d. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 - e. Program Pengelolaan Risiko Bencana
 - f. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 - g. Program Wajib Belajar 12 Tahun
 - h. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
 - i. Program Peningkatan Mutu Pendidikan
 - j. Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
 - k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

- l. Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
 - m. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
 - n. Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
 - o. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
 - p. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
 - q. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan
 - r. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
 - s. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
 - t. Program Penanganan Fakir Miskin
 - u. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - v. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - w. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - x. Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - y. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - z. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Ekonomi dan Infrastruktur
- a. Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri
 - c. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
 - d. Program Pembinaan dan Pengembangan UKM
 - e. Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM
 - f. Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
 - g. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - h. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
 - i. Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - j. Program Pengendali Banjir dan Abrasi
 - k. Program Pengendalian Banjir
 - l. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
 - m. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
 - n. Program Pengelolaan Persampahan

- o. Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan
 - p. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - q. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - r. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
 - s. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
 - t. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
 - u. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
 - v. Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat
 - w. Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat
 - x. Program Peningkatan Penanaman Modal
 - y. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - z. Program Penataan Ruang
3. Integritas Aparatur
- a. Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN
 - b. Program Peningkatan Kapasitas KORPRI Program Pengembangan Kompetensi SDM
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat
 - d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 - e. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan
 - g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra
 - h. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH
 - i. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian
 - j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - k. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - l. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah
 - m. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- n. Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah
 - o. Program Pemanfaatan Aset Daerah
 - p. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah
 - q. Program Pengelolaan Retribusi Daerah
 - r. Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - s. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
 - t. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - u. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan Aparatur
 - v. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
 - w. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
 - x. Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara
 - y. Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Program Penelitian dan Pengembangan
4. Kota Lestari
- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - b. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
 - c. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
 - d. Program Pengelolaan Hutan
 - e. Program Pengelolaan Pertamanan
 - f. Program Pengelolaan Pemakaman
 - g. Program Penataan Kawasan Permukiman
 - h. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - i. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - j. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - k. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - m. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

- n. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - o. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - p. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan kota administrasi Jakarta timur
 - q. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - r. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - s. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Simpul Kemajuan
- a. Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan
 - b. Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - c. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
 - d. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - e. Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya
 - f. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya
 - g. Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisataProgram

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu mendorong pemerataan pembangunan di DKI Jakarta. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019 diselenggarakan dengan tema :

“Memacu Pertumbuhan Berkualitas.”



d) Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penggunaan/realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 melalui pemanfaatan BTT dengan prioritas sebagai berikut:

1. Penanganan kesehatan, berupa :

- a. Penyediaan dan/atau pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat.
- b. Penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sample melalui penyediaan mobile/container BSL-2 sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Melakukan percepatan penyediaan APD dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak bagi pemerintah daerah yang melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- e. Peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19.
- f. Penyediaan dan penyiapan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman pada berbagai fasilitas umum seperti pasar, terminal, stasiun, kantor layanan pemerintah dan fasilitas-fasilitas lainnya.
- g. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan guna menjaga kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam mematuhi.
- h. Melakukan upaya pelacakan dan pembatasan sosial dalam hal terjadi transmisi lokal kasus pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing.
- i. Dukungan kegiatan penunjang lainnya terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

- j. Penanganan kesehatan lainnya.

2. Penanganan dampak ekonomi, berupa:

- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat.
- b. Pelaksanaan program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.
- c. Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak Covid-19 melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, FGD, seminar dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan status daerah terkait penyebaran Covid-19.
- d. Pemberian stimulus/subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan serta pengoptimalan platform digital dalam kegiatan pemasaran.
- e. Perluasan target/sasaran kegiatan KUBE di Daerah.
- f. Promosi investasi domestik maupun internasional.
- g. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.
- h. Penanganan dampak ekonomi lainnya.

3. Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, berupa:

- a. Melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat yang menangani pendataan yang dimaksud.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan sosial dan/hibah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah.
- c. Melakukan pendataan terhadap daftar nama dan alamat penerima BLT, dalam rangka menjaga tidak terjadi tumpang tindih dengan pelaksanaan bantuan sosial lainnya.

- d. Percepatan penyaluran pemberian hibah/ bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain :
- 1) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/ harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak pandemi Covid-19;
 - 2) Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19.
 - 3) Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid19.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan 5 (lima) kali pergeseran/refocussing APBD dalam rangka penanganan Covid-19 yang tertuang dalam Pergub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pergub Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pergub Nomor 37 Tahun 2020 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 , Pergub Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan . Pergub Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Prinsip rasionalisasi anggaran Tahun 2020 yaitu:

1. Mempertahankan alokasi anggaran garda terdepan di masyarakat seperti; honor lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, Jumantik Posyandu, LMK, FKDM, Dewan Kota, PKK, Dasawisma.

2. Mempertahankan alokasi anggaran pelayanan BLUD seperti: kesehatan, pendidikan, UMKM, perparkiran dan Taman Margasatwa Ragunan.
3. Mempertahankan anggaran operasional kantor dan jaringan, sebesar 50% untuk operasional kantor dan jaringan Diskominfo.
4. Mempertahankan alokasi anggaran pelayanan masyarakat minimal diantaranya: kesehatan, pendidikan, pengendalian banjir, pemeliharaan jalan, pengelolaan sampah dan BBM KDO Khusus.
5. Mempertahankan alokasi anggaran pemeliharaan infrastruktur seperti untuk penanggulangan banjir kali Sunter Cipinang Melayu, Cipinang Muara, Kali Krukut, Pesanggrahan, Ciliwung, Jatikramat dan Pondok Bambu, pembayaran rekening PJU dan traffic light.
6. Mempertahankan alokasi anggaran program DAK.
7. Mempertahankan alokasi anggaran Non PNS pada Perangkat Daerah tertentu seperti command center, pengaduan, pendampingan TNI/POLRI dalam pengamanan, dll

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwasanya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : a). Pendidikan, b). Kesehatan, 3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5). Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan 6). Sosial. Lebih lanjut pengaturan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) Urusan Pemerintahan tersebut diatur melalui PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal dan Penerapannya oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan pedoman teknis masing-masing pelaksanaan masing-masing urusan Pemerintahan diatur melalui :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Secara umum pelaksanaan dan penerapan SPM telah tertuang dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022. Sebagaimana Visi Kepala Daerah yakni “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”, penitik beratan kebijakan umum terkait dengan upaya pemenuhan SPM dapat terlihat dalam pemahaman atas Visi tersebut khususnya pada frasa Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan. Ketiga pokok pikiran dalam Visi tersebut diterjemahkan sebagai :

1. Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.
2. Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya)

yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

3. Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

Dasar hukum penerapan SPM termasuk pedoman pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah secara keseluruhan pada kurun waktu tahun 2018-2019, atau setelah penetapan Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen RPJMD 2017-2022 yang ditetapkan pada tahun 2018. Sehingga sinkronisasi muatan SPM pada RPJMD baru dapat dilaksanakan pada tahun 2021 sejalan dengan pelaksanaan Perubahan RPJMD yang saat ini berproses menyikapi adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019. Secara substansi penyesuaian indikator penerapan SPM pada Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, mengacu pada pedoman teknis dan target pencapaian seluruh jenis layanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyesuaian lainnya mengarah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana SPM, dimana target capaian SPM menjadi bagian dari target kinerja program dan anggaran yang lebih lanjut menjadi dokumen kinerja yang diperjanjikan oleh masing-masing kepala Perangkat daerah pelaksana SPM setiap tahunnya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2019	%
1	Indeks Pembangunan Manusia	80.77	80.76	0.01
2	Angka Kemiskinan	4.53	3.42	32.46
3	Angka Pengangguran	10.95	6.22	76.05
4	Pertumbuhan Ekonomi	(2.36)	5.96	-139.60
5	Pendapatan Per kapita	260,440,000.00	256,880,765.00	1.39
6	Ketimpangan Pendapatan	0.399	0.391	2.05

Sumber : BPS Prov DKI 2021

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan Provinsi tetapi juga sampai pada kewenangan Kabupaten/Kota.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
	Urusan Wajib							
1	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 – 18 Tahun dalam Pendidikan Menengah	1	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	JUMLAH	534	534	DISDIK
			2	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	JUMLAH	46,390	46390	
			3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	JUMLAH	217287	217287	
			4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	JUMLAH	91,495	91495	
			5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	JUMLAH	56952	56952	
			6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	10524	10524	
			7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	12284	12284	
			8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	10332	10332	
			9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	11327	11327	
			10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	3648	3648	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
			11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	3731	3731	
			12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	3058	3058	
			13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	3281	3281	
			14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	JUMLAH	5687	5687	
			15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	JUMLAH	4507	4507	
			16	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	JUMLAH	291	291	
			17	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	JUMLAH	355	355	
			18	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	JUMLAH	22	22	
			19	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	JUMLAH	1734	1734	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
			20	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	JUMLAH	1312	1312	
			21	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	JUMLAH	1782	1782	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara 4-18 th penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	22	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	80	80	
			23	Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	JUMLAH	2984	2984	
			24	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	JUMLAH	4075	4075	
			25	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	1486	1486	
			26	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	1448	1448	
			27	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	333	333	
			28	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	279	279	
			29	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	JUMLAH	606	606	
			30	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	JUMLAH	57	57	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
			31	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	JUMLAH	156	156	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara 5-6 Tahun dalam Pendidikan PAUD	32	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	1421	1421	
			33	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	JUMLAH	0	0	
			34	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	JUMLAH	8485	8485	
			35	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	13106	13106	
			36	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	12999	12999	
			37	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	JUMLAH	2401	2401	
			38	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	JUMLAH	510	510	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara 7-12 Tahun dalam Pendidikan Dasar	39	Jumlah SD Terakreditasi	JUMLAH	2743	2743	
			40	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	JUMLAH	363745	363745	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			41	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	JUMLAH	605350	605350	
			42	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	37219	37219	
			43	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	JUMLAH	34771	34771	
			44	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	11146	11146	
			45	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	6957	6957	
			46	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	JUMLAH	16357	16357	
			47	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	JUMLAH	1315	1315	
			48	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	JUMLAH	3958	3958	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara 13-15 Tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	49	Jumlah SMP Terakreditasi	JUMLAH	1240	1240	
			50	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	JUMLAH	188,293	188293	
			51	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	JUMLAH	220,449	220449	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			52	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	JUMLAH	18621	18621	
			53	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	JUMLAH	17596	17596	
			54	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	JUMLAH	6303	6303	
			55	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	JUMLAH	5386	5386	
			56	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	JUMLAH	9927	9927	
			57	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	JUMLAH	492	492	
			58	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	JUMLAH	2617	2617	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 – 18 yg belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yg berpartisipasi dalam	59	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	143	143	
			60	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	JUMLAH	2215	2215	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
		pendidikan kesetaraan	61	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	JUMLAH	18192	18192	
			62	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	1238	1238	
			63	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	JUMLAH	1074	1074	
			64	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	JUMLAH	3	3	
			65	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	JUMLAH	254	254	
			66	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	JUMLAH	147	147	
2	Kesehatan	Presentase Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi	67	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	JUMLAH	167	167	
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	68	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	8431	8431	
			69	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	JUMLAH	1287	1287	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
			70	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	JUMLAH	1287	1287	
			71	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	JUMLAH	1287	1287	
			72	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	JUMLAH	148573	148573	
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yg terdampak dan berisiko pada situasi KLB	73	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	1238373	1238373	
			74	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	JUMLAH	304	304	
			75	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	JUMLAH	28	28	
		Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	76	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	9348518	9348518	
			77	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	JUMLAH	3688	3688	
		Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	78	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	284651	284651	
			79	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	JUMLAH	3923	3923	
		Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	80	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	537872	537872	
			81	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	JUMLAH	3704	3704	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	82	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	3197259	3197259	
			83	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	JUMLAH	2690	2690	
		Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	20369	20369	
			85	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	JUMLAH	1516	1516	
		Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	86	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	3110927	3110927	
			87	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 th sesuai standar	JUMLAH	4048	4048	
		Cakupan orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	662809	662809	
			89	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 60 th ke atas sesuai standar	JUMLAH	1043	1043	
		Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	1360	1360	
			91	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar	JUMLAH	3601	3601	
		Cakupan penderita Diabetes Melitus yang	92	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	2444122	2444122	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan DM sesuai standar	JUMLAH	3283	3283	
		Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	94	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	0	tdi	
			95	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ODGJ sesuai standar	JUMLAH	111	111	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	96	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	772167	772167	
			97	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	JUMLAH	1801	1801	
		Cakupan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	98	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	JUMLAH	4777692	4777692	
			99	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan HIV sesuai standar	JUMLAH	576	576	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	100	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi, Kab/Kota (ha)	Ha	3606.2872 34	3606.28723 4	SDA
			101	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi, Kab/Kota (m)	METER		tdi	
			102	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi, Kab/Kota	<u>Ada/tidak</u>	Ada	ada	
			103	Data prasarana dan sarana pengaman sungai milik pemerintah provinsi, Kab/Kota	JUMLAH	1075	1075	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
		Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi	104	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi, Kab/Kota (ha)	Ha	346.11	346.11	
			105	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi, Kab/kota (m)	METER	21332.64	21332.64	
			106	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi, Kab/Kota	<u>Ada/tidak</u>	<u>Ada</u>	ada	
			107	Data prasarana dan sarana pengaman pantai milik pemerintah provinsi, Kab/Kota	JUMLAH	12		
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	108	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik :	%	1	100.00	
				Panjang jaringan irigasi primer dlm kondisi baik(m)		1		
				Luas keseluruhan panjang jaringan irigasi primer (m)		1		
			109	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik :	%	1	100.00	
				Panjang jaringan irigasi sekunder dlm kondisi baik(m)		1		
				Luas keseluruhan panjang jaringan irigasi sekunder (m)		1		
			110	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik :	%	1	100.00	
				Panjang jaringan irigasi tersier dlm kondisi baik(m)		1		
				Luas keseluruhan panjang jaringan irigasi tersier (m)		1		
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas	111	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	<u>Ada/tidak</u>	Tidak	tidak	
			112	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	<u>Ada/tidak</u>	Ada	ada	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Elemen Data	Capaian Kinerja			
		kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	113	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	JUMLAH	1	1		
			114	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	JUMLAH	7	7		
			115	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	JUMLAH	1	1		
	Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	116	Jumlah SPALD Regional	JUMLAH	26	26	DBM		
			117	Total kapasitas SPALD Regional	JUMLAH	6275			6275
			118	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	JUMLAH	6022			6022
			119	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	JUMLAH	26			26
			120	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik	JUMLAH	1			1
	Jalan provinsi,Kab/Kota dalam kondisi baik	121	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	JUMLAH	0	0			
			122	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Ada/tidak	tidak			
			123	Panjang jalan yang dibangun	JUMLAH	0		0	
			124	Panjang jembatan yg dibangun	JUMLAH	0		0	
			125	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	JUMLAH	27	27		
			126	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	JUMLAH	0	0		
			127	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	JUMLAH	6	6		
			128	Panjang jembatan yang direhabilitasi	JUMLAH	0	0		
			129	Panjang jalan yang dipelihara	JUMLAH	25	25		
			130	Panjang jembatan yang dipelihara	JUMLAH	1	1		

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
			131	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi, Kab/Kota	JUMLAH	0	0	
			132	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi, Kab/kota	JUMLAH	1554	1554	
			133	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi, Kab/kota	JUMLAH	1554	1554	
			134	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi, Kab/Kota yang aktif dengan data termutakhir	<u>Ada/tidak</u>	tidak	tidak	
			135	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi, Kab/kota yang bersumber dari APBD provinsi	<u>Ada/tidak</u>	tidak	tidak	
		Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi, Kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	136	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi, Kab/Kota yang bersumber dari APBN	<u>Ada/tidak</u>	tidak	tidak	
			137	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi, Kab/Kota yang bersumber dari pendanaan lainnya	<u>Ada/tidak</u>	tidak	tidak	
			138	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi, Kab/Kota	<u>Ada/tidak</u>	tidak	tidak	
			139	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi, Kab/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	<u>Ada/tidak</u>	tidak	tidak	
			140	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi, Kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	<u>Ada/tidak</u>	ada	ada	
			141	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi, Kab/Kota	<u>Ada/tidak</u>	ada	ada	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			142 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	tidak	tidak	
			143 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	tidak	tidak	
			144 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	tidak	tidak	
		Persentase jumlah rumah Tangga Pengguna yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh DKI Jakarta	145 Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada/tidak	Tidak	tidak	SDA
			146 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada/tidak	Ada	ada	
			147 Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	JUMLAH	1	1	
			148 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	JUMLAH	1	1	
			149 Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	JUMLAH	1	1	
		Persentase jumlah Rumah Tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	150 Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	JUMLAH		tdi	
			151 Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	JUMLAH		tdi	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			152	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	JUMLAH		tdi	
			153	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	JUMLAH		tdi	
			154	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	JUMLAH		tdi	
			155	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	JUMLAH		tdi	
			156	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar :	%		tdi	
				Jumlah rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubuk/tanki septik				
				Jumlah rumah di wil pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wil terbangun < 25 jiwa/ha				
			157	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman :	%		tdi	
				Jumlah rumah yg lumpur tinjanya telah dioah di IPLT				
				Jumlah rumah di wil pengembangan SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wil terbangun > 25 jiwa/ha				
			158	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman :	%		81.76	
				Jumlah rumah yg memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD		2085		
				Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT		2550		
			159	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat :	%		tdi	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Jumlah rumah yg memiliki akses unit pengolahan setempat					
			Jumlah rumah yg termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S					
		160	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja :	%		tdi		
			Jumlah sarana pengangkutan yg tersedia					
			Jumlah saranapengangkutan yang dibutuhkan					
		161	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja :	%		tdi		
			Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yg tersedia					
			Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yg dibutuhkan					
		162	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD :	%		100.00		
			Jumlah rumah yg memiliki sambungan rumah yg tersambung dengan IPALD		2085			
			Jumlah rumah yg dilayani dengan SPALD-T		2085			
		163	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja :	%		tdi		
			Jumlah rumah yg tangki septiknya sudah disedot					
			Jumlah rumah yg termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S					
	Kepatuhan IMB	164	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi :	%		tdi	CITATA	
			Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yg laik fungsi yg berlaku		0			

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana)		0		
			165 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	JUMLAH		tdi	
			166 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	<u>Ada/tidak</u>		tdi	
			167 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	<u>Ada/tidak</u>		tdi	
			168 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	JUMLAH		tdi	
			169 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	JUMLAH		tdi	
			170 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	JUMLAH		tdi	
			171 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	JUMLAH		tdi	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	172 Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	JUMLAH	0	0	DINAS PERUMAHAN
			173 Jumlah rumah yang terkena bencana alam	JUMLAH	0	0	
			174 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	JUMLAH	0	0	
			175 Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	JUMLAH	0	0	
			176 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	JUMLAH	0	0	
			177 Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	JUMLAH	0	0	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
			178	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	JUMLAH	0	0	
			179	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	JUMLAH	0	0	
			180	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	JUMLAH	0	0	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	181	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	JUMLAH	0	0	
			182	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	JUMLAH	0	0	
			183	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	JUMLAH	64	64	
			184	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	JUMLAH	0	0	
		Persentasi Luas kawasan kumuh 0 – 15 Ha yang ditangani	185	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh 0 -15 Ha	JUMLAH	10621	10621	
			186	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	JUMLAH		tdi	
			187	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh	JUMLAH	2468	2468	
		Persentase satuan	188	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	JUMLAH		tdi	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Elemen Data	Capaian Kinerja			
		perumahan yang sudah dilengkapi PSU	189	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	JUMLAH		tdi		
			190	Jumlah pengembang yang teregistrasi	JUMLAH		tdi		
			191	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	JUMLAH		tdi		
		Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	192	Jumlah rumah	JUMLAH	2720051	2720051		
			193	Jumlah unit PK RTLH	JUMLAH		tdi		
			194	Jumlah rumah tidak layak huni	JUMLAH		tdi		
			195	Jumlah rumah yang tidak dihuni	JUMLAH	163,357	163357		
			196	Rasio rumah dan KK :		%			101.42
				Jumlah KK			2758709		
				Jumlah total unit rumah			2720051		
		197	Jumlah rumah pembangunan baru	JUMLAH	5899	5899			
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	198	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum provinsi, lintas Kab/Kota yang ditangani	JUMLAH	95.84	95.84	SATPOL PP	
			199	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	JUMLAH	0	0		
			200	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	JUMLAH	3904	3904		
			201	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	JUMLAH	1	1		
			202	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	JUMLAH	239	239		
			203	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	JUMLAH	107	107		

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	204	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	<u>Ada/tidak</u>	tidak	tidak	BPBD
			205	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	<u>Ada/tidak</u>	tidak	tidak	
			206	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	<u>Ada/tidak</u>	ada	ada	
		Persentase penanganan pra bencana	207	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	JUMLAH	6	6	
			208	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	JUMLAH	6	6	
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	209	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	<u>Ada/tidak</u>	ada	ada	
			210	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	<u>Ada/tidak</u>	ada	ada	
			211	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	<u>Ada/tidak</u>	ada	ada	
			212	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	<u>Ada/tidak</u>	ada	ada	
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	213	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal :	%		100.00	
				Kemajuan pekerjaan dokumen yg disusun		80		
			214	Jumlah satuan dokumen KRB yg lengkap dan sudah disajikan		80		
				Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana :	%		100.00	
				Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yg memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		2175351		

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Elemen Data	Capaian Kinerja		
				seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		2175351			
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	215	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal :	%		100.00		
				Kemajuan pekerjaan dokumen yg disusun		80			
				Jumlah satuan dokumen RPB yg lengkap dan sudah disahkan		80			
			216	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal :	%		100.00		
				Kemajuan pekerjaan dokumen yg disusun		80			
				Jumlah satuan dokumen renkon yg lengkap dan sudah disajikan		80			
			217	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan :	%		2.68		
				Jumlah aparatur dan warga negara yg ikut pelatihan		58360			
				Jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana		2175351			
			218	Persentase warga negara yang ikut pelatihan :	%		2.68		
				Jumlah warga negara yg ikut pelatihan		58360			
				Jumlah warga negara yg berada di kawasan rawan bencana		2175351			
		219	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana :	%		100.00			
			Jumlah waraga negara yg mendapat layanan pusdalops		2175351				
			Jumlah warga negara yg berada di kawasan rawan bencana		2175351				
		220	Persentase warga negara yang mendapat	%		100.00			

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			peralatan perlindungan :					
			Jumlah warga negara yg mendapat layanan peralatan perlindungan		2175351			
			Jumlah warga negara yg berada di kawasan rawan bencana		2175351			
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	221	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB :	%		100.00	
			221	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB		1		
			221	Jumlah seluruh penetapan KLP		1		
			222	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%			100.00
			222	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana		1		
			222	Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana		1		
			223	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%			100.00
			223	Jumlah petugas yg aktif dalam penanganan darurat bencana		145		
			223	Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana		145		
			224	pentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana :	%			100.00
			224	Jumlah korban yg berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi		95249		
			224	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		95249		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			225	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	JUMLAH	2054	2054	DAMKAR
			226	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	<u>Ada/tidak</u>	Ada	ada	
			227	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	<u>Ada/tidak</u>	Ada	ada	
		Persantase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	228	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	dibuat dalam bentuk daftar	123	123	
			229	Jumlah sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah	21299	21299	
				jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Jenis	36	36	
			230	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	JUMLAH	2557	2557	
			231	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	JUMLAH	58	58	
			232	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	JUMLAH	56	56	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	233	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	JUMLAH	2916	2916	DINSOS
			234	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	JUMLAH	2916	2916	
			235	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	JUMLAH	73	73	
			236	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	125	125	
			237	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	603	603	
			238	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	59	59	
			239	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	84	84	
			240	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	13	13	
			241	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti	JUMLAH	96	96	
			242	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	JUMLAH	60	60	
			243	Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	23	23	
			244	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	JUMLAH	2652	2652	
			245	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	JUMLAH	2754	2754	
			246	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	JUMLAH	922	922	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
			247	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	JUMLAH	926	926	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	248	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	JUMLAH	2649	2649	
			249	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	JUMLAH	2943	2943	
			250	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	JUMLAH	130	130	
			251	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	7	7	
			252	Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	304	304	
			253	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	9	9	
			254	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	37	37	
			255	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	0	0	
			256	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	43	43	
			257	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	JUMLAH	1401	1401	
			258	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	JUMLAH	1453	1453	
			259	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	JUMLAH	482	482	
			260	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	JUMLAH	1530	1530	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			261	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	JUMLAH	182	182	
			262	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	JUMLAH	212	212	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	263	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	JUMLAH	1531	1531	
			264	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	JUMLAH	1531	1531	
			265	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	JUMLAH	79	79	
			266	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	144	144	
			267	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	844	844	
			268	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	39	39	
			269	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	JUMLAH	1203	1203	
			270	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	1	1	
			271	Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	61	61	
			272	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	JUMLAH	569	569	
			273	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	JUMLAH	1428	1428	
			274	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	JUMLAH	1454	1454	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
			275	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	JUMLAH	97	97	
			276	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	JUMLAH	79	79	
			277	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	JUMLAH	281	281	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	278	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	JUMLAH	2065	2065	
			279	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	JUMLAH	2065	2065	
			280	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	JUMLAH	58	58	
			281	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	14	14	
			282	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	502	502	
			283	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	8	8	
			284	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	JUMLAH	275	275	
			285	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	0	0	
			286	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	JUMLAH	5	5	
			287	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	JUMLAH	393	393	
			288	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	JUMLAH	1810	1810	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			289 Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	JUMLAH	883	883	
			290 Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	JUMLAH	640	640	
			291 Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulurusan keluarga	JUMLAH	370	370	
			292 Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	JUMLAH	868	868	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi, Kab/Kota	293 Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	JUMLAH	321586	321586	
			294 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	JUMLAH	13544	13544	
			295 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	JUMLAH	175	175	
			296 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	JUMLAH	0	0	
			297 Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	JUMLAH	600	600	
			298 Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia	JUMLAH	3725	3725	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	299 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	JUMLAH		tdi	
			300 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	JUMLAH	221756	221756	
			301 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	JUMLAH	439	439	
			302 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	JUMLAH		tdi	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			dijangkau				
			303 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	JUMLAH		tdi	
			304 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	JUMLAH		tdi	
			305 Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	JUMLAH		tdi	
			306 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	JUMLAH		tdi	
			307 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	JUMLAH	649	649	
			308 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	JUMLAH		tdi	
			309 Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	JUMLAH		tdi	
			310 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	JUMLAH		tdi	
			311 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	JUMLAH		tdi	
			312 Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	JUMLAH		tdi	
			313 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	JUMLAH		tdi	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
			314	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	JUMLAH		tdi	
			315	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	JUMLAH		tdi	
			316	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	JUMLAH		tdi	
			317	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	JUMLAH		tdi	
			318	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	JUMLAH		tdi	
			319	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	JUMLAH		tdi	
7	Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	320	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi :	%		tdi	DISNAKERTRANS EN
				Dokumen RTK yg telah tersusun yg sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yg berlaku		0		
				Dokumen RTK yg telah tersusun kesleuruhan		0		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja Rumus perhitungan : Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100. Kemudian nilai 100 dikurangi dengan hasil perhitungan selisih masing-masing indikator Kemudian hasil perhitungan di atas dijumlahkan dan dibagi 6	%		tdi		
			Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	JUMLAH		tdi		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	JUMLAH		tdi		
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNi/okupasi :	%		0.00		
			324	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n		0		
				Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasikompetensi maupun klaster pada tahun n		42		
				Persentase instruktur bersertifikat kompetensi :	%		76.42	
			325	Jumlah instruktur bersertifikat pada tahun n		175		
				Jumlah instruktur keseluruhan pada tahun n		229		
				Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan :	%		2.40	
			326	Jumlah instruktur keseluruhan pada tahun n		229		
				Jumlah peserta pelatihan pada tahun n		9528		
			327	Persentase penganggur yang dilatih :	%		3.55	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Jumlah peserta pelatihan pada tahun n		9528			
			jumlah pengangguran pada tahun n		268324			
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi :	%		tdi		
			328	jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n		0		
				jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n		0		
			329	Persentase penyerapan lulusan :	%		tdi	
				Jumlah lulusan yg bekerja pada tahun n		0		
				jumlah lulusan pada tahun n		0		
			330	Persentase LPK yang terakreditasi :	%		tdi	
				Jumlah LPK yg terakreditasi pada tahun n		0		
				jumlah seluruh LPK pada tahun n		0		
			331	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan :	%		tdi	
				Jumlah CPMI dilatih		0		
				Jumlah CPMI terdaftar		0		
		332	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	JUMLAH		tdi		
		333	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas :	%		tdi		
			Jumlah perusahaan yg menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n		175			
			Jumlah perusahaan pada tahun n		0			
		334	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas :	%		tdi		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Jumlah lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yg menjadi jejaring peningkatan produktivitas pd tahun n		25			
			jumlah lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan di prov pada tahun n		0			
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	335	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) :	%		100.00	
				Jumlah perusahaan yg telah memiliki PP pada tahun n		19169		
				Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 org atau lebih		19169		
				336	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB :	%		60.69
					Jumlah perusahaan yg telah memiliki PKB pd tahun n		2330	
					Jumlah perusahaan yg memiliki serikat pekerja/serikat buruh		3839	
				337	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n Rumus perhitungan : Jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan sesuai yang tercantum dalam formulir pendaftaran PKB di satu Provinsi pada tahun n	JUMLAH	327592	327592
					338	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah :	%	100.00
					Jumlah perusahaan yg sudah menyusun struktur dan skala upah		22299	
					Jumlah perusahaan yg telah mengatur syarat kerja (dlm PP atau PKB)		22299	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan :	%		138.62		
			339	Jumlah perusahaan yg sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan		113619		
				Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor		81967		
			340	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit :	%			81.59
				Jumlah perusahaan yg sudah membentuk LKS bipartit		12017		
				Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor		14728		
			341	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih :	%			1.57
				Jumlah perusahaan yg berselisih		1290		
				Jumlah perusahaan pada tahun n		81967		
			342	Jumlah mogok kerja	JUMLAH	28		28
			343	Jumlah penutupan perusahaan	JUMLAH	0		0
			344	Jumlah perselisihan kepentingan	JUMLAH	30		30
			345	Jumlah perselisihan hak	JUMLAH	184		184
			346	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	JUMLAH	0		0
			347	Jumlah perselisihan PHK	JUMLAH	1076		1076
			348	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	JUMLAH	4380		4380
			349	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	JUMLAH	0		0
			350	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada/tidak	tidak		tidak
			351	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	UMP yg ditetapkan	4276349.91		4276349.91

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional :	%		11.55	
			Jumlah perjanjian bersama		149		
			Jumlah kasus perselisihan		1290		
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	353 Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	JUMLAH		tdi	
			354 Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	JUMLAH		tdi	
			355 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	JUMLAH	17281	17281	
			356 Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	JUMLAH		tdi	
			357 Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	JUMLAH	62	62	
			358 Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	JUMLAH	28	28	
			359 Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	JUMLAH	4	4	
			360 Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	JUMLAH	5	5	
			361 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	JUMLAH		tdi	
			362 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya :	%	120	0.00	
			Jumlah fasilitasi PMI yg dipulangkan		0		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			Jumlah PMI yg dipulangkan		292		
			Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan :	%		tdi	
		363	Jumlah izin yg diterbitkan		0		
			Jumlah pengajuan ijin kantor cabang		0		
			Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI) :	%		tdi	
		364	Jumlah pos pelayanan yg terbentuk		0		
			Jumlah debarkasi/embarkasi		0		
		365	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	JUMLAH	3900	3900	
		366	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	JUMLAH	3790	3790	
		367	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	JUMLAH	3294	3294	
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan					

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			368	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	JUMLAH	3401	3401	
			369	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	JUMLAH	3894	3894	
			370	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	JUMLAH	2843	2843	
			371	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	JUMLAH	8	8	
			372	Jumlah perusahaan yang mendaftarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	JUMLAH	81967	81967	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	373	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	JUMLAH	37	37	DPPAPP
			374	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	JUMLAH	25	25	
		375	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	JUMLAH	12	12		
		376	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	JUMLAH	9	9		
		377	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani :		%		100.00	
			Jumlah korban kekerasan anak yg dilayani			100		
			Jumlah korban kekerasan anak			100		
		378	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat	JUMLAH	9	9		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			pelatihan					
			379 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	JUMLAH	0	0		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	380 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	JUMLAH	12	12		
			381 Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	JUMLAH	1	1		
			382 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani :		%		100.00	
				Jumlah korban kekerasan perempuan yg dilayani		100		
			Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan		100			
			383 Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	JUMLAH	384	384		
			384 -Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	JUMLAH	3	3		
9	Pangan	Persentase cadangan pangan	385 Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak	<u>Ada</u>	ada	DKPKP	
			386 Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak	<u>Ada</u>	ada		
			387 Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi, Rumus : Cara menghitung Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) = 20% x cadangan beras total Provinsi Cara menghitung Cadangan Beras Total Provinsi = (0.5% x jumlah penduduk Provinsi x	JUMLAH	5019	5019		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			konsumsi beras per kapita per tahun di Provinsi) : 1000				
			388 Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak	<u>Ada</u>	ada	
			389 Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Ada/tidak	<u>Ada</u>	ada	
			390 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada/tidak	<u>Ada</u>	ada	
			391 Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada/tidak	<u>Ada</u>	ada	
			392 Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada/tidak	<u>Ada</u>	ada	
			393 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada/tidak	<u>Tidak</u>	tidak	
			394 Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada/tidak	ADA	ada	
			395 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada/tidak	<u>Tidak</u>	tidak	
			396 Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada/tidak	ADA	ada	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	397	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi :	%		45.83	DPM PTSP / DBM / SDA / DINAS KEHUTANAN / DINAS PERUMAHAN
				Jumlah SK penetapan lokasi yg diterbitkan		11		
				Jumlah dokumen perencanaan yg diusulkan		24		
			398	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan :	%		63.24	
				Jumlah masalah yg diselesaikan		16,501		
				Jumlah masalah yg terdaftar		26,093		
			399	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur :	%		100.00	
				Jumlah ijin lokasi yg diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)		35		
				Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun		35		
			400	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	%		100.00	
				Jumlah dokumen peletakan lokasi rencan penggunaan tanah yg disusun		4		
				Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yg direncanakan dalam 1 tahun		4		
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	401	Indeks Kualitas Air	JUMLAH	41.19	41.19	DLH
			402	Indeks Kualitas Udara	JUMLAH	66.69	66.69	
			403	Indeks Tutupan Hutan	JUMLAH	25.99	25.99	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	404	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi :	%		tdi
				Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		0	
				Jumlah usulan permohonan yg teregistrasi		0	
			405	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi :	%		tdi
				Jumlah PPLHD yg ada		12	
				Jumlah kegiatan dan atau usaha yg izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yg diterbitkan oleh Pemda		0	
			406	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi :	%		0.00
				Jumlah MHA yg diakui dgn perda		0	
				Jumlah usulan MHA		0	
			407	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH :	%		0.00
				Jumlah MHA yg mendapatkan pelatihan		0	
				Jumlah MHA yg ada		0	
			408	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota :	%		100.00

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
				Pengaduan masyarakat yg ditangani		1554		
				Total jumlah pengaduan masyarakat yg terigister		1554		
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Provinsi	409	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	JUMLAH	0.081	0.08148381	
			410	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	JUMLAH	3.265	3.26457573 2	
			411	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	JUMLAH	0.000	0.000	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	412	Fasilitasi pelayanan Adminduk :	%		100.00	DUKCAPIL
				Jumlah kabupaten kota yg difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun		6		
				jumlah kab/kota		6		
		Pemanfaatn data kependudukan	413	Fasilitasi pelayanan Adminduk :	%		100.00	
				Jumlah kabupaten kota yg difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun		6		
				jumlah kab/kota		6		
		Perekaman KTP el	414	Penerbitan akta perkawinan :	%		100.00	
				Jumlah akta perkawinan yg diterbitkan		8426		
				Peristiwa perkawinan yg diterbitkan		8426		
			415	Penerbitan akta perceraian :	%		100.00	
				Jumlah akta perceraian yg diterbitkan		1558		
				peristiwa perceraian yg diterbitkan		1558		
		416	Penerbitan akta kematian :	%		100.00		
			Jumlah akta kematian yg diterbitkan		74330			
			peristiwa kematian yg diterbitkan		74330			
417	Penyajian data kependudukan :	%		100.00				

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
				Jumlah penyajian data kependudukan dlm satu tahun		2		
				2 tahun		2		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal DKI TIDAK ADA DESA	418	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	JUMLAH	0	0	DPPAPP
			419	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	JUMLAH	0	0	
			420	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	JUMLAH	0	0	
			421	-Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	JUMLAH	0	0	
		422	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	JUMLAH	0	0		
		423	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	JUMLAH	0	0		
		424	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	JUMLAH	0	0		
		425	-Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	JUMLAH	0	0		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga	TFR (Angka Kelahiran Total)	426	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/tidak	Tidak	tidak	

NO	Urusan Berencana	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			427	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	JUMLAH	23.1	23.1	
			428	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Rumus : $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$	JUMLAH	25	25	
			429	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) :	%		tdi	
				Jumlah masy yg terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi & KIE)		0		
				jumlah sasaran masyarakat program KKBPK		0		
			430	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	JUMLAH	14	14	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	431	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP :	%		60.62	
				Jumlah faskes yg siap melayani KB MKJP		905		
				Jumlah faskes		1493		
			432	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) :	%	21.38	21.38	
				Jumlah peserta KB aktif		551,771		
				Jumlah PUS		2,580,813		
			433	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	JUMLAH	2941	2941	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB					
					Elemen Data	Capaian Kinerja						
			Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	34.37	34.37						
			434	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern		44,297						
				jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan		128,884						
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		435	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah, persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Provinsi. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendah	%		56.68	56.68			
				436	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%		64.09	64.09			
					Jumlah peserta KB pad keluarga penerima PBI			220,552				
					Jumlah keluarga PBI			344,108				
				15	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi		437	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang :	%		49.68
									Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan		695.56%	
Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan		14										
438	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	%					0.49					
	Jumlah penetapan tarif		2									
							DISHUB					

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB			
					Elemen Data	Capaian Kinerja				
			Jumlah proyek AKDP, angkutan perkotaan dan perdesaan		408					
			Terlaksananya pelayanan uji berkala	%		87.29				
			439 Jumlah kendaraan yg diuji per tahun		245,431					
			Jumlah kendaraan wajib uji		281,181					
			Kinerja lalu lintas provinsi	440	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untu jaringan jalan provinsi :	%			0.00	
		Jumlah pemasangan perlengkapan jalan prov,kab/kota				-				
		target kebutuhan perlengkapan jalan prov, kab/kota				1,242				
		16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	441	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo :		%		100.00
						Jumlah PD yg saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yg diamankan yg disediakan oleh Diskominfo			51	
						Jumlah PD			51	
442	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo :				%		100.00			
	Jumlah PD yg menggunakan akses internet yg berkualitas yg disediakan oleh diskominfo					51				
	Jumlah PD					51				
							DISKOMINFOTIK			

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			443 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada/tidak	ada	ada	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	444 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara :	%		tdi	
			Jumlah kegiatan PD dan Pelayanan Publik pada Pemda yg diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai PM Koimfon no 5/2015		0		
			Jumlah kegiatan PD dan pelayanan publik pada Pemda		0		
			445 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%		100.00	
			Jumlah PD yg memiliki portal dan situs web yg sesuai standar		51		
			Jumlah PD		51		
			446 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan :	%		100.00	
			Jumlah PD yg meninplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yg ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		51		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			Jumlah PD		51		
			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik :	%		100.00	
		447	Layanan SPBE (layanan publik dan adm. Pemerintahan) yg tercantum dalam dokumen proses bisnis yg telah diimplentasikan secara elektronik		18		
			Jumlah layanan		18		
			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik :	%		100.00	
		448	Layanan SPBE (layanan publik dan adm. Pemerintahan) yg tercantum dalam dokumen proses bisnis yg memanfaatkan sertifikat elektronik		18		
			jumlah layanan		18		
			Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan :	%		100.00	
		449	Jumlah sistem elektronik yg terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		974		
			Jumlah sistem elektronik		974		
			Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah :	%		100.00	
		450	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yg terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		18		
			Jumlah layanan publik dan layanan administrasi		18		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
451			Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah :	%		74.51	
			Jumlah PD yg menggunakan layanan pusat data pemerintah		38		
			Jumlah PD		51		
452			Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah :	%		74.51	
			Jumlah PD yg menyimpan data di pusat data pemda		38		
			Jumlah PD		51		
453			Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) :	%		49.02	
			Jumlah PD yg memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya		25		
			Jumlah PD		51		
454			Persentase data yang dapat berbagi pakai	%		tdi	
			Jumlah data yg dapat berbagi pakai		2620		
			jumlah data yg dimiliki Pemda		0		
455			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%		39.22	
			Jumlah PD yg mengimplemntasi inovasi yg mendukung smart city		20		
			Jumlah PD		51		
456			Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo :	%		tdi	
			Jumlah ANS pengelola TIK yg tersertifikat kompetensi di bawah pengelolaan Dsikominfo		15		
			Jumlah ASN pengelola TIK		0		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government :				
			457 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/Peta rencana strategi	Ada/tidak	Tidak	tidak	
			2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	<u>Ada/tidak</u>	Tidak	tidak	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	458 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi :	%		100.00	
			Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemda yg telah menyebarkan informasi dan kebijkana Pemerintah		12		
			Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunitas Pemda		12		
			459 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) :	%		100.00	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah dan Pemda sesuai strategi komunikasi		3187		
			Jumlah konten informai terkait program dan kebijakan Pemerintah dan Pemda		3187		
			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan :	%		100.00	
		460	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yg dilaksanakan sesuai dengan Strakom dan SOP		4867		
			Jumlah diseminasi layanan informasi publik		4867		
			Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi :	%		0.00	
		461	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yg dilaporkan		0		
			jumlah usaha simpan pinjam koperasi yg belum mempunyai izin usaha simapn pinjam		681		
		462	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%		5.78	
			Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yg dilaporkan		90		
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas					

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjem pada tahun yg dilaporkan		1558		
		463	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%		8.99	
			Jumlah koperasi yg diperiksa dan diawasi		140		
			Jumlah koperasi yg ada		1558		
		464	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%		0.00	
			jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yg dinilai kesehatannya		0		
			jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yg ada		1558		
		465	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%		8.02	
			Jumlah koperasi yg mengikuti pendidikan dan pelatihan		125		
			Jumlah koperasi yg ada		1558		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%		0.00		
			466	Jumlah anggota koperasi yg mengikuti pelatihan perkoperasian		0		
				Jumlah anggota koperasi yg ada		1558		
			467	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%			0.71
				Jumlah koerasi yg telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan		11		
				Jumlah koperasi yg ada		1558		
			468	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi :	%			8.54
				Jumlah koperasi yg telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya		133		
				Jumlah koperasi yg ada		1558		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
		469	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%		0.00	
			Jumlah koperasi yg diberikan dukungan fasilitas pembiayaan		0		
			Jumlah koperasi yg ada		1558		
		470	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%		14.03	
			Jumlah koperasi yg diberikan dukungan fasilitas pemasaran		1698		
			Jumlah koperasi yg ada		12100		
		471	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%		0.56	
			Jumlah koperasi yg diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha		68		
			Jumlah koperasi yg ada		12100		
472	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%		1.24			

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Jumlah koperasi yg diberikan dukungan fasilitas kemitraan		150			
			Jumlah koperasi yg ada		12100			
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	%		9.58		
			473	Jumlah pertumbuhan wirasuhasa baru		1020		
				Jumlah wirausaha yg ada		10644		
			474	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%		19.57	
				Jumlah usaha kecil yg diinput ke dalam sistem data online (ODS)		1980		
				Jumlah usaha yg kecil yg ada		10120		
			475	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	%		51.02	
				Jumlah usaha kecil yg bermitra		6173		
				Jumlah usaha kecil yg ada		12100		
			476	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%		35.16	
				Jumlah usaha kecil yg diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi		4254		

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
				Jumlah usaha kecil yg belum memiliki standar dan sertifikasi produk		12100		
				Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%		16.00	
			477	Jumlah usaha kecil yg diberikan dukungan fasilitas pemasaran		115,558		
				Jumlah usaha kecil yg belum mendapat dukungan pemasaran		722,272		
				Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%		0.06	
			478	Jumlah usaha kecil yg diberikan dukungan fasilitas pelatihan		432		
				Jumlah usaha kecil yg ada		722,272		
				Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%		1.88	
			479	Jumlah usaha kecil yg diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha		13,578		
				Jumlah usaha kecil yg ada		722,272		
				Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%		0.06	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	480	Jumlah pertumbuhan wirasuhasa baru		436		
				Jumlah wirausaha yg ada		722,272		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%		3.76		
			481	Jumlah usaha mikro yg diinput ke dalam sistem data online (ODS)		27,190		
				Jumlah usaha yg mikro yg ada		722,272		
			482	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%			13.49
				Jumlah usaha mikro yg bermitra		97,443		
				Jumlah usaha mikrol yg ada		722,272		
			483	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%			10.87
				Jumlah usaha mikro yg diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi		78,533		
				Jumlah usaha mikro yg belum memiliki standar dan sertifikasi produk		722,272		
			484	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%			tdi
				Jumlah usaha mikro yg diberikan dukungan fasilitas pemasaran		0		
				Jumlah usaha mikro yg belum mendapat dukungan pemasaran		0		
485	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%		tdi				

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
						Elemen Data	Capaian Kinerja					
				Jumlah usaha mikro yg diberikan dukungan fasilitas pelatihan		0						
				Jumlah usaha mikro yg ada		0						
			486	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%		tdi					
				Jumlah usaha mikro yg diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha		0						
				Jumlah usaha mikro yg ada		0						
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi, Kab/Kota	487	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	JUMLAH	0	0	DPM PTSP				
				Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah yang bisa diberikan kepada investor								
				488					Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	JUMLAH	0	0
				489					Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	JUMLAH	0	0
				490					Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	JUMLAH	3	3
				491					Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal	JUMLAH	2	2
				492					Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	JUMLAH	16	16
				493					Jumlah Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	JUMLAH	15	15
				494					Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	JUMLAH	0	0
495	Jumlah Laporan realisasi penanaman modal	JUMLAH	4	4								

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
			496	Jumlah Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	JUMLAH	6	6	
			497	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN Jumlah perusahaan yg mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	JUMLAH	12197	12197	
			498	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi :	%	100	100.00	
				Jumlah permintaan data dan informasi yg terpenuhi		15		
				Jumlah permintaan data dan informasi yg diterima		15		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	499	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	JUMLAH		tdi	DINAS PPUKM
			500	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	JUMLAH		tdi	
			501	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	JUMLAH	10776	10776	DISORDA
		502	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	JUMLAH	30	30		
		503	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	JUMLAH	391	391		
		504	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	JUMLAH	475	475		
		505	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	JUMLAH	6	6		
		506	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	JUMLAH	117500	117500		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			507	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	JUMLAH	11	11	
			508	Tersedianya buku profil daerah	<u>Ada/tidak</u>	Ada	ada	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	509	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	JUMLAH	12	12	DISKOMINFOTIK
			510	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	JUMLAH	1	1	
			511	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	JUMLAH	10	10	
			512	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	JUMLAH		tdi	
			513	Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik sektoral	%		100.00	
				Jumlah metada kegiatan statistik sektoral		16		
				Jumlah kegiatan statistik sektoral		16		
			514	Persentase kelengkapan metadada indikator sektoral	%		100.00	
				Jumlah metada indikator statistik sektoral		16		
				Jumlah indikator statistik sektoral		16		
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	515	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan :	%		0.00	
				Jumlah kegiatan strategis termamankan		0		
				Jumlah kegiatan strategis yg ada		0		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			516	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah :	%		94.97	
				Jumlah SE yg menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian		925		
				Jumlah SE yg ada		974		
			517	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah :	%		25.00	
				Jumlah SE atau aset informasi yg telah diaudit dengan resiko kategori rendah		1		
				Jumlah Se yg ada		4		
			518	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi :	%		100.00	
				Jumlah titik teramankan		4057		
				Jumlah titik pada PHKS		4057		
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	519	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	JUMLAH	10	10	DINAS KEBUDAYAAN
			520	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	JUMLAH	10	10	
			521	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	JUMLAH	10	10	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			522 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	JUMLAH	425	425	
			523 Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Rumus : Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	JUMLAH	4	4	
			524 Jumlah Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	JUMLAH	44	44	
			525 Jumlah Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	JUMLAH	0	0	
			526 Jumlah Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi);	JUMLAH	1	1	
			527 Jumlah Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	JUMLAH	0	0	
			528 Jumlah Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	JUMLAH	75	75	
			529 Jumlah Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	JUMLAH	2	2	
			530 Jumlah Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	JUMLAH	2	2	
			531 Jumlah Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	JUMLAH	75	75	
			532 Jumlah Pembentukan tim pendaftaran cagar	JUMLAH	2	2	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					Elemen Data	Capaian Kinerja			
			budaya						
			533 Jumlah Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	JUMLAH	6	6			
			534 Jumlah Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	JUMLAH	0	0			
			535 Jumlah Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	JUMLAH	0	0			
			536 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	JUMLAH	8	8			
			537 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	JUMLAH	0	0			
			538 Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	JUMLAH	0	0			
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	539 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk :	%		29.40	DISPUSIP		
								Koleksi perpustakaan yg tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya	3,175,623
								Jumlah penduduk di wilayahnya	10,800,894
			540 Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat :	%		8.96			
								Jumlah kunjungan pemustaka yg memanfaatkan perpustakaan (online/onsite)	967,241
								Jumlah penduduk di wilayahnya	10,800,894
			541 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk :	%		0.01			
								Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	563
								Jumlah penduduk di wilayahnya	10,800,894
			542 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan :	%		4.40			

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
				Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		253		
				jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yg terdapat di wilayahnya		5,755		
			543	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	JUMLAH	45	45	
			544	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	JUMLAH	4,961	4961	
			545	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	JUMLAH	29,404	29404	
			546	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	JUMLAH	6	6	
			547	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	JUMLAH	4,519	4519	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	548	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	JUMLAH	1,800	1800	
			549	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	JUMLAH	-	0	
			550	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	JUMLAH	-	0	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	551	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip :	%		48.84	
				Jumlah arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip		21		
			Jumlah seluruh arsip aktif		43			
			552	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip :	%		58.14	
				Jumlah arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip		25		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			Jumlah seluruh arsip inaktif		43		
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik :	%		2.33	
		553	Jumlah arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik		1		
			jumlah seluruh arsip statis		43		
			Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN :	%		1.03	
		554	Jumlah arsip yg telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		155		
			Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan		15,074		
			555	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	<u>Ada/tidak</u>	Ada	ada
			556	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	<u>Ada/tidak</u>	Tidak	tidak
			557	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	<u>Ada/tidak</u>	Ada	ada
			558	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	<u>Ada/tidak</u>	Tidak	tidak
			559	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	<u>Ada/tidak</u>	Tidak	tidak
			560	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	<u>Ada/tidak</u>	Tidak	tidak
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Elemen Data	Capaian Kinerja		
25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	561	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	JUMLAH	1	1	DKPKP	
			562	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	JUMLAH	238	238		
			563	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional. Standar Operasional antara lain (1. Telah operasional 2. Penetapan kelas oleh MKP 3. Memiliki kelembagaan 4. Memiliki syahbandar di pelabuhan perikanan atau petugas kesyahbandaran 5. Menyusun WKOPP 6. Menerapkan CPIB) :	%	33.33	33.33		
					Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional		2		
					Jumlah seluruh pelabuhan perikanan		6		
			564	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	JUMLAH	1396	1396		
			565	Jumlah kapal yang terdaftar	JUMLAH	1396	1396		
		566	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	JUMLAH	0	0			
		567	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku :		100.00		
					Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		699.75		
					Luas Wilayah laut dan pesisir yang dimiliki		699.75		
				568	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola :	%			100.00

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara efektif		6		
			Keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki		6		
			569 Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	JUMLAH	732	732	
			570 Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya	JUMLAH	0	0	
			571 Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	JUMLAH	158	158	
			572 Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	JUMLAH	70.77	70.77	
			573 Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	JUMLAH	15	15	
			574 Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	JUMLAH	1	1	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	575 Jumlah entitas pengelolaan destinasi	JUMLAH	3	3	DISPAREKRAF
			576 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	JUMLAH	43	43	
			577 Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	JUMLAH	1,335,536,809,000	1.33554E+12	
			578 Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	JUMLAH	2,568	2568	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			579	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	JUMLAH	11,738	11738	
			580	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	JUMLAH	2.22	2.22	
			581	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	JUMLAH	4.08	4.08	
			582	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	JUMLAH	421,247	421247	
			583	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	JUMLAH	7,141,420	7141420	
			584	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	JUMLAH	0	0	
			585	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	JUMLAH	0	0	
			586	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	JUMLAH	0	0	
			587	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi :	%		4.94	
				Jumlah Tenaga Kerja pariwisata tersertifikasi		9,325		
				Jumlah Tenaga Kerja pariwisata		188,938		
			588	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan :	%		78.12	
				Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan		9,325		
				Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan		11,937		
			589	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	JUMLAH	41	41	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	590	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	JUMLAH	45 Jenis	45 Jenis	
			591	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	JUMLAH	77 Sertifikat	77 Sertifikat	DKPKP
			592	Jumlah Dokumen pengawasan benih yang	JUMLAH	12 Laporan	12 Laporan	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			beredar				
			Prasarana pertanian yang digunakan :	%		100.00	
		593	Jumlah prasarana yang aktif digunakan		6		
			Jumlah Prasaran yang dibangun		6		
		594	Jumlah Pengendalian penganggulungan serangan organisme pengganggu pertanian	JUMLAH	25.231 pohon	25.231 pohon	
		595	Jumlah Luas areal pengendalian dan penganggulungan bencana	JUMLAH	143.310 m ²	143.310 m2	
		596	Jumlah Penerbitan izin usaha pertanian	JUMLAH	tidak ada	tidak ada	
			Persentase sarana pertanian yang digunakan :	%		100.00	
		597	Jumlah sarana yang aktif digunakan		55		
			Jumlah sarana yang dibangun		55		
			Persentase fasilitasi penganggulungan bencana	%		0.00	
		598	Jumlah area yang dapat ditanggulangi		0		
			Luas area terkena bencana		0		
			Persentase jumlah usulan usaha pertanian :	%	100%	100.00	
		599	Jumlah usulan yang difasilitasi		7374		
			Jumlah usulan usaha pertanian		7374		
			Dokumen penataan hutan wilayah KPH :	%		tdi	
		600	Jumlah Dokumen penataan hutan wilayah KPH		0		
			Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi		0		
			Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang :	%		tdi	
		601	Jumlah Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disahkan		0		
			Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi		0		
		602	Dokumen rencana pengelolaan hutan jjangka pendek :	%		tdi	
28	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial					DISHUT

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			Jumlah Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disahkan		0		
			Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi		0		
		603	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	JUMLAH		tdi	
		604	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi :	%		0.00	
			tidak ada kebakaran hutan lindung dan hutan produksi				
			Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi		0		
			Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi		0		
		605	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan) :	%		0.00	
			tdk ada hutan lindung atau ilegal logging				
			Luas Hutan yang terganggu		0		
			Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi		0		
		606	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif :	%		0.00	
			tdk ada hasil hutan kayu				
			Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang aktif		0		
			Jumlah izin yang ada		0		
		607	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	ada/tidak	tidak	tidak	
		608	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	JUMLAH	0	0	
		609	Pemulihan ekosistem pada Tahura tdk ada tahura	JUMLAH	0	0	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			610	Menurunnya gangguan kawasan Tahura tidak ada tahura	JUMLAH	0	0	
			611	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan :	%		13.64	
				Jumlah penyuluh kehutanan		6		
				Jumlah Kecamatan		44		
			612	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan :	%		0.00	
				Jumlah sarpras yang ada		0		
				Jumlah penyuluh		6		
			613	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan :	%		0.00	
				Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan		0		
				Rencan atau target KTH yang akan diberikan diklat		0		
			614	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	JUMLAH	0	0	
			615	Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi :	%		tdi	
				Jumlah DAS yang ditetapkan rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi		0		
				Jumlah Total DAS dalam 1 Provinsi		0		
			616	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	JUMLAH		tdi	
		Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	617	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	ada/tidak		tdi	
			618	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	JUMLAH		tdi	
			619	Pemulihan ekosistem pada Tahura	JUMLAH		tdi	
			620	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	JUMLAH		tdi	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
29	ESDM	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	621	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	ada/tidak		tdi	DISNAKERTRANS EN
			622	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	ada/tidak		tdi	
			623	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	ada/tidak		tdi	
			624	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	ada/tidak		tdi	
			625	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	ada/tidak		tdi	
			626	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	ada/tidak		tdi	
			627	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	ada/tidak		tdi	
			628	Perda/Pergub terkait IUJP	ada/tidak		tdi	
			629	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	ada/tidak		tdi	
			630	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	JUMLAH		tdi	
			631	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	JUMLAH		tdi	
			632	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	JUMLAH		tdi	
			633	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	ada/tidak		tdi	
			634	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	ada/tidak		tdi	
			635	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	ada/tidak		tdi	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			636	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	ada/tidak		tdi	
			637	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	JUMLAH		tdi	
			638	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	JUMLAH		tdi	
		Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yg memiliki ijin	639	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	JUMLAH		tdi	
30	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	640	Persentase jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang :	%		100.00	PPUKM
				Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang		671		
				Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang		671		
			641	Persentase jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk :	%		0.00	
				Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk		0		
				Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang		671		
			642	Persentase jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor :	%		tdi	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor		0			
			Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor		0			
			Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru :	%		tdi		
		643	Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir baru		34			
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor		0			
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	644	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	JUMLAH	140		140
			645	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	JUMLAH	260		260
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	646	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	JUMLAH			tdi
			647	Indeks Kinerja BPSMB Indeks Kinerja BPSMB = Indeks SDM + Indeks Contoh Uji + Indeks Akreditasi Indeks SDM = Indeks yang menggambarkan jumlah penguji mutu barang dalam BPSMB	JUMLAH			tdi
		Tertib Usaha	648	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan :	%			32.94
				Jumlah SIUP MB TBB yang terbit kurang dari sama dengan 5 hari kerja		56		
				Jumlah permohonan SIUP MB TBB		170		
			649	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan :	%		0.00	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Jumlah rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang terbit kurang dari sama dengan 5 hari kerja		0			
			Jumlah permohonan rekomendasi SIUP MB bagi distributor		6			
		650	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan :	%		tdi		
			Jumlah SIUP bahan berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan kurang dari sama dengan 5 hari kerja		0			
			Jumlah Permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer		0			
		651	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat :	%		55.56		
			Jumlah SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat yang terbit kurang dari sama dengan 5 hari kerja		5			
			jumlah permohonan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat		9			
		652	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu :	%		tdi		
			Jumlah SKA yang terbit kurang dari sama dengan 1 hari kerja (1x24 jam)		0			
			jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima lengkap dan benar		0			
		Persentase kinerja realisasi pupuk	653	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi :	%		tdi	DKPKP
				Jumlah pupuk yang disalurkan		0		
				Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) dikalikan RDKK (Rencana Definitif		0		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			Kebutuhan Kelompok)				
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	654 Jumlah barang beredar yang diawasi oleh Dinas yang menangani urusan perdagangan	JUMLAH	17	17	PPUKM
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	656 Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi (a. Tersedianya bangunan pusat distribusi, b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi, c. Beroperasinya pusat industri, d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani) $K = (a+b+c+d) \times 100\%$	%	100	100	
			657 Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	8.9434877 24	8.94348772 4	
			658 Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	%	100	100	
		Persentase pelaku usaha yg memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	659 Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan	%		tdi	
				Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan kurang dari sama dengan 5 hari kerja		0	
			Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		0		
			660 Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : b. Toko swalayan	%		tdi	
		Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan kurang dari sama dengan 5 hari kerja			0		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
			Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		0		
			Persentase penerbitan TDG :	%		tdi	
		661	Jumlah penerbitan TDG urang dari sama dengan 5 hari kerja		0		
			Jumlah permohonan penerbitan TDG		0		
			Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG :	%		tdi	
		662	Jumlah penerbitan TDG		0		
			Jumlah gudang yang ada		0		
			Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	%		tdi	
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri				
		663	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit kurang dari sama dengan 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar		0		
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri		0		
			Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	%		tdi	
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri				
		664	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit kurang dari sama dengan 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar		0		
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri		0		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	%		tdi		
			665	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit kurang dari sama dengan 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar		0		
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba luar negeri		0		
			666	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	%			tdi
				Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota		0		
				Jumlah Permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer		0		
			667	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu :	%			100.00
				Jumlah SKD yang terbit kurang dari sama dengan 1 hari kerja (1x24 jam)		294,444		
				jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima lengkap dan benar		294,444		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
			<p>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</p> $K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</p> <p>a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</p> <p>b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>	%	100	100		
			669	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	8.9434877 24	8.94348772 4	
		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yg berlaku	670	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%		85.94	
	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan				859,399			
	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang			1,000,000				
	671		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%		65.00		
			Jumlah sampel BDKT yang diawas dalam tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		13			
		Total sampel BDKT yang diawas dalam tahun berjalan		20				

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
31	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	672	<p>Persentase terselesainya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda Capaian target tahapan penyelesaian RPIP</p> <p>Tahapan :</p> <p>a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) c) Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (15%) e) Penetapan Perda RPIP (10%)</p> <p>Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIP</p>	%	50	50	PPUKM
			673	<p>Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan :</p> <p>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</p> <p>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</p>	%		0.00	
		674	<p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait</p>	<p>Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan :</p>	%		tdi	
				<p>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</p>		0		
				<p>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</p>		0		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen Data	Capaian Kinerja		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	675	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	%		tdi	
				Jumlah realisasi izin yang diterbitkan		0		
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		0		
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	676	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	%		63.79	
					Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas		1647	
					Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota		2582	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	678	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan :	%		0.00	
					Jumlah realisasi izin yang diterbitkan		0	
					Jumlah permohonan/pengajuan ijin yang masuk		219	

NO	Urusan	IKK OUTCOME		IKK OUTPUT	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Elemen Data	Capaian Kinerja		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	679	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan : J	%		tdi		
				Jumlah data perusahaan industri kecil dan menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SII Nas		0			
				Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota		0			

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja	
1	Pendidikan	1 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 – 18 Tahun dalam Pendidikan Menengah	Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK	„„„„„„„„.%	340,890	68.52	DISDIK
			Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 -18 Tahun di provinsi tersebut		497,481		
		2 Tingkat Partisipasi Warga Negara 4-18 th penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	Jumlah siswa 4 -18 th penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus	„„„„„„„„.%	5,490	100.00	
			Jumlah siswa 4 -18 th penyandang disabilitas di provinsi tersebut		5,490		
		3 Tingkat Partisipasi Warga Negara 5-6 Tahun dalam Pendidikan PAUD	Jumlah anak Usia 5-6 Tahun yg sduah tamat/sedang belajar PAUD	„„„„„„„„.%	86,212	22.65	
			Jumlah anak Usia 5-6 Tahun di provinsi tersebut		380,627		
		4 Tingkat Partisipasi Warga Negara 7-12 Tahun dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak Usia 7-12 Tahun yg sudah tamat/sedang belajar di Sekolah Dasar	„„„„„„„„.%	754,630	64.87	
			Jumlah anak Usia 7-12 Tahun di provinsi tersebut		1,163,327		
		5 Tingkat Partisipasi Warga Negara 13-15 Tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah anak Usia 13-15 Tahun yg sudah tamat/sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama	„„„„„„„„.%	302,843	55.51	
			Jumlah anak Usia 13-15 Tahun di provinsi tersebut		545,613		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja	
		6 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 – 18 yg belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak Usia 7 -18 Tahun yg belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yg sudah tamat atau sedang belajar pendidikan kesetaraan (Paket A & B)%	16,454	3.73	
			Jumlah anak Usia 7 -18 Tahun yg belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah pada provinsi bersangkutan		441,392		
2	Kesehatan	7 Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di provinsi, Kab/Kota	Per 1000	23,729	2.12	DINKES
			Jumlah Penduduk Provinsi		11,201,121		
		8 Presentase Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan Provinsi, Kab/Kota yang terakreditasi minimal Tingkat Utama%	167	86.53	
			Jumlah RS Provinsi		193		
		9 Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun%	60,466	100.00	
			Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama		60,466		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
		10	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yg terdampak dan berisiko pada situasi KLB	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar%	140,439	100.00	
			Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB		140,439			
		11	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan%	177,413	96.62	
				Jumlah ibu hamil di Provinsi, Kab/Kota		183,617		
		12	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan%	170,568	97.32	
				Jumlah ibu bersalin di Provinsi		175,271		
		13	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%	164,911	98.79	
				Jumlah bayi baru lahir di Provinsi		166,924		
		14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%	624,669	88.22	
				Jumlah balita di Provinsi		708,084		
		15	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%	957,282	59.16	
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di Provinsi		1,618,080		
		16	Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar%	2,746,144	38.59	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja	
			Jumlah orang usia 15-59 tahun di Provinsi		7,116,931		
		17	Cakupan orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ,,,,,,,,,.%	541,337	63.80	
				Jumlah orang usia 60 tahun ke atas di Provinsi	848,492		
		18	Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ,,,,,,,,,.%	1,096,618	41.04	
				Jumlah penderita hipertensi di Provinsi	2,671,915		
		19	Cakupan penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ,,,,,,,,,.%	233,918	86.08	
				Jumlah penderita DM di Provinsi	271,746		
		20	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ,,,,,,,,,.%	20,222	118.30	
				Jumlah penderita ODGJ di Provinsi	17,094		
		21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ,,,,,,,,,.%	23,430	100.00	
				Jumlah penderita TBC di Provinsi	23,430		
		22	Cakupan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ,,,,,,,,,.%	345,850	117.53	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Provinsi		294,263			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi,Kab/Kota (ha)	,,,,,,,,,%	3,606.2872	25.33	SDA
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Provinsi,Kab/Kota (ha)		14,238.2996			
		24	Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi,Kab/kota (ha)	,,,,,,,,,%	20,569	50.80	
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Provinsi,Kab/kota (ha)		40,489			
		25	Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi,Kab/Kotayang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting	,,,,,,,,,%	1	100.00	
				Luas daerah irigasi kewenangan provinsi,Kab/Kota		1		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja			
		26	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota%	6,848,161	64.33		
			Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.		10,645,500				
		27	Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional%	2,018	91.73		
				Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional		2,200			
		28	Jalan provinsi,Kab/Kota dalam kondisi baik	Panjang jalan Provinsi, Kab/Kota dalam kondisi baik%	5,875,263	91.34		DBM
				Panjang seluruh jalan Provinsi,Kab/kota		6,432,473			
		29	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi, Kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi, Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli%	1554.00	77.05		SDA, DBM

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
			Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi, Kab/Kota		2,017			
		30	Persentase jumlah rumah Tangga Pengguna yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh DKI Jakarta	Jumlah kumulatif masy. rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di DKI Jakarta%	tdi	SDA	
			Jumlah seluruh rumah tangga di DKI Jakarta					
		31	Persentase jumlah Rumah Tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yg lumpur tinjanya diolah di PLT + jumlah rumah yg memiliki sambungan rumah dan air limbahnya dioalh di IPALD%	tdi	SDA	
			Jumlah seluruh rumah tangga di DKI Jakarta					
		32	Kepatuhan IMB	Jumlah pemanfaatan IMB yg sesuai peruntukannya%	tdi	CITATA	
				Jumlah IMB yg berlaku				
		33	Rasio proyek yg menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yg menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi		tdi	CITATA	
				Jumlah total proyek yg menjadi kewenangan pengawasan				
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan	34	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana provinsi, kab/kota yang ditangani pada tahun n%	1	100.00	DINAS PERUMAHAN

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					Elemen data	Capaian Kinerja		
	Urusan Wajib Permukiman		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n		1			
		35	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	,,,,,,,,, %	64		100.00
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		64		
		36	Persentasi Luas kawasan kumuh 0 – 15 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh 0 – 15 Ha yang ditangani	,,,,,,,,, %	2,468		23.24
				Luas kawasan kumuh 0 -15 Ha		10,621		
		37	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	,,,,,,,,, %	0		tdi
				Jumlah satuan perumahan		0		
		38	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	,,,,,,,,, %	0		0.00
				Jumlah seluruh rumah diwilayah pemda ybs		2720051		
		5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	39	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan di Provinsi, Kab/kota	,,,,,,,,, %		445,174
Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk di Provinsi , Kab/kota					464,494			

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
		40	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	,,,,,,,,,.%	1	100.00	BPBD
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		1			
		41	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun	,,,,,,,,,.%	29	100.00	
				Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun		29		
		42	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kab/kota yg terfasilitasi dalam penanganan pra bencana	,,,,,,,,,.%	6	100.00	
				Jumlah kab/kota di wil provinsi		6		
		43	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah Kab/Kota yg terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana	,,,,,,,,,.%	6	100.00	
				Jumlah kab/kota di wil provinsi		6		
		44	Jumlah warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana		2175351	2175351	
		45	Jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2175351	2175351	
		46	Jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yg memperoleh layanan dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		95249	95249	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
		47	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di wilayah dalam tgkt waktu tanggap oleh Damkar + relawan damkar yg berada di bawah binaan Dinas		1,495	99.34	DAMKAR
				Jumlah kejadian kebakaran di wilayah		1,505		
		48	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran		7	7	
6	Sosial	49	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	,,,,,,,,,%	3,219	100.00	DINSOS
				Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti		3,219		
		50	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	,,,,,,,,,%	2,649	100.00	
				Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti		2,649		
		51	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	,,,,,,,,,%	1,531	100.00	
				Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti		1,531		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
		52	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	,,,,,,,,,.%	2,065	100.00	
			Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti		2,065			
		53	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi, Kab/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dlm satu tahun anggaran	,,,,,,,,,.%	321,586	100.00	
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi, Kab/Kota		321,586		
		54	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	,,,,,,,,,.%	83,218	94.76	
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis		87,817		
	TENAGA KERJA	55	Persentase Kab/Kota yg menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah Kab/Kota yg menyusun rencana tenaga kerja	,,,,,,,,,.%	6	100.00	DISNAKER

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja	
			Jumlah Kab/Kota		6		
		56 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yg memiliki sertifikat kompetensi	,,,,,,,,,.%	426,377	9.15	
			Jumlah tenaga kerja		4659251		
		57 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	Rp/Orang	1,729,790,000,000,000	371259243 17.02	
			Jumlah tenaga kerja		4,659,251		
		58 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	,,,,,,,,,.%	113,619	410.13	
			Jumlah Perusahaan		27,703		
		59 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	,,,,,,,,,.%	17,281	86.04	
			Jumlah pencaker yang terdaftar		20,085		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Σ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n%	6.743	8.23	DPPAPP (DUKCAPIL UNTUK DATA PENDUDUK)
			Σ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n		81.967			
		61	Persentase kegiatan yg dilaksanakan yg mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yg dilaksanakan yg mengacu ke RTKD%	224	100.00	
				Jumlah kegiatan keseluruhan yg dilaksanakan di Kab/Kota		224		
		62	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD%	5,884,335,342,994	25.47	
				Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi		23,101,344,268,257		
		63	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi	Per 10.000	494	0.01	
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		3,416,226		
64	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Per 100.000	453	8.14			
		Jumlah penduduk perempuan		5,564,545				
65	Persentase anak korban kekerasan yg ditangani instansi terkait	Jumlah anak (usia di bwh 18 thn) korban kekerasan%	494	0.01			
		Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		3,416,226				

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
9	Pangan	66	Persentase cadangan pangan	Jumlah Cadangan Pangan Provinsi, Kab/kota	„„„„„„„„.%	9,911	0.79	DKPKP
				Jumlah kebutuhan pangan provinsi, Kab/kota		1,255,101		
10	Pertanahan	67	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	„„„„„„„„.%	1,610,142	100.00	DPM PTSP
				Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi		1,610,142		
		68	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu	„„„„„„„„.%	95,467	47.59	CITATA/DBM/SDA/DINAS KEHUTANAN/DINAS PERUMAHAN
				Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum		200,603		
		69	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota.	Luas pemanfaatan yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya diatas izin lokasi lintas kab/ kota	„„„„„„„„.%	1,610,142	100.00	DPM PTSP
				Luas izin lokasi yang diterbitkan		1,610,142		
		70	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	„„„„„„„„.%	0	tdi	CITATA
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		0		
		71	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yg telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya di atas izin lokasi	„„„„„„„„.%	0	tdi	
				Luas izin lokasi yang diterbitkan		0		
72	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yg siap didistribusikan yg berasal dari Tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek Landreform dgn luasan yg diterima lebih besar/sama dengan 0,5 ha	„„„„„„„„.%	0	tdi			
		Jumlah penerima tanah obyek Landreform		0				

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
11	Lingkungan Hidup	73	Tersedianya Tanah untuk masyarakat	Luas tanah yg telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	,,,,,,,,,.%	0	tdi	DLH
			Luas izin membuka tanah yg diberikan		0			
		74	Penanganan sengketa tanah garapan yg dilakukan melalui mediasi	jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	,,,,,,,,,.%	0	tdi	
				jumlah pengaduan		0		
		75	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		51.94	51.94	
				Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)		41.19		
				Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)		66.69		
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)		25.99		
76	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi	,,,,,,,,,.%	191	17.11			
		Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		1,116				
77	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Provinsi	Total Vol sampah yang dapat ditangani	,,,,,,,,,.%	2,709,914	88.47			
		Total vol timbunan sampah Regional/Provinsi		3,063,185				

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja					
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	78	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	,,,,,,,,,%	2	100.00	DUKCAPIL			
			2 kali			2					
		79	Pemanfaatn data kependudukan	Perangkat Daerah yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	,,,,,,,,,%	21	50.00				
				Jumlah seluruh PD		42					
		80	Perekaman KTP el	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	,,,,,,,,,%	8,097,928	99.85				
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		8,110,465					
		81	Persentase Penduduk usia 0 - 17 tahun Yang Mempunyai KIA	Jumlah penduduk usia 0 – 17 Tahun tahun yang memiliki KIA	,,,,,,,,,%	2,601,091	86.98				
				Jumlah penduduk usia 0 – 17 tahun		2,990,536					
		82	Kepemilikan akte kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun yang memiliki akte kelahiran	,,,,,,,,,%	3,205,358	96.40				
				Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun		3,324,983					
		13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	,,,,,,,,,%		1	100.00	DPPAPP
					Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)		1				

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
		84	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun%	1	100.00	
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)		1		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	85	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR $= 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$		2.45	2.45	DPPAPP
		86	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern%	1,535,885	59.51	
				Jumlah Pasangan Usia Subur		2,580,813		
		87	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani%	284,798	11.04	
Jumlah Pasangan Usia Subur				2,580,813				
15	Perhubungan	88	Rasio konektivitas Provinsi, Kab/Kota	Rasio Konektivitas = (IK1 x bobot angk Jalan) + (IK2 x bobo angk sungai, danau dan penyebrangan)		9841.670	9841.67	DISHUB
		89	Kinerja lalu lintas provinsi, Kab/Kota	V/C Ratio di Jalan Provinsi, Kab/Kota		0.64	0.64	
16	Komunikasi dan Informatika	90	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo%	42	100.00	DISKOMINFOTIK
				Jumlah PD		42		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
		91	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi%	226	81.00	
			Jumlah Layanan Publik		279			
		92	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi%	10,181,321	90.93	
			Jumlah penduduk		11,196,633			
17	Koperasi dan UKM	93	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset%	1,370	36.50	PPUKM
			Jumlah seluruh koperasi		3,753			
		94	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha%	2,680	22.15	
			Jumlah usaha kecil keseluruhan		12,100			
		95	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha%	140,050	19.39	
			Jumlah usaha mikro keseluruhan		722,272			
18	Penanaman Modal	96	Persentase peningkatan investasi di provinsi, Kab/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi%	(14,473,551, 757,195)	- 13.6467359 6	DPMPTSP
			Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi		106,058,707, 397,869			

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
19	Kepemudaan dan Olahraga	97	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi	,,,,,,,,,%	6,726	0.26	PPUKM
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi		2,544,258			
		98	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi social kemasyarakatan di provinsi	,,,,,,,,,%	30,398	1.20	DISORDA
			jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi		2,528,894			
99	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	65	65.00			
20	Statistik	100	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	,,,,,,,,,%	48	94.12	DISKOMINFOTIK
			Jumlah PD		51			
		101	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	,,,,,,,,,%	48	94.12	
			Jumlah PD		51			
21	Persandian	102	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi		591	591.00	DISKOMINFOTIK
			Jumlah area penilaian		5			
22	Kebudayaan	103	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	,,,,,,,,,%	247	100.00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja	
					247		
23	Perpustakaan	104	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yg diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		60.84	60.84	DISPUSIP
		105	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18.91	18.91	
24	Kearsipan	106	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j)/4$	30.31%	0.30	
		107	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	0.33	0.33	
Urusan Pilihan							
25	Kelautan Perikanan	108	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	146571.49	DKPKP
		109	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	$X = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{C_i}{S_i} \cdot 100\% \right)}{n}$%	70.77	

NO	Urusan Urusan Wajib	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB				
					Elemen data	Capaian Kinerja					
26	Pariwisata	110	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	,,,,,,,,,%	-2,045,051	-82.92	DISPAREKRAF			
			Jumlah wisatawan tahun n-1		2,466,298						
		111	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	%	-33,414,274	-82.39				
			Jumlah wisatawan tahun n-1		40,555,694						
		112	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	,,,,,,,,,%	27,151	38.73				
				Jumlah kamar yang tersedia		70,102					
		113	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata	,,,,,,,,,%	116	4.19				
				Jumlah total PDRB		2,772					
		114	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah kontribusi dari sektor pariwisata	,,,,,,,,,%	2,911,548,602,821	7.78				
				Jumlah PAD tahun n		37,434,537,876,827					
		27	Pertanian	115	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	,,,,,,,,,%		4,511.00	493%	DKPKP
					Luas Panen		915.00				
				116	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	,,,,,,,,,%		0	0.00	
						Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular			2		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
28	Kehutanan	117	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal	,,,,,,,,,.%	17	100.00	DINAS KEHUTANAN
			Jumlah total usulan KTH yang terintegrasi		17			
		118	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak (ha)	,,,,,,,,,.%	1	100.00	
				Jumlah hutan keseluruhan (ha)		1.00		
		119	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)	,,,,,,,,,.%	186	77.45	
Luas Lahan Kritis di provinsi (ha)				240.27				
29	ESDM	120	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	,,,,,,,,,.%	1	100.00	DISNAKER
				Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi		1.00		
		121	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Jumlah desa yang teraliri listrik	,,,,,,,,,.%	167	100.00	
				Jumlah desa		167		
		122	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yg memiliki ijin	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yg memiliki ijin	,,,,,,,,,.%	1	100.00	
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi		1		
30	Perdagangan	123	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Jumlah ekspor non migas tahun berjalan-nilai ekspor non migas tahun sebelumnya	,,,,,,,,,.%	- 616,380,000 .00	-5.89	PPUKM

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
			nilai ekspor non migas tahun sebelumnya		10,468,240,000.00			
		124	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yg ditangani dan diselesaikan Dinas dan BPSK sesuai dengan ketentuan yg berlaku dalam tahun berjalan	,,,,,,,,,.%	140	100.00	
				Jumlah pengaduan konsumen yg diterima dalam tahun berjalan		140		
		125	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan	,,,,,,,,,.%	5,695	99.95	DKPKP
				Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun		5,698		
		126	Tertib Usaha	Jumlah pelaku usaha yg memiliki SIUP MB TBB	,,,,,,,,,.%	213	100%	PPUKM
				Jumlah pelaku usaha MB TBB		213		
		127	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	,,,,,,,,,.%	28	0.00	DKPKP
				RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)		647,226		
		128	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	,,,,,,,,,.%	153	50.00	PPUKM

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
			Jumlah barang beredar yang diawasi		306			
		129	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	$KVpt = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} S_n}{P}$%	0.107	0.11	
		130	Persentase pelaku usaha yg memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	Jumlah pelaku usaha yg telah memiliki izin sesuai ketentuan%	0	0.00	PPUKM / DPM PTSP
				Jumlah pelaku usaha		127		
		131	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yg berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yg berlaku pada tahun berjalan%	859,399	85.94	PPUKM
				Jumlah potensi UTTP yg wajib ditera dan tera ulang di wilayah		1,000,000		
31	Perindustrian	132	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi, Kab/Kota	(Jumlah Industri besar tahun n - Jumlah industri besar tahun n-1)%	407	32.82	PPUKM
				Jumlah industri besar tahun n-1		1,240		
		133	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah Jenis Industri Prioritas Provinsi%	5	50.00	
				Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional		10		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja		
		134	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin IUI Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,%	0	0.00	PPUKM / DPM PTSP
			Jumlah izin IUI Besaryang dikeluarkan		0		Tidak ada Izin IUI besar yg terbit selama tahun 2020	
		135	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin IPI Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,%	0	0.00	
				Jumlah izin IPI Besar yang dikeluarkan		0		Tidak ada Izin IPI besar yg terbit selama tahun 2020
		136	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,%	0	0.00	
				Jumlah izin yang dikeluarkan		0		Tidak ada Izin IUKI dan IPKI yg terbit selama tahun 2020
		137	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	ketersediaan Informasi industri secara lengkap dan terkini	Jumlah	1	1.00	PPUKM
		138	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin IUI Kecil dan Industri Menengah yg dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,%	0	0.00	PPUKM / DPM PTSP
				Jumlah izin IUI Kecil dan Industri menengah yang dikeluarkan		3		
		139	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan	Jumlah izin IPI kecil dan Industri Menengah yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil	,,,,,,,,,%	0	tdi	

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Urusan Wajib				Elemen data	Capaian Kinerja	
		Industri (IPUI) kecil Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	pemantauan				
			Jumlah izin IPUI kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan		0		Tidak ada Izin IPUI Kecil dan Industri Menengah yg terbit selama tahun 2020
32	Transmigrasi	Tidak ada IKK Outcome	Tidak ada IKK Outcome				

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	Urusan		IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					Elemen Data	Capaian Kinerja		
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	140	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten		181.00	181.00	DISKOMINFOTIK	
		141	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	„„„„„„„„„„%	6,177,769,711,669	9.74	BPKD/INSPEKTORAT	
				Jumlah APBD		63,401,103,715,868			
		142	Rasio PAD	Jumlah PAD	„„„„„„„„„„%	37,422,884,670,155	1.53		
				Jumlah PDRB non migas		2,443,405,000,000,000			
		143	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer	„„„„„„„„„„%	51,743,801,902,536	87.77		
				Jumlah belanja APBD		58,951,071,715,868			
		144	Opini Lap Keuangan	Opini Laporan Keuangan 10 Tahun terakhir	2019		WTP		WTP
					2018		WTP		
					2017		WTP		
					2016		WDP		
					2015		WDP		

NO	Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
				2014	WDP		
				2013	WDP		
				2012	WTP dengan Paragraf Penjelas		
				2011	WDP		
				2010	WDP		
145	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3		3.00	INSPEKTORAT
146	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3		3.00	
147	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD%	246		87.86	BAPEDA
		Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan		280			
148	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan%	6,177,769,7 11,669		9.74	BPKD
		Jumlah APBD		63,401,103, 715,868			

NO	Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Elemen Data	Capaian Kinerja	
149	Persentase PAD		Jumlah PAD	,,,,,,,,,%	37,422,884, 670,155	1.53	
			Jumlah PDRB non migas		2,443,405,0 00,000,000		
150	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer	,,,,,,,,,%	51,743,801, 902,536	87.77	
			Jumlah belanja APBD		58,951,071, 715,868		
151	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	,,,,,,,,,%	94	10.23	
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		919		
152	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	,,,,,,,,,%	744	425.14	BPPBJ
			Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		175		
153	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	,,,,,,,,,%	4,240,265,6 83,174	16.76	
			Total belanja langsung		25,298,878, 219,989		
154	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar		Jumlah pegawai PNS menurut pendidikan perguruan tinggi ke atas (diluar guru dan tenaga keehatan)	,,,,,,,,,%	19,495	157.82	BKD

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			12,353		
		155	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	,,,,,,,,,,%	1,784	5.60	
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		31,848		
		156	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	,,,,,,,,,,%	1,784	100.00	
				Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		1,784		
		157	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	,,,,,,,,,,%	52,115,074,600,896	-99.12	BPKD
				Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		58,951,071,715,868		
		158	Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dlm APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi	,,,,,,,,,,%	37,422,884,670,155	-99.02	BPKD
				Total PAD dlm APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		38,085,985,616,631		
		159	Assets management	Jumlah Asset Manajemen	Jumlah	4	4	BPAD
				Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ada		
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ada		

NO	Urusan	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	LPPD 2020		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				Elemen Data	Capaian Kinerja		
			Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ada			
			Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ada			
		160	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	,,,,,,,,,,%	5,146,885,276,447	7.93	BPKD

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 280 Tahun 2020 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 10 Sasaran dan 13 Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Gubernur tahun 2020. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan Gubernur NO/280/2020 tentang perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, sesuai pada tabel di bawah ini :

TARGET KINERJA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Indeks Pembangunan Manusia	80,80
2	Berkurangnya tingkat pengangguran	2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00
3	tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	3	Indeks Ketahanan Pangan	
			1. Ketersediaan	100%
			2. Skor PPH	83,00
4	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	4	Tingkat Kemiskinan	3,18%
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	5	Jumlah titik genangan banjir	6
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	6	Cakupan pelayanan air bersih	66,09%
		7	Persentase penurunan volume sampah di kota	20%
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga jakarta	8	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Transportation Modal Share)	20%
8	Meningkatnya pertumbuhan Investasi	9	Realisasi Nilai Investasi	107,8 Triliun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	10	Nilai / Predikat AKIP	A
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00
		12	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya.	13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	147 RW

Sumber : LKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian Kinerja

Berdasarkan Tabel di atas, dari 13 indikator kinerja utama yang diperjanjikan pada tahun 2020, sebanyak 6 (enam) indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, dan 7 (tujuh) indikator belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perkin

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI
1	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Indeks Pembangunan Manusia	80,80	80,77
2	Berkurangnya tingkat pengangguran	2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	10,95
3	tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	3	Indeks Ketahanan Pangan		
			1. Ketersediaan	100	100
			2. Skor PPH	83	88,2
4	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	4	Tingkat Kemiskinan	3,18	4,69
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	5	Jumlah titik genangan banjir	6	4
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	6	Cakupan pelayanan air bersih	66,09	64,33
		7	Persentase penurunan volume sampah di kota	20	20,03
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	8	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Transportation Modal Share)	25	8,2
8	Meningkatnya pertumbuhan Investasi	9	Realisasi Nilai Investasi	107,8	94,98
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	10	Nilai / Predikat AKIP	A	BB**
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,34
		12	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya.	13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	147	147

Sumber : LKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

- c. Pengukuran capaian Kinerja dibandingkan tahun sebelumnya
Perbandingan data capaian IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2019 dengan 2020 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Perbandingan data capaian IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2019 dengan 2020

NO	SASARAN	NO	IKU	2019			2020		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terjaminnya Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Peningkatan Keberdayaan yang Berkualitas Bagi Semua	1	Indeks Pembangunan Manusia	80.40	80.76	100.45	80,80	80,77	99,96
2	Berkurangnya Tingkat Pengangguran	2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.1	5.13	100.59	5	10,95	45,66
3	Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan yang Terjamin Jumlah dan Mutunya Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	3	Indeks Ketahanan Pangan						
			1. Ketersediaan	100	100	100	100	100	100
			2. Skor PPH	82	83	101.22	83	88,2	106,3
4	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	4	Tingkat Kemiskinan	3.38	3.42	101	3,18	4,69	67,8
5	Meningkatnya Fungsi dan Pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Abrasi	5	Jumlah titik genangan banjir	7	6	116.7	6	4	175
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	6	Cakupan pelayanan air bersih	63.65	63.16	99.32	66,09	64,33	97,34
		7	Persentase penurunan volume sampah di kota	17	17.06	100.4	20	20,03	100,15
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	8	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Transportation Modal Share)	22	21	95.45	25	8,2	32,8
8	Meningkatnya pertumbuhan Investasi	9	Realisasi Nilai Investasi	100.2	101.09	100.89	107,8	94,98	88,1
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	10	Nilai / Predikat AKIP	A	BB	94.72	A	BB**	83,33
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83.03	100.04	86	86,34	100,4
		12	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	proses	Proses	WTP	WTP	100
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	221	157	100%	147	147	100

Sumber : Biro Organisasi dan RB, 2020

- d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah
Dilihat dari tren realisasi selama periode RPJMD yang berlaku, pada dasarnya sebagian besar indikator menunjukkan progres realisasi yang positif, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja dan Satuan	Realisasi			Target		% Realisasi 2020 dan target 2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
Indeks Pembangunan Manusia	80,47	80,76	80,77	81,20	81,60	98,98
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24	6,54	10,95	4,90	4,80	43,84
Indeks Ketahanan Pangan (% ketersediaan)	100	100	100	100	100	100
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,5	90,8	88,2	84	85	103,8
Tingkat Kemiskinan (%)	3,55	3,42	4,69	2,98	2,78	59,28
Jumlah Titik Genangan Banjir	11	5	4	5	0	25
Cakupan pelayanan air bersih (%)	60,33	63,16	64,33	73,69	79,61	80,81
Persentase penurunan volume sampah di kota (%)	12,4	17,08	20,03	23	26	77,04
Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum/Public Transportation Modal Share (%)	15	21,7	8,2	28	30	27,33
Realisasi Nilai Investasi (Rp triliun)	114,2	123,9	94,98	115,9	124,5	76,29
Nilai/Predikat AKIP	BB	BB	BB*	AA	AA	71,43
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,76	84,41	86,34	88	88,5	97,56
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100
Jumlah kawasan permukiman RW Kumuh	217	157	147	84	23	15,65

- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.
Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Indeks Pembangunan Manusia	0,9996	9.514.808.643.908	8.927.472.789.621
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,4566	11.854.585.847	11.484.523.780
Indeks Ketahanan Pangan (% ketersediaan)	1	12.837.632.089	12.481.298.053
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) – tidak diperhitungkan	1,063 (tidak diperhitungkan karena tanpa anggaran)		
Tingkat Kemiskinan (%)	0,678	49.768.986.798	49.313.432.973
Jumlah Titik Genangan Banjir	1,75	99.001.217.625	91.078.414.117
Cakupan pelayanan air bersih (%)	0,9734	27.240.597.053	24.219.758.144
Persentase penurunan volume sampah di kota (%)	1,001	1.348.399.483.604	1.298.719.146.412
Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum/Public Transportation Modal Share (%)	0,328	140.877.504.176	129.991.930.528
Realisasi Nilai Investasi (Rp triliun)	0,881	4.468.922.710	3.540.747.136
Nilai/Predikat AKIP	0,8333	30.000.000	23.400.000
Indeks Kepuasan Masyarakat	1,004	6.085.000	6.085.000
Opini Laporan Keuangan	1	25.357.416.955	23.138.141.507
Jumlah kawasan permukiman Kumuh RW	1	19.720.816.127	17.967.178.192

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 5,52%. Lebih lanjut, dengan menggunakan rumus nilai efisiensi yaitu $NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 63%. Artinya, secara umum Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien (*cost-effective*).

- f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. Dalam mendukung pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari dilaksanakan program prioritas. Oleh Karena itu, Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemprov DKI Jakarta kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IKU dan Program

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	PD Pengampu	No	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
1	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehata dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Indeks Pembangunan Manusia	BPS					
				Dinas Pendidikan	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	12,138,243,694	9,815,004,376	80.86
					2	Program Wajib Belajar 12 Tahun	1,930,073,275,008	1,779,124,297,375	92.18
					3	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	5,519,454,630	4,239,586,763	76.81
					4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	29,506,441,034	27,573,354,825	93.45
					5	Program pengembangan Guru dan Tenaga Pendidikan	1,393,917,285,928	1,347,333,208,861	96.66
					6	Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	5,335,274,518	3,336,708,000	62.54
				Dinas Kesehatan	1	Program pengembangan Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	3,306,265,802,670	3,105,106,391,537	93.92
					2	Program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah	2,124,492,752,500	1,998,733,451,211	94.08
					3	Program peningkatan prasarana dan sarana bidang kesehatan	379,080,384,328	328,091,464,281	86.55
					4	Program pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	73,146,291,521	69,171,261,336	94.57

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	PD Pengampu	No	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
				Dinas Pemuda dan Olahraga	1	Program penyadaran, pemberdayaan, pengembangan Pemuda dan Pramuka	1,626,294,700	1,626,294,700	100
					2	Program pengembangan dan pembinaan olahraga	240,616,882,589	240,511,425,849	99.9561723
				Dinas PPAPP	1	Program pemberdayaan masyarakat	542,400,000	536,600,000	98.93
				Dispusip	1	Program pelayanan dan pengembangan perpustakaan	12,547,860,788	12,273,740,507	97.82
2	Berkurangnya tingkat pengangguran terbuka	2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan energi	1	Program pembinaan dan Penempatan tenaga kerja	10,650,800,847	10,298,013,780	96.69
					2	program penciptaan hubungan industrial yang harmonis	1,149,795,000	1,141,820,000	99.31
					3	program peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang ketenagakerjaan	53,990,000	44,690,000	82.77
3	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	3	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas KPKP	1	Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat	12,837,632,089	12,481,298,053	97.22
					2	tanpa anggaran	-	-	0
4	terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	4	Tingkat Kemiskinan	Dinsos	1	Program Penanganan Fakir Miskin	49,768,986,798	49,313,432,973	99.08

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	PD Pengampu	No	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	5	Jumlah Titik Genangan Banjir	Dinas SDA	1	Program pengendali Banjir dan Abrasi	99,001,217,625	91,078,414,117	92.00
6	meningkatnya akses sanitasi layak	6	Cakupan Pelayanan Air Bersih	Dinas SDA	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	27,240,597,053	24,219,758,144	88.91
		7	Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota	Dinas LH	1	Program pengelolaan Persampahan	1,348,399,483,604	1,298,719,146,412	96.32
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	8	Persentase Perjalanan Penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)	Dishub	1	Program pembinaan dan penyelenggaraan angkutan umum	91,641,694,022	83,984,380,714	91.64
					2	Program peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan	35,663,216,240	34,193,534,224	95.88
					3	Program pembinaan dan penyelenggaraan angkutan perairan dan kepelabuhan	13,572,593,914	11,814,015,590	87.04
8	Meningkatnya pertumbuhan investasi	9	Realisasi Nilai Investasi	BP BUMD/DPMPSTP	1	Program pembinaan dan pengembangan BUMD	1,296,632,260	1,252,322,500	96.58
					2	Program peningkatan penanaman modal	3,172,290,450	2,288,424,636	72.14

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	PD Pengampu	No	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	10	Nilai /Predikat AKIP	Inspektorat	1	Program Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	6,159,788,239	5,550,251,747	90.10
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Biro ORB	1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,085,000	6,085,000	100
		12	Opini Laporan Keuangan Daerah	Inspektorat	1	Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	6,159,788,239	5,550,251,747	90.10
					BPKD	1	Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	244,943,265	238,252,440
				BPAD	1	Program pembinaan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah	19,177,260,451	17,243,987,320	89.92
					2	Program pemanfaatan aset daerah	353,903,000	129,050,000	36.46
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	13	Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh	DPRKP	1	Program penataan kawasan permukiman	19,720,816,127	17,967,178,192	91.11

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan meliputi :

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Sesuai dengan undang-undang pembentukan dan pengaturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, bahwa otonomi di Provinsi DKI Jakarta bersifat tunggal dan diletakkan pada lingkup Provinsi, dengan demikian di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat Kabupaten/Kota otonom dan Desa, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pemberian Tugas Pembantuan untuk Kabupaten/Kota dan Desa.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/ Lembaga kepada Kepala Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menerima Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, nilai keseluruhan yang diterima sebesar Rp. 1.299.886.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.285.656.788,- atau 98,91%.

Program dan Kegiatan :

b. Program : Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

c. Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- 2) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
- 3) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)
- 4) Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan
- 5) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima pada tahun 2020, setelah yang terserap sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.285.656.788,- atau 98,91%

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Provinsi

Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada Provinsi

3.1.1 Target Kinerja

Tahun anggaran 2020 satker (019057) dengan nomor DIPA SP DIPA-018.06.4.019057/2020 mendapat anggaran Rp.1.686.273.000,- dan di refocusing menjadi Rp.1.299.886.000,-. Target Kinerja Satker (019057) adalah :

No	Program/Kegiatan	Target Output	Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu Anggaran Revisi (Rp)
	Program Pemenuhan Pangan Asal Hewan dan Agribisnis Peternakan Rakyat			
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	10.750 Dosis	412.737.000	396.028.000
2	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	1.000 Akseptor	298.820.000	264.850.000
3	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, sehat utuh)	9 Unit Usaha	104.000.000	105.650.000

No	Program/Kegiatan	Target Output	Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu Anggaran Revisi (Rp)
	dan halal)			
		100 Sampel	70.000.000	36.250.000
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Keswan	1 Layanan	528.716.000	378.108.000
5	Pengembangan Pengolahan dan pemasaran Hasil Ternak	3 Lokasi	272.000.000	119.000.000
			1.686.273.000	1.299.886.000

3.1.2 Realisasi

Realisasi anggaran dan kinerja Satker (019057) sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Pagu Anggaran Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	Program Pemenuhan Pangan Asal Hewan dan Agribisnis Peternakan Rakyat				
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Tersedianya vaksin rabies 10.000 dosis, dan vaksin Brucellosis 750 dosis	396.028.000	393.972.049	99,48
2	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Terlayannya IB sebanyak 1000 akseptor, PKB 700 ekor	264.850.000	256.793.896	96,96
3	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, sehat utuh dan halal)	NKV di unit usaha sebanyak 9 Unit	105.650.000	105.199.800	99,57
		Produk pangan yang beredar aman dan berkualitas sebanyak 100 sampel	36.250.000	36.094.400	99,57
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan	Tersedianya laporan pengelolaan keuangan dan BMN 2 laporan	378.108.000	374.767.043	99,12

No	Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Pagu Anggaran Revisi (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	Keswan				
5	Pengembangan Pengolahan dan pemasaran Hasil Ternak	Pemutakhiran data Pengolahan dan Penerapan Mutu Produk Hasil Peternakan dan Pengembangan Informasi Pasar dan Ketersediaan Produk Peternakan	119.000.000	118.829.600	99,86
			1.299.886.000	1.285.656.788	98,91

Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Provinsi Tahun 2020

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.06.4.019057/2020	Program : Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kegiatan : - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Target Output : Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan - Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Target Output : Optimalisasi Reproduksi - Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Target Output : 1. Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 2. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan Target Output : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Target Output : Kelembagaan dan	DKI Jakarta	DKPKP	1,299,886,000	1,285,656,788	98.91%			
						396,028,000	393,972,049	99.48%			
						264,850,000	256,793,896	96.96%			
						141,900,000	141,294,200	99.57%			
						378,108,000	374,767,043	99.12%			
						119,000,000	118,829,600	99.86%			

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Usaha Peternakan								

3.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan pada umumnya tidak dijumpai masalah yang cukup berarti.

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Tidak ada.

B. Dekonsentrasi

Pada Pasal 1 ayat (14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga.

Adapun penyelenggaraan Dekonsentrasi pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Instansi Pemberi Dekonsentrasi dan Instansi Pelaksana

Untuk tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta menerima Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional sebagai berikut :

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 27.620.886.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.837.369.755,- atau 79,06%. Secara rinci Dana Dekonsentrasi yang diterima adalah sebagai berikut :

Tabel
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2020

NO	Kementerian	SKPD Pelaksana	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4/3)
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	741,399,000	735,348,316	99.18%
2	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	3,455,029,000	3,414,509,342	98.83%
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	1,218,138,000	866,494,000	71.13%
4	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	593,625,000	344,256,000	57.99%
5	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Energi	1,200,610,000	1,173,528,365	97.74%
6	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	2,130,436,000	1,016,242,000	47.70%
7	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	145,659,000	141,041,476	96.83%
8	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,821,628,000	1,665,542,000	91.43%
9	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	6,357,500,000	3,347,384,100	52.65%
10	Kementerian Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	0.00%
11	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	382,000,000	352,462,744	92.27%
12	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	4,719,913,000	4,286,019,290	90.81%
13	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	-	-	0.00%
14	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	4,550,315,000	4,255,993,822	93.53%
15	Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	304,634,000	238,548,300	78.31%
JUMLAH			27,620,886,000	21,837,369,755	79.06%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2021

2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan realisasi pelaksanaannya dari tiap-tiap kementerian pemberi Dana Dekonsentrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kementerian Dalam Negeri

- 1) SKPD Pelaksana : Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program : Bina Administrasi Kewilayahan
- 3) Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah. Kegiatan tidak berjalan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*) berdasarkan Surat Kemendagri Nomor 910/1764/BAK hal Penghematan Anggaran

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan



- 1) SKPD Pelaksana : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
 - 2) Program :
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
 - Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan perikanan
 - Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 3) Kegiatan :
 - Pengelolaan Keuangan KKP
 - Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP
 - Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP
 - Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat penangkapan Ikan (Kegiatan ditiadakan dikarenakan efisiensi anggaran oleh DJPT KKP)
 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
 - Pengelolaaan Perizinan Kenelayanan
 - Pengelolaan Sumber Daya Ikan
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 - Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
 - Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Kegiatan tidak berjalan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
 - Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 - Pengolahan dan Bina Mutu Produk Keluatan dan Perikanan
 - Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Keluatan dan Perikanan
 - Pemantauan dan Operasi Armada
 - Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- c. Kementerian Pertanian
- 1) SKPD Pelaksana : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
 - 2) Program :
 - Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

- Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian
- 3) Kegiatan :
- Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
 - Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
 - Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
 - Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
 - Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
- d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 1) SKPD Pelaksana : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan
 - 2) Program : Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
 - 3) Kegiatan : Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah
- e. Kementerian Perdagangan
- 1) SKPD pelaksana : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 2) Program :
 - Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
 - Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
 - 3) Kegiatan :
 - Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri
 - Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
- f. Kementerian Perindustrian
- 1) SKPD pelaksana : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 2) Program : Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka
 - 3) Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi SDM Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
- g. Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 1) SKPD pelaksana : Dinas Pemuda dan Olahraga
 - 2) Program :
 - Kepemudaan dan Keolahragaan
 - Pembinaan Olahraga Prestasi
 - 3) Kegiatan :
 - Peningkatan Wawasan Pemuda

- Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
 - Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan (Kegiatan tidak berjalan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
- h. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 1) SKPD pelaksana : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
 - 2) Program : Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - 3) Kegiatan :
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - Penataan Persebaran Penduduk (Kegiatan tidak berjalan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
- i. Kementerian Ketenagakerjaan
- 1) SKPD pelaksana : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
 - 2) Program :
 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
 - Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
 - 3) Kegiatan :
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas
 - Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dan Luar Negeri Binalattas
 - Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih dan ditempatkan
 - Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan (Kegiatan tidak berjalan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
 - Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak (Kegiatan tidak berjalan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
 - Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

j. Kementerian Kesehatan

1) SKPD pelaksana : Dinas Kesehatan

2) Program :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
- Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
- Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
- Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
- Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

3) Kegiatan :

- Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
- Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
- Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS
- Pembinaan Gizi Masyarakat
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
- Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pembinaan Kesehatan Keluarga
- Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penyehatan Lingkungan
- Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer
- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Kegiatan tidak berjalan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
- Surveilans dan Karantina Kesehatan
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (Kegiatan tidak berjalan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
 - Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 - Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian (Kegiatan tidak berjalan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Kegiatan tidak berjalan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
 - Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Kegiatan tidak berjalan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
 - Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Kegiatan tidak berjalan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
 - Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- k. Kementerian Pariwisata
- 1) SKPD pelaksana : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 2) Program :
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Kementerian Pariwisata
 - Pengembangan Kepariwisata
 - 3) Kegiatan :
 - Pengembangan Perencanaan dan Keuangan
 - Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah China
 - Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Barat, Singapore, Thailand dan Indochina
 - Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan Brunei
 - Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Australia dan Oceania
 - Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga
 - Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Pasifik

- 4) Kegiatan tidak berjalan/ditiadakan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*)
- I. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1) SKPD Pelaksana : Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - 2) Program : Partisipasi Lembaga Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3) Kegiatan : Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah
- m. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 1) SKPD pelaksana : Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - 2) Program :
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
 - Pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kerjasama Internasional BKKBN
 - Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
 - 3) Kegiatan :
 - Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Provinsi
 - Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi (Kegiatan tidak berjalan/ditiadakan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
 - Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Provinsi
- n. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 1) SKPD pelaksana : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
 - 2) Program : Penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman Transmigrasi
 - 3) Kegiatan :
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - Penataan Persebaran Penduduk (Kegiatan tidak berjalan/ditiadakan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*))
- o. Kementerian Sosial
- 1) SKPD pelaksana : Dinas Sosial
 - 2) Program :

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Sosial
 - Program Pemberdayaan Sosial
 - Program Rehabilitas Sosial
 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Program Penanganan Fakir Miskin
 - Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial
- 3) Kegiatan :
- Perencanaan dan Penganggaran
 - Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
 - Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
 - Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - Jaminan Sosial Keluarga
 - Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
 - Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial
- p. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 1) SKPD pelaksana : Dinas Pendidikan
 - 2) Program :
 - Program Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Guru dan Tenaga Kependidikan
 - 3) Kegiatan :
 - Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan khusus
 - Pembinaan Sekolah Menengah Atas
 - Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
 - 4) Kegiatan tidak berjalan/ditiadakan karena adanya penghematan anggaran (*refocusing*)
- q. Kementerian Sosial
- 1) SKPD pelaksana : Dinas Sosial
 - 2) Program :
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Kementerian Sosial
 - Program Pemberdayaan Sosial
 - Perlindungan Sosial
 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Program Penanganan Fakir Miskin

- Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial
- 3) Kegiatan :
- Perencanaan dan Penganggaran
 - Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
 - Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
 - Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas
 - Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
 - Rehabilitasi Sosial Anak
 - Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - Jaminan Sosial Keluarga
 - Penanganan Fakir Miskin Wilayah II
 - Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial
- r. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- 1) SKPD pelaksana : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 2) Program : Pengembangan Perpustakaan
 - 3) Kegiatan : Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

Sesuai dengan undang-undang pembentukan dan pengaturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, bahwa otonomi di Provinsi DKI Jakarta bersifat tunggal dan diletakkan pada lingkup Provinsi, dengan demikian di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat Kabupaten/Kota otonom dan Desa, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pemberian Tugas Pembantuan untuk Kabupaten/Kota dan Desa.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan menjadi 2 lingkup penyelenggara baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Sesuai dengan penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi DKI Jakarta, Otonomi Daerah terletak di tingkat provinsi oleh karena itu Pemerintah Provinsi melaksanakan secara keseluruhan Pelayanan Dasar bidang Pendidikan yang terdiri atas :

- a. Pendidikan Menengah
- b. Pendidikan Khusus
- c. Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Pendidikan Dasar
- e. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan :

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Lebih lanjut jenis layanan serta mutu pelayanan dasar Bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

4.1.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan adalah 100% (seratus persen)

4.1.3 REALISASI

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Atas	100%	70,17%
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	100%	80,99%
3	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	81,29%
4	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	3,73%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
5	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	33,13%

Berdasarkan tabel pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2020 tersebut diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian Layanan Dasar Pendidikan Menengah

Capaian Layanan dasar pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 70,17% dari target 100%, dengan rincian capaian pada pendidikan menengah sebesar 33,21% dan 36,96% pada pendidikan menengah kejuruan. Jumlah penduduk DKI Jakarta usia 16 s.d 18 tahun pada tahun 2020 sebanyak 485.800 orang, sebanyak 340.890 bersekolah pada pendidikan formal dengan sebaran sebanyak 141.112 orang bersekolah pada jenjang SMA, 20.238 orang bersekolah di MA sedangkan sebanyak 179.540 orang bersekolah di SMK sementara itu terdapat selisih 144.910 orang usia 16 s.d 18 tahun yang saat ini perlu di verifikasi lebih lanjut.

2. Capaian Layanan Dasar Pendidikan Khusus

Jumlah penduduk DKI Jakarta usia 4 s.d 18 pada tahun 2020 yang memiliki kebutuhan khusus sebanyak 11.509 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 9.321 orang bersekolah pada sekolah pendidikan khusus. Capaian layanan dasar pendidikan khusus pada tahun 2020 sebesar 80,99% dari target 100%.

3. Capaian Layanan Dasar Pendidikan Dasar

Capaian Layanan dasar pendidikan dasar pada tahun 2020 sebesar 81,29%. Jumlah penduduk DKI Jakarta usia 7 s.d 15 tahun pada tahun 2020 sebanyak 1.656.454 orang dengan sebaran sebanyak 794.820 orang bersekolah di SD, 120.792 orang di MI, 365.054 di SMP dan sebanyak 65.896 orang bersekolah di MTs. sementara itu terdapat selisih 309.873 orang usia 7 s.d 15 tahun yang saat ini perlu di verifikasi lebih lanjut.

4. Capaian Layanan Dasar Kesetaraan

Penduduk usia 7 s.d 18 tahun yang tidak bersekolah pada sekolah formal dan perlu verifikasi lebih lanjut saat ini berjumlah 441.392 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 16.454 orang bersekolah pada pendidikan kesetaraan atau sekitar 3,72%.

5. Capaian Layanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini

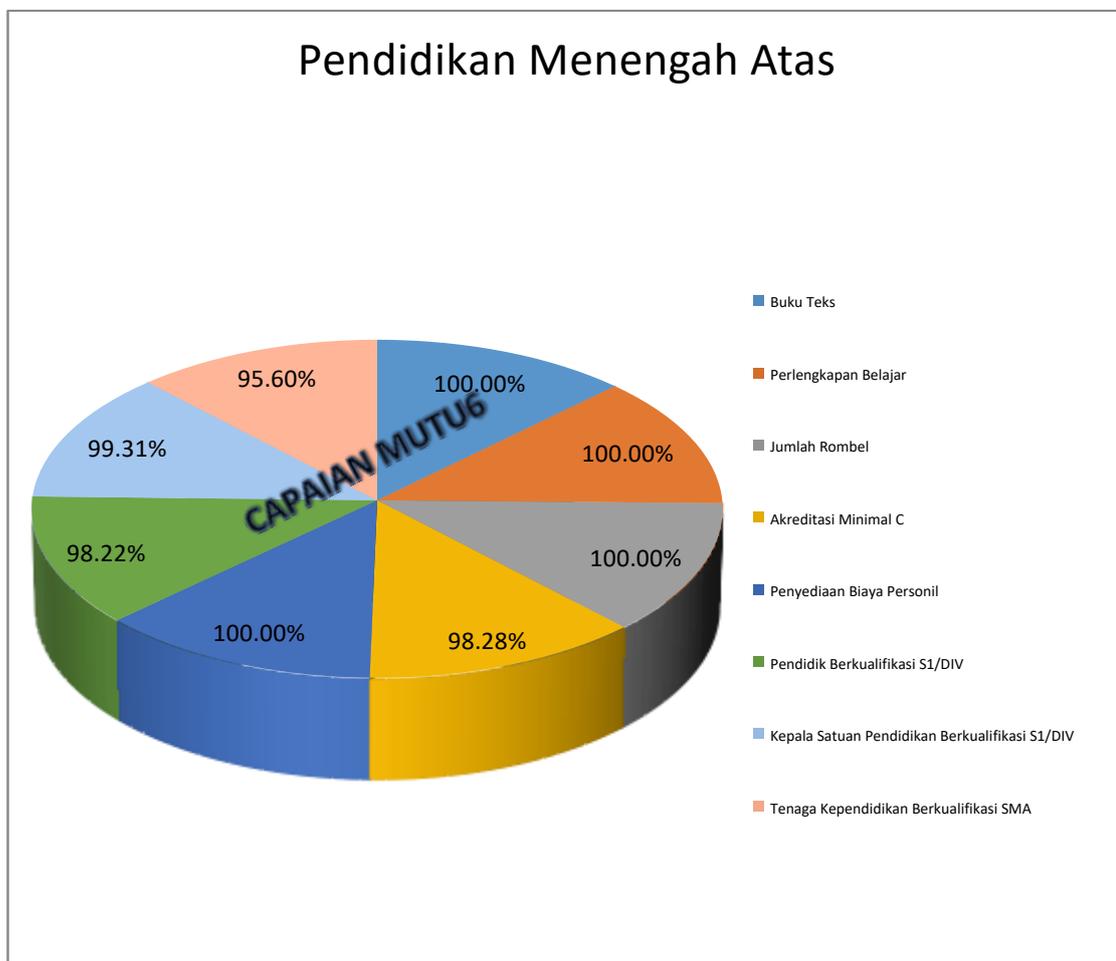
Pada tahun 2020 jumlah penduduk usia 5 s.d 6 tahun sebanyak 374.363 orang dengan partisipasi bersekolah pada pendidikan anak usia dini sebesar 33,13% atau 124.025 orang yang mengenyam pada pendidikan anak usia dini. Sementara sebanyak 250.338 penduduk masih perlu verifikasi lebih lanjut.

B. Mutu Pelayanan Dasar

1) Pendidikan Menengah Atas

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Buku Teks Pelajaran	54.135	54.135	-	100%
2.	Perlengkapan Belajar	54.135	54.135	-	100%
3.	Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	5.605	5.605	-	100%
4.	Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	581	571	10	98,28%
5.	Penyediaan biaya personil peserta didik	54.135	54.135	-	100%
6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	10.621	10.432	189	98,22%
7.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala	581	577	4	99,31%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
	Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV				
8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	2.387	2.282	105	95,60%



Dari grafik dapat dilihat bahwa dari 8 aspek mutu layanan dasar dinilai dengan menggunakan nilai capaian mutu yang membandingkan jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang tersedia.

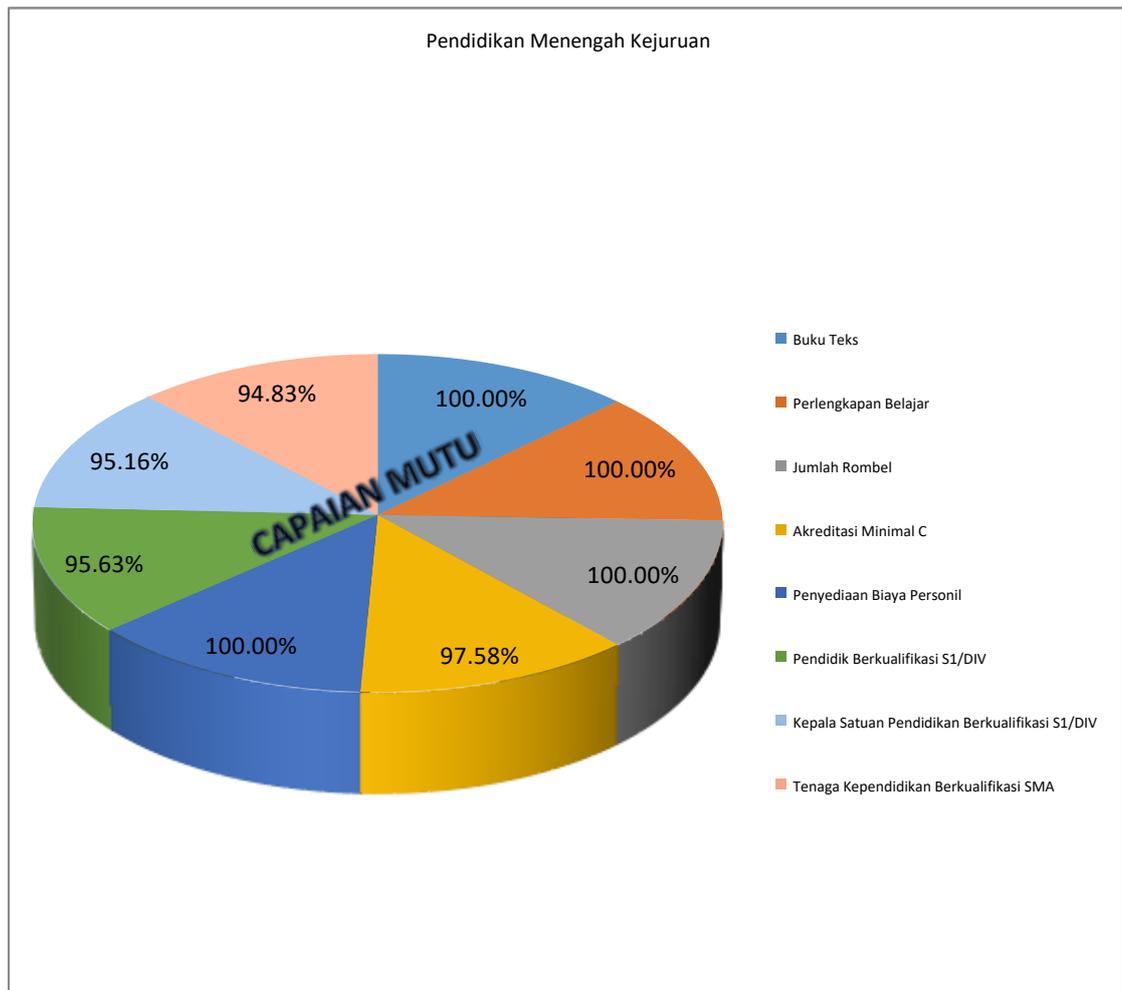
Pada pendidikan menengah atas terdapat 4 aspek yang memiliki capaian mutu sebesar 100%, yaitu : buku teks pelajaran, perlengkapan belajar, dan penyediaan biaya personil peserta didik masing-masing memiliki jumlah kebutuhan sebesar 54.135 buah dan tersedia sebesar 54.135 buah, serta jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan yaitu sebesar 5.605 rombel dan tersedia sebesar 5.605 rombel.

Sementara ada 4 aspek yang memiliki nilai capaian beragam yaitu satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c dengan capaian 571 lembaga dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 581 lembaga atau sekitar 98,28%, kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 10.621 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 10.432 orang atau sekitar 98,22%, kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 577 lembaga dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 581 lembaga atau sekitar 99,31% dan kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat dengan capaian 2.282 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 2.387 orang atau sekitar 95,60%.

2) Pendidikan Menengah Kejuruan

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Buku Teks Pelajaran	143.363	143.363	-	100%
2.	Perlengkapan Belajar	143.363	143.363	-	100%
3.	Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	7.153	7.153	-	100%
4.	Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	578	564	14	97,58%
5.	Penyediaan biaya personil peserta didik	143.363	143.363	-	100%
6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	11.043	10.560	483	95,63%
7.	Kualitas tenaga	578	550	28	95,16%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
	kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV				
8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	2.416	2.291	125	94,83%



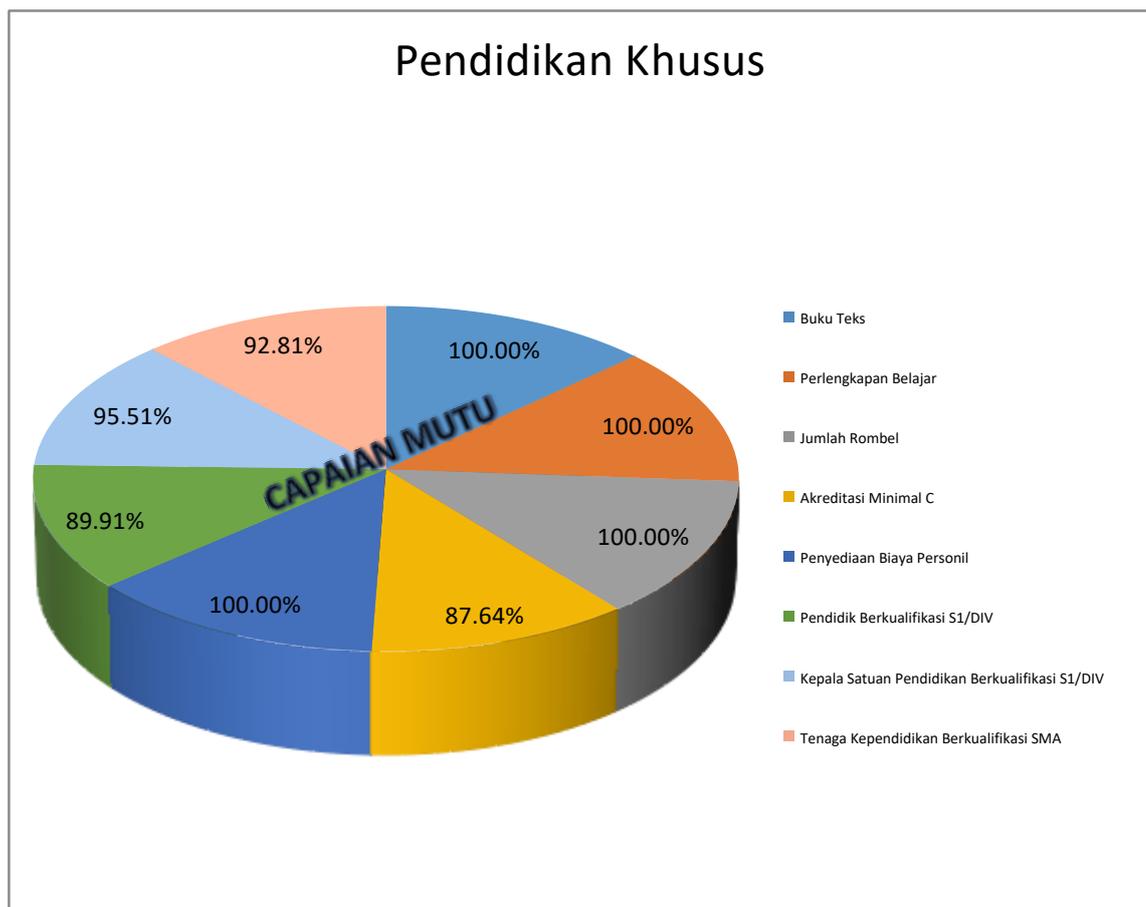
Pada pendidikan menengah kejuruan terdapat 4 aspek yang memiliki capaian mutu sebesar 100%, yaitu : buku teks pelajaran, perlengkapan belajar, dan penyediaan biaya personil peserta didik masing-masing memiliki jumlah kebutuhan sebesar 143.363 buah dan tersedia sebesar 143.363 buah, serta jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan yaitu sebesar 7.153 rombel dan tersedia sebesar 7.153 rombel.

Sementara ada 4 aspek yang memiliki nilai capaian beragam yaitu satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c dengan capaian 564 lembaga dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 578 lembaga atau sekitar 97,58%, kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 10.560 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 11.043 orang atau sekitar 95,63%, kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 550 lembaga dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 578 lembaga atau sekitar 95,16% dan kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat dengan capaian 2.291 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 2.416 orang atau sekitar 94,83%.

3) Pendidikan Khusus

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	1.167	1.167	-	100%
2.	Perlengkapan Belajar	1.167	1.167	-	100%
3.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.381	1.381	-	100%
4.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	89	78	11	87,64%
5.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.167	1.167		100%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
6.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.249	1.123	126	89,91%
7.	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	89	85	4	95,51%
8.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	153	142	11	92,81%



Pada pendidikan khusus terdapat 4 aspek yang memiliki capaian mutu sebesar 100%, yaitu : buku teks pelajaran, perlengkapan belajar, dan

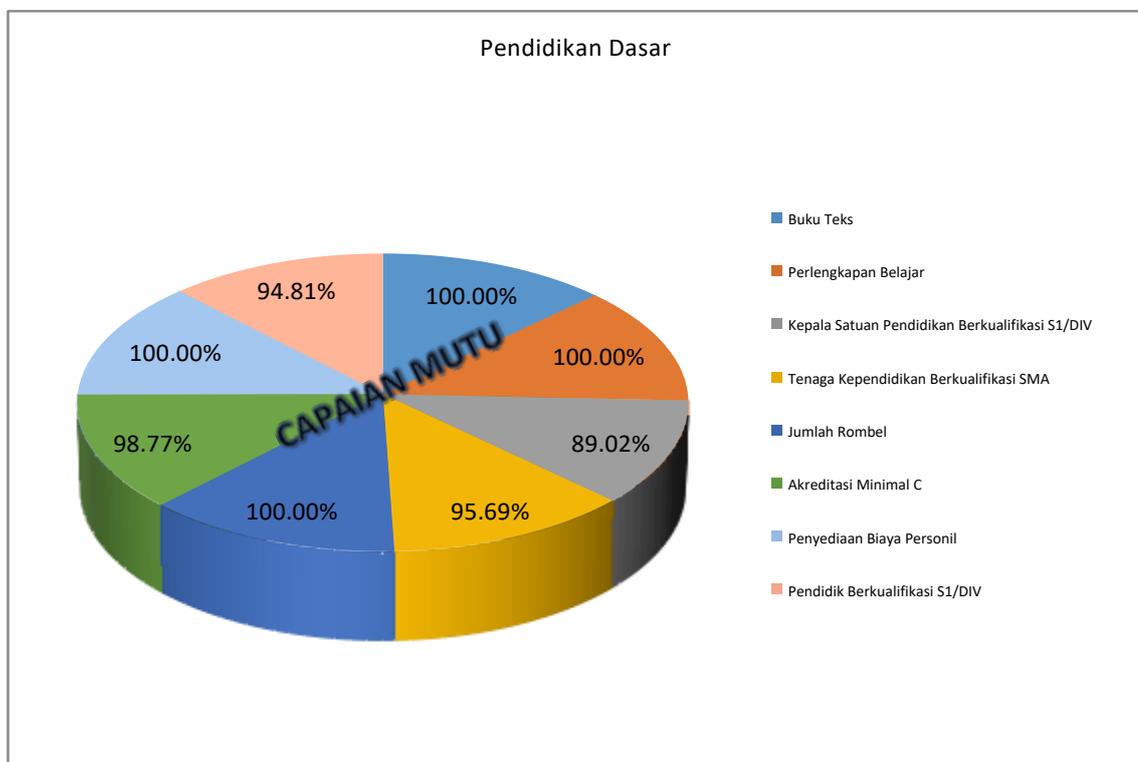
penyediaan biaya personil peserta didik masing-masing memiliki jumlah kebutuhan sebesar 1.167 buah dan tersedia sebesar 1.167 buah, serta jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan yaitu sebesar 1.381 rombongan dan tersedia sebesar 1.381 rombongan.

Sementara ada 4 aspek yang memiliki nilai capaian beragam yaitu satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C dengan capaian 78 lembaga dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 89 lembaga atau sekitar 87,64%, kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 1.123 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 1.249 orang atau sekitar 89,91%, kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 85 lembaga dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 89 lembaga atau sekitar 95,51% dan kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat dengan capaian 142 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 153 orang atau sekitar 92,81%.

4) Pendidikan Dasar

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Buku Teks Pelajaran	649.584	649.584	-	100%
2.	Perlengkapan Belajar	649.584	649.584	-	100%
3.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	4.144	3.689	455	89,02%
4.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	8.362	8.002	360	95.69%
5.	Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	46.953	46.953	-	100%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
6.	Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	4.144	4.093	51	98,77%
7.	Penyediaan biaya personil peserta didik	649.584	649.584	-	100%
8.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	55.697	52.806	2.891	94,81%



Pada pendidikan dasar terdapat 4 aspek yang memiliki capaian mutu sebesar 100%, yaitu : buku teks pelajaran, perlengkapan belajar, dan penyediaan biaya personil peserta didik masing-masing memiliki jumlah kebutuhan sebesar 649.584 buah dan tersedia sebesar 649.584 buah, serta jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan yaitu sebesar 46.953 rombongan belajar dan tersedia sebesar 46.953 rombongan belajar.

Sementara ada 4 aspek yang memiliki nilai capaian beragam yaitu satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c dengan capaian 4.093 lembaga dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 4.144 lembaga atau sekitar 98,77%, kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 52.806 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 55.697 orang atau sekitar 94,81%, kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 3.689 lembaga dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 4.144 lembaga atau sekitar 89,02% dan kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat dengan capaian 8.002 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 8.362 orang atau sekitar 95,69%.

5) Pendidikan Kesetaraan

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1	Modul Belajar	2.209	2.209	-	100%
2.	Perlengkapan Belajar	2.209	2.209	-	100%
3.	Jumlah rombongan belajar di PKBM	1.848	1.848	-	100%
4.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	2.209	2.209	-	100%
5.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	789	613	176	77,69%
6.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	257	157	100	61,08%
7.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.103	1.068	35	96,82%
8.	PKBM Terakreditasi minimal c	257	183	74	71,21%



Pada pendidikan kesetaraan terdapat 4 aspek yang memiliki capaian mutu sebesar 100%, yaitu : modul belajar, perlengkapan belajar, dan penyediaan biaya personil peserta didik masing-masing memiliki jumlah kebutuhan sebesar 2.209 buah dan tersedia sebesar 2.209 buah, serta jumlah rombongan belajar di PKBM yaitu sebesar 1.848 rombel dan tersedia sebesar 1.848 rombel.

Sementara ada 4 aspek yang memiliki nilai capaian beragam yaitu satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c dengan capaian 183 lembaga dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 257 lembaga atau sekitar 71,21%, kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 613 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 789 orang atau sekitar 77,69%, kualitas tenaga

kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 157 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 257 orang atau sekitar 61,08% dan kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/ tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat dengan capaian 1.068 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 1.103 orang atau sekitar 96,82%

6) Pendidikan Anak Usia Dini

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1	Buku Gambar	-	-	-	-
2.	Alat Mewarnai	-	-	-	-
3.	Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal c	-	-	-	-
4.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	-
5.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	3.687	2.581	1.106	70,00%
6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	13.377	7.227	6.150	54,02%
7.	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	12.589	12.589	-	100%

Pada pendidikan anak usia dini, data capaian mutu kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 7.227 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 13.377 orang atau sekitar 54,02%, kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 2.581 orang dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 3.687 orang atau sekitar 70,00%.

4.1.4 ALOKASI ANGGARAN

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	821.748.953.999	478.299.970.084	433.273.449.065
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.246.306.005	646.792.830	526.748.998
3.	Pengelolaan Pendidikan Khusus	115.617.503.615	27.924.750.622	28.749.601.995
4.	Pendidikan Dasar	3.654.541.453.190	2.462.826.440.829	2.382.484.860.253
5.	Pendidikan Kesetaraan	55.630.017.237	46.956.676.388	38.327.465.588
6.	Pendidikan Anak Usia Dini	164.498.778.696	67.523.647.026	33.736.615.931

4.1.5 DUKUNGAN PERSONIL

NO	Jabatan	PNS	Non PNS	Total
1	Guru	27.880	50.737	78.617
2	Tenaga Kependidikan	3.470	20.755	24.225
JUMLAH		31.350	71.492	102.842

4.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

- 1) Tidak adanya data penduduk DKI Jakarta yang bersekolah diluar DKI Jakarta karena data dari sistem Dapodik yang digunakan oleh Dinas Pendidikan hanya bisa memilih peserta didik yang bersekolah di Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Data antar SKPD dan antar lembaga belum tersinkronisasi dengan baik sehingga kualitas data yang diperoleh belum maksimal.
- 3) Kualitas data pada aplikasi dapodik masih belum maksimal, dikarenakan masih kurangnya kesadaran para tenaga administrasi pada satuan pendidikan tentang pentingnya kualitas data pada aplikasi dapodik. Data yang ada dalam aplikasi dapodik merupakan salah satu dasar pembuatan kebijakan oleh pemerintah.

b. Solusi

- 1) Perlu dilakukan sinkronisasi data pendidikan antara data yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Sosial.
- 2) Perlu sosialisasi dan intervensi kepada satuan pendidikan tentang pentingnya kualitas data pada aplikasi dapodik.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
- c. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- d. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- e. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- f. Pelayanan kesehatan balita
- g. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
- h. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- i. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- j. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- k. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

- m. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- n. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*)

Penerima Layanan Dasar :

- a. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- b. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
- c. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil
- d. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin
- e. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- f. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita
- g. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- h. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif
- i. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- j. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- k. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- l. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- m. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

n. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

adapun ketentuan terhadap mutu pelayanan dasar dan tata cara pemenuhannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

4.2.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan adalah 100% (seratus persen)

4.2.3 REALISASI

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kesehatan bencana berpotensi provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak kesehatan akibat bencana dan/atau bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
3	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96.62%
4	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97.34%
5	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98.26%
6	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	88.23%
7	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	100%	59.16%
8	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	38,59%
9	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	63.47%
10	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	41.02%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
11	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	86.06%
12	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	100%	118.31%
13	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
14	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	118,40%

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Tahun 2020 untuk beberapa indikator ada yang mengalami peningkatan namun ada juga yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator yang tercapai ada indikator pelayanan krisis kesehatan, pelayanan Kejadia Luar Biasa sesuai standar, pelayanan kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ), pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC dan pelayanan kesehatan pada individu berisiko terinfeksi HIV.

Sedangkan, beberapa indikator yang masih rendah, diantaranya indikator pelayanan anak usia dasar (59.16%), pelayanan kesehatan pada penduduk usia produktif (38.59%), pelayanan kesehatan bagi penduduk lanjut usia (63.47%) dan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi (41,02%).

B. Mutu Pelayanan Dasar

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	6.520	6.520	0	100%
2.	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	1.956	1.956	0	100%
3.	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	6.520	6.520	0	100%

- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	26.400	26.400	0	100.00%
2.	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	0	0	0	0%
3.	Alat Pemeriksaan Fisik	505	505	0	100.00%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
	(Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)				
4.	Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit	453.686	453.686	0	100.00%
5.	Wadah Pengiriman Spesimen (Specimen Carrier)	88	88	0	100.00%
6.	Tempat Sampah Biologis	26.400	26.400	0	100.00%
7.	Formulir : Form Penyelidikan Epidemiologi Form/ Lembar KIE Alat Tulis yang diperlukan	226.799	226.799	0	100.00%

3) Pelayanan kesehatan ibu hamil

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	146.184	135.483	10.701	92,68%
2.	Tablet Tambah Darah	146.115	138.766	7.349	94,97%
3.	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	110.611	103.195	7.416	93,30%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
4.	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	148.044	146.606	1.438	99,03%
5.	Buku KIA	183.641	179.786	3.855	97,90%

4) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Formulir Fotograf	105.613	104.170	1.443	98,63%
2.	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	105.613	104.170	1.443	98,63%
3.	Buku KIA	105.613	104.170	1.443	98,63%

5) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Vaksin Hepatitis BO	166.939	164.436	2.503	98,50%
2.	Vitamin K1 Injeksi	166.939	164.436	2.503	98,50%
3.	Salep/Tetes Mata Antibiotik	166.939	164.436	2.503	98,50%
4.	Formulir Bayi Baru Lahir	166.939	164.436	2.503	98,50%
5.	Formulir MTBM	261.533	258.262	3.271	98,75%
6.	Buku KIA	166.939	164.646	2.293	98,63%

6) Pelayanan kesehatan balita

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	707.993	586.295	121.698	82,81
2.	Formulir DDTK	707.993	550.457	157.536	77,75%
3.	Buku KIA	707.993	625.574	82.419	88,36%
4.	Vitamin A Biru	453.202	257.642	195.560	56,85%
5.	Vitamin A Merah	708.011	552.048	155.963	77,97%
6.	Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell	254.704	228.107	26.597	89,56%
7.	Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB - Hib * Campak Rubella	236.710	231.280	5.430	97,71%
8.	Jarum Suntik dan BHP	521.802	575.548	-53.746	110,30%
9.	Peralatan Anafilaktik	377.028	338.565	38.463	89,80%

7) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Buku Raport Sehatanku	1.033.697	290.671	743.026	28,12%
2.	Buku Pemantauan Kesehatan	538.290	262.377	275.913	48,74%
3.	Kuesioner Skrining Kesehatan	688.621	511.801	176.820	74,32%
4.	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja	401.072	262.356	138.716	65,41%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
	di Dalam Sekolah				
5.	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	401.072	262.356	138.716	65,41%

8) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	4.861.683	2.676.349	2.185.334	55,05%
2.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	3.508.791	1.323.457	2185334	37,72%

9) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	663.862	426.814	237.048	64,29%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
2.	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	663.862	426.814	237.048	64,29%
3.	Buku Kesehatan Lansia	711907	347185	364722	48,77%

10) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	1.312.410	597.346	715.064	45,52%
2.	Tensimeter	1.311.906	596.842	715.064	45,49%
3.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	1.311.736	596.672	715.064	45,49%

11) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	* Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	1.032.052	1.022.312	9.740	99,06%
2.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI	133.411	123.671	9.740	92,70%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
	PTM				
3.	Pedoman dan Media KIE	134783	125043	9740	92,77%

12) Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	4.736	6.210	0	131,12%
2.	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	4.736	6.210	0	131,12%
3.	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	4.736	6.210	0	131,12%
4.	Media KIE	4.736	62.10	0	131,12%

13) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	76.610	76.610	0	100,00%
2.	Reagen Zn TB	52.815	52.815	0	100,00%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
3.	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	62.593	62.593	0	100,00%
4.	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	114.611	114.611	0	100,00%
5.	Catridge Tes Cepat Molekuler	73.261	62.229	11.032	84,94%
6.	Formulir Pencatatan dan Pelaporan	76.609	76.609	0	100,00%
7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	62.491	62.491	0	100,00%

14) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	194.083	225.635	0	116,26%
2.	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	194.083	225.635	0	116,26%
3.	Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis *Rekam Medis yang beris	194.642	226.098	0	116,16%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
	Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK				

4.2.4 ALOKASI ANGGARAN

a. APBD

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	8,235,688,209	2,878,552,388	2,814,568,361
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	350,970,925	2,858,485,285	2,709,482,670
3.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1,639,112,734	371,576,758	261,214,980
4.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	573,056,000	115,587,000	101,222,000
5.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1,074,735,790	127,838,340	100,465,000
6.	Pelayanan kesehatan balita	1,909,374,254	667,345,480	543,183,445
7.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1,716,730,500	171,515,000	170,290,000
8.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	4,625,396,187	1,005,345,896	1,154,603,541
9.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1,696,767,658	502,035,900	366,990,000
10.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	60,601,000	7,010,000	7,010,000
11.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	91,972,000	5,790,000	5,790,000
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	498,084,000	67,230,000	65,955,000
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	3,326,003,945	994,473,785	799,769,281
14.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	494,368,112	80,062,112	59,846,781

b. APBN

	Program	Kegiatan	Output Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi s.d Desember	Persentase Kumulatif (%)	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2041	Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	2041001	Pelayanan Kesehatan Haji	597.647.000	596.550.434	99,82%
		Jumlah					597.647.000	596.550.434
2	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	5610	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	5610601	Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	389.600.000	351.929.500	90,33%
		Jumlah					389.600.000	351.929.500
Jumlah Total						987.247.000	948.479.934	96,07%
3		2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080003	Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu Hamil dan Balita	100.000.000	96.930.000	96,93%
				2080007	Pembinaan dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat	225.000.000	225.000.000	100,00%
				2080504	Peningkatan Surveilans Gizi	995.118.000	967.460.500	97,22%
4	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	2089035	Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Pekerja	200.850.000	199.942.500	99,55%
				2089036	Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji	271.565.000	228.552.630	84,16%
				2089037	Pembinaan Pelaksanaan Kesehatan Olahraga bagi Anak Sekolah	51.962.000	51.770.000	99,63%
				2089040	Pembinaan Pekerja Perempuan Sehat produktif	179.762.000	179.570.000	99,89%

	Program	Kegiatan	Output Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi s.d Desember	Persentase Kumulatif (%)
5		5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832001	Pembinaan Dalam Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	445.016.000	442.580.000	99,45%
			5832002	Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama	37.950.000	37.950.000	100,00%
			5832004	Pembinaan dalam Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	290.884.000	290.542.000	99,88%
			5832005	Pembinaan Pencegahan stunting	244.520.000	244.178.000	99,86%
			5832015	Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	316.006.000	315.838.000	99,95%
			5832018	Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal	89.878.000	89.772.000	99,88%
6		5833 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5833001	Pembinaan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	173.649.000	167.530.240	96,48%
			5833002	Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media	402.899.000	382.959.400	95,05%
			5833004	Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam mendukung Program Kesehatan	332.650.000	272.924.500	82,05%
Jumlah					4.357.709.000	4.193.499.770	96,23%
7	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	2051 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2051502	Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Standar	60.000.000	60.000.000	100,00%

	Program	Kegiatan	Output Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi s.d Desember	Persentase Kumulatif (%)
8		2087 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	2087509	Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Jumlah Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	84.535.000	84.510.000	99,97%
9		2090 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2090502	Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan	122.677.000	122.677.000	100,00%
	2090506		Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar	172.650.000	168.700.000	97,71%	
	Jumlah				439.862.000	435.887.000	99,10%
10	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2058 Surveilans dan Karantina Kesehatan	2.058.004	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB	166.969.000	159.187.000	95,34%
			2058005	Layanan Respon KLB dan Wabah	35.000.000	33.300.000	95,14%
			2058006	Layanan Imunisasi	419.400.000	419.400.000	100,00%
			2058008	Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging	57.590.000	57.590.000	100,00%
11	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2060 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2060500	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	110.098.000	102.688.000	93,27%
			2060502	Layanan Pengendalian Penyakit TBC	177.678.000	177.678.000	100,00%

	Program	Kegiatan	Output Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi s.d Desember	Persentase Kumulatif (%)
12		2061 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	2061515	SDM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang Meningkatkan Kualitasnya	351.545.000	316.750.000	90,10%
			2061516	Deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	1.437.131.000	1.167.378.000	81,23%
			2061517	Layanan Pengendalian Konsumsi Rokok	233.660.000	226.610.000	96,98%
13		5837 Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5837002	Sumber Daya Manusia yang berkualitas bidang Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	208.317.000	196.790.000	94,47%
Jumlah					3.197.388.000	2.857.371.000	89,37%
14		2064 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	2064504	Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	133.175.000	128.258.000	96,31%
			2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065506	Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	600.388.000
15	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2067 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	2067505	Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang di bina	167.977.000	163.628.000	97,41%
16							
Jumlah					901.540.000	864.167.448	95,85%
17	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2067 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2076501	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	129.009.000	101.004.400	78,29%

	Program	Kegiatan	Output Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi s.d Desember	Persentase Kumulatif (%)
18	(PPSDMK)		2076505	Pelatihan Strategis Sumber Daya Manusia Kesehatan	792.768.000	629.619.600	79,42%
		2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	2078601	Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	274.494.000	273.343.000
Jumlah					1.978.941.000	1.003.967.000	50,73%
Grand Total Dukungan Anggaran SPM Dana Dekonsentrasi (APBN)					11.862.687.000	10.303.372.152	
Total Anggaran Dana Dekonsentrasi (APBN) TA 2019					15.897.847.000	14.790.679.991	
(%)					74,62%		

4.2.5 DUKUNGAN PERSONIL

a. PNS

No	Klasifikasi	Dinas	Suku Dinas						Jumlah
			Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	
A	Golongan (Jumlah)								
	Golongan IV	15	69	63	98	155	138	52	590
	Golongan III	158	162	149	230	365	324	122	1510
	Golongan II	27	443	406	627	997	886	332	3718
	Golongan I	0	3	2	1	4	5	0	15
B	Eselon (Jumlah)								
	Eselon II	2	3	1	1	1	3	0	11
	Eselon III	6	35	24	20	32	44	4	165
	Eselon IV	18	33	17	23	31	29	9	160
	Fungsional	3	396	362	558	913	816	295	3343
	Staf	171	210	216	354	544	461	198	2154
C	Pendidikan (Jumlah)								
	S3	0	0	1	0	0	1	0	2
	S2	58	99	90	146	222	197	74	886
	S1	66	193	184	274	448	387	145	1697

No	Klasifikasi	Dinas	Suku Dinas						Jumlah
			Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	
	Diploma	49	213	195	298	474	425	159	1813
	SLTA	26	168	149	231	367	332	128	1401
	SLTP	1	4	2	5	8	11	0	31
	SD	0	0	0	2	2	1	0	5

4.2.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja bidang kesehatan tahun 2020 tidak luput dari adanya berbagai permasalahan dan kendala. Berikut permasalahan dan kendala yang dimaksud pada tahun 2020 :

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Faktor Pendorong

- ✓ Layanan yang terpisah dengan layanan infeksius
- ✓ Prosedur pelaksanaan ibu hamil, melahirkan, nifas, dan bayi baru lahir sudah mengikuti protokol kesehatan

b. Faktor Penghambat

- ✓ Pemberlakuan PSBB, menyebabkan sasaran memilih migrasi ke kampung halaman
- ✓ Pembatasan kunjungan ke fasilitas kesehatan akibat pandemi

c. Rencana Tindak Lanjut

- ✓ Melakukan edukasi, pemanfaatan buku KIA dan promosi kesehatan melalui metode daring
- ✓ Pemantauan ibu hamil menggunakan alat komunikasi sms/wa atau melalui aplikasi yang sudah dikembangkan oleh beberapa puskesmas kecamatan di DKI Jakarta

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a. Faktor Pendorong

- ✓ Layanan yang terpisah dengan layanan infeksius

- ✓ Prosedur pelaksanaan ibu hamil, melahirkan, nifas, dan bayi baru lahir yang mengikuti protokol kesehatan
 - b. Faktor Penghambat
 - ✓ RS rujukan yang bisa menangani Covid pada ibu bersalin masih terbatas
 - ✓ Kekhawatiran ibu bersalin untuk bersalin di fasilitas kesehatan
 - c. Rencana Tindak Lanjut
 - ✓ Penyiapan ruang isolasi persalinan di puskesmas untuk menangani ibu bersalin dengan Covid yang tanpa gejala dan tidak mendapatkan RS rujukan
 - ✓ Penyiapan ruang persalinan isolasi di puskesmas
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**
- a. Faktor Pendorong
 - ✓ Layanan yang terpisah dengan layanan infeksius,
 - ✓ Prosedur pelaksanaan ibu hamil, melahirkan, nifas, dan bayi baru lahir yang mengikuti protokol kesehatan
 - b. Faktor Penghambat
 - ✓ Pembatasan kunjungan ke fasilitas kesehatan akibat pandemi
 - c. Rencana Tindak Lanjut
 - ✓ Melakukan edukasi, pemanfaatan buku KIA dan promosi kesehatan melalui metode daring
 - ✓ Pemantauan bayi baru lahir menggunakan alat komunikasi sms/wa atau melalui aplikasi yang sudah dikembangkan oleh beberapa puskesmas kecamatan di DKI Jakarta
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita**
- a. Faktor Pendorong
 - ✓ Pemantauan perkembangan balita sudah dilakukan via daring
 - b. Faktor Penghambat
 - ✓ Posyandu tutup dan belum semua ibu balita mampu melakukan pemantauan tumbuh kembang secara mandiri

- ✓ Tidak semua ibu balita mempunyai alat pengukur berat badan anak
- ✓ Belum optimal sosialisasi tatacara pemntauan mandiri di rumah menggunakan Buku KIA

c. Rencana Tindak Lanjut

- ✓ Melakukan mapping nakes terlatih MTBS dan mengarahkan Puskesmas untuk melakukan kala karya MTBS
- ✓ Memperkuat kerjasama dengan Lintas Sektor dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan untuk mengoptimalkan peran guru PAUD dan orang tua dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak pra sekolah secara mandiri yang pemantauannya didampingi oleh nakes secara daring melalui *whats app group*, *video conference* , dll.

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

a. Faktor Pendorong

- ✓ Pencatatan dan pemeriksaan melalui daring

b. Faktor Penghambat

- ✓ Masih terdapat sekolah yang menolak pelaksanaan skrining kesehatan bagi peserta didiknya.
- ✓ Dampak pandemi sekolah ditutup sehingga pemeriksaan berkala terhambat

c. Rencana Tindak Lanjut

- ✓ Berkoordinasi aktif dengan lintas sektor terkait (Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah) dari tingkat provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan.

6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

a. Faktor Pendorong

b. Faktor Penghambat

- ✓ Berkurangnya kunjungan pasien di masa Pandemi.
- ✓ SDM terkonsentrasi dalam kegiatan penanggulangan covid
- ✓ Tidak meratanya kemampuan petugas dalam melaksanakan penatalaksanaan Pandu PTM
- ✓ Pengurangan anggaran dimasa Pandemi (efisiensi)

- ✓ Keterbatasan APD
 - ✓ Perubahan pola/ alur penanganan pasien dimasa pandemic
 - ✓ Keterbatasan dalam melakukan monev/ supervisi langsung Sudinkes ke puskesmas
 - ✓ Perubahan kebiasaan masyarakat di masa pandemi
- c. Rencana Tindak Lanjut
- ✓ Advokasi untuk penyusunan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum dalam penanggulangan PTM, khususnya dalam pelaksanaan SKRINING USIA PRODUKTIF yang tidak hanya menjadi urusan Kesehatan tetapi menjadi tanggungjawab bersama seluruh pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - ✓ Advokasi dalam pembiayaan untuk operasional Posbindu bagi kader, selayaknya UKBM lainnya yang mendapat bantuan operasional, yaitu Posyandu.

7) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis

- a. Faktor Pendorong
- ✓ Ketersediaan tenaga yang kompeten dalam pelayanan TBC
 - ✓ Ketersediaan logistik untuk dilakukan pemeriksaan TBC
 - ✓ Ketersediaan alat TCM
 - ✓ Ketersediaan sistem pencatatan dan pelaporan TBC
- b. Faktor Penghambat
- ✓ Tantangan yang bisa terjadi adalah mutasi petugas dan kendala server pencatatan pelaporan
- c. Rencana Tindak Lanjut
- ✓ Penguatan kepada faskes dalam upaya penemuan kasus TBC
 - ✓ Peningkatan kapasitas/refreshing petugas TBC
 - ✓ Koordinasi dengan tim IT Subdit Tuberkulosis Kemenkes jika terjadi kendala server pencatatan dan pelaporan TBC

8) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

a. Faktor Pendorong

- ✓ LSM melaksanakan Penjangkauan populasi kunci dengan prokes
- ✓ Pemeriksaan HIV pada Ibu Hamil dan Pasien TB tetap berjalan
- ✓ Dukungan APD dari Kemkes untuk pelaksanaan program HIV

b. Faktor Penghambat

- ✓ Lokasi-lokasi populasi kunci tutup karena PSBB
- ✓ Klien-klien yang khawatir untuk akses layanan
- ✓ Pembatasan kunjungan di layanan kesehatan

c. Rencana Tindak Lanjut

- ✓ Kebijakan pelaksanaan program HIV di masa Pandemi COVID-19
- ✓ Juknis pelaksanaan Mobile Testing di masa Pandemi COVID-19
- ✓ Reservasi kunjungan untuk ke layanan Kesehatan

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten kota
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- d. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Penerima layanan dasar :

- a. penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;
- b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air;
- c. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum;
- d. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Mutu pelayanan dasar :

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana Sub Urusan Pemerintahan

Bidang Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

4.3.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

SPM yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air terdiri dari SPM sub urusan air bersih dan air limbah. Target pemenuhan SPM kedua urusan tersebut tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Pada tahun 2020, dilakukan perubahan target RPJMD dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19. Rincian target pemenuhan SPM dalam RPMD 2017-2022 dan perubahan RPJMD 2017-2022 ditunjukkan pada **Tabel 4.1** sebagai berikut :

Tabel 4.1 Target pemenuhan SPM sub urusan air bersih dan air limbah Provinsi DKI Jakarta pada RPJMD dan perubahan RPJMD 2017-2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target (RPJMD 2017-2022)	Target (Perubahan RPJMD 2017-2022)
Meningkatnya akses sanitasi layak	Cakupan pelayanan air bersih	Cakupan pelayanan air bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan PDAM dan penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan perpipaan PDAM. Perhitungan jumlah penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan PDAM yaitu : Volume produksi IPA selama 1 tahun x 60 liter/hari (kebutuhan air bersih per orang per hari pada perkotaan) x 365 hari Penggunaan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan yang terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS). - penduduk perkotaan = 120L/hari/kapita - penduduk pedesaan = 60L/hari/kapita (SNI 19-6728.1-2002). Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data bappenas.	2018 : 60,99 % 2019 : 63,65 % 2020 : 66,09 % 2021 : 73,69 % 2022 : 79,61 %	2018 : 60,99 % 2019 : 63,65 % 2020 : 63,65 % 2021 : 63,65 % 2022 : 64,00 %

Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target (RPJMD 2017-2022)	Target (Perubahan RPJMD 2017-2022)
	Cakupan pelayanan air limbah	Cakupan layanan pengelolaan air limbah adalah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem perpipaan ditambah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem non perpipaan. Cakupan layanan pengolahan air limbah dihitung berdasarkan jumlah orang yang dilayani dibagi dengan jumlah penduduk DKI Jakarta. Asumsi cakupan pelayanan air limbah perpipaan adalah 1 Ruang Tangga terdiri dari 5 orang. Asumsi cakupan pelayanan air limbah dengan non perpipaan adalah, 1 orang = 10 m ² dan 1 kali sedot/KK = 1,5 m ³ . Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data Bappenas 2010-2035.	2018 : 15,93% 2019 : 17,04 % 2020 : 20,49 % 2021 : 23,00 % 2022 : 26,44 %	2018 : 15,93% 2019 : 17,04 % 2020 : 18,89 % 2021 : 19,99 % 2022 : 21,26 %

4.3.3 REALISASI

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	100%	64.33%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota	100%	17,75%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
3	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	100%	64.33%

B. Mutu Pelayanan Dasar

1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pelayanan SPAM lintas Kabupaten Kota	10,645,500	6,848,161	3,797,339	64,33

2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pelayanan SPAL-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah perdesaaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan	10,645,500	1,552,352	8,755,526	14,58

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
2.	Pelayanan Penyediaan Prasarana dan / atau Jasa melalui SPAL-T dengan kualitas pelayanan akses aman	10,645,500	337,622	8,755,526	3,17

3) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	10,645,500	6,848,161	3,797,339	64,33
2.	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan		*1.950		

*Data kapasitas BWRO di Jakarta Utara, yakni RO Marunda melayani \pm 280 kk (ekuivalen \pm 1680 orang penduduk) dan RO Kalibaru \pm 45 KK (ekuivalen \pm 270 orang penduduk)

4) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di	*n/a	*n/a	*n/a	*n/a

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
	wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha				
2.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	10,645,500	337,622	8,755,526	3,17
3.	Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	10,645,500	1,552,352	8,755,526	14,58

*n/a dikarenakan wilayah Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan wilayah pedesaan dengan kepadatan < 25 jiwa/ha

4.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Untuk mendukung terlaksananya pemenuhan SPM, Dinas Sumber Daya Air didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta yang ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum	640.773.069.213	42.196.197.717	38.408.436.284
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	208.641.464.822	37.984.636.931	33.885.108.331

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan yang signifikan antara anggaran murni dan anggaran perubahan tahun 2020 pada kegiatan yang mendukung pemenuhan SPM sub urusan air bersih dan air limbah. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat banyak kegiatan yang mendukung pemenuhan SPM tersebut mengalami refocusing anggaran dan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020.

4.3.5 DUKUNGAN PERSONIL

Sumber daya manusia (Pegawai) yang ada di Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Sumber Daya Air Lima Wilayah Kota Administrasi dan Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri dari 482 orang PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian jumlah PNS Dinas Sumber Daya tahun 2020

NO	BIDANG/UNIT	Jumlah Total Per Unit/Bidang
	DINAS	
1	Sekretariat	40
2	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	19
3	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	22
4	Bidang Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai	19
5	Bidang Pengelolaan Air Limbah	23

6	Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air	12
7	Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air	12
8	Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air	14
9	Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air	10
JUMLAH DINAS		171
SUKU DINAS		
10	SDSDA Jakarta Pusat	62
11	SDSDA Jakarta Utara	59
12	SDSDA Jakarta Barat	55
13	SDSDA Jakarta Selatan	53
14	SDSDA Jakarta Timur	64
15	SDSDA Kepulauan Seribu	18
JUMLAH SUDIN		311
Jumlah Dinas dan Suku Dinas		482

Tabel 4.5 Rincian jumlah PNS Dinas Sumber Daya tahun 2020 berdasarkan jenjang pendidikan

NO	BIDANG/UNIT DINAS	Jenjang Pendidikan							TOTAL
		SD	SMP sederajat	SMA sederajat	D.III	S.1	S.2	S.3	
1	Sekretariat	0	1	15	4	15	5	0	40
2	Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase	0	0	9	0	5	5	0	19
3	Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih	0	1	5	1	12	3	0	22
4	Bidang Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai	0	0	5	0	12	2	0	19
5	Bidang Pengelolaan Air Limbah	0	0	7	2	10	4	0	23
6	Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian Sumber Daya Air	0	1	3	0	8	0	0	12
7	Unit Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air	0	1	6	1	3	1	0	12

NO	BIDANG/UNIT	Jenjang Pendidikan							TOTAL
	DINAS	SD	SMP sederajat	SMA sederajat	D.III	S.1	S.2	S.3	
8	Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air	0	0	4	1	7	2	0	14
9	Unit Pengadaan Tanah Sumber Daya Air	0	0	5	1	4	0	0	10
JUMLAH DINAS		0	4	59	10	76	22	0	171
SUKU DINAS									
10	SDSDA Jakarta Pusat	1	2	11	9	33	6	0	62
11	SDSDA Jakarta Utara	3	3	28	7	16	2	0	59
12	SDSDA Jakarta Barat	2	6	13	8	23	3	0	55
13	SDSDA Jakarta Selatan	0	2	16	10	21	4	0	53
14	SDSDA Jakarta Timur	0	2	22	10	22	8	0	64
15	SDSDA Kepulauan Seribu	0	0	7	1	8	2	0	18
JUMLAH SUDIN		6	15	97	45	123	25	0	311
Jumlah Total Per Jenjang Pendidikan									482

Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Dinas Sumber Daya Air dan Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta adalah pegawai yang berkontrak kerja perorangan dengan Dinas dan Suku Dinas untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas dan Suku Dinas Sumber Air Provinsi DKI. Rekapitulasi jumlah pegawai Non PNS/Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Dinas Sumber Daya Air per Maret 2021 berjumlah 8029 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rincian Jumlah pegawai Non PNS/PJLP Dinas Sumber Daya Air tahun 2020

NO.	POSISI	SEKRETARIAT	UPPPP	ALKAL	PUSDATIN	JP	JU	JB	JS	JT	P.1000	JUMLAH
1	Geographic Information System				3			1				4
2	Juru Gambar	61				15	6	8	12	8	4	114
3	Juru Ukur (Kelas D)		22				1		2	4		29
4	Laboran		6									6

5	Pengemudi (Alat Berat)			202		2	7	9	4	2		226
6	Pengemudi (Kendaraan Operasional Lapangan SIM A)	9		1			1		16	3	2	32
7	Pengemudi (Kendaraan Operasional Lapangan SIM B)	2		412		16	24	32	7	2		495
8	Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center)	8			36	12	7	10	31	9		113
9	Petugas Instalasi Pengolahan Air Limbah					12	33	27	15	27	72	186
10	Petugas Keamanan (Rawan)					18	14	11	36	20		99
11	Petugas Keamanan (Sedang)	8		19								27
12	Petugas Kebersihan Dalam Gedung	6		7				2				15
13	Petugas Kebersihan Luar Gedung		3	37		947	766	904	607	849	166	4,279
14	Petugas Mekanikal Elektrikal (Bengkel)			38		23	6	8		3		78
15	Petugas Pelelangan	78				21	30	30		51	25	235
16	Petugas Penerima Tamu (Loket, Front Office)	1							2			3
17	Petugas Pengiriman	4				2	1	1		2		10
18	Petugas Penunjang Juru Ukur		42			36	37	18	52	25	17	227
19	Petugas Pompa Air					285	514	558	296	149		1,802
20	Petugas Reverse Osmosis						4				45	49
	SUBTOTAL DSDA	177	73	716	39	1389	1451	1619	1080	1154	331	8029

4.3.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

a. Air Bersih

untuk tahun anggaran 2020 terkait alokasi anggaran air bersih dan air limbah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Optimalisasi dan Efisiensi Anggaran. Hal tersebut disebabkan turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta realokasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19 di Ibu Kota, dan menunggu hasil BED (Basic Engineering Design) dari PD. PAM Jaya, dan Dinas Sumber Daya Air telah bersurat kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Penyampaian Ketidakpastian Proyek

Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi SPAM Jatiluhur I dalam Penerbitan Obligasi Daerah dengan Nomor Surat : 854/-1.774.126 Tanggal 19 Februari 2020.

Kebutuhan akan air merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, dari segi kebutuhan fisik manusia. Tubuh manusia terdiri dari ± 60 % air. Asupan cairan pun harus terpenuhi agar metabolisme tubuh dapat berfungsi dengan baik, tidak terkecuali untuk menghindari dehidrasi. Kedua, dari segi kebutuhan aktivitas sehari-hari, manusia membutuhkan pelarut tersebut untuk memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Permasalahan dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari akan berdampak pada kesehatan manusia. Inilah yang menjadi perkara besar, mengingat masalah air bersih di DKI Jakarta.

Terkait dengan hal tersebut di atas dilihat dari perjalanan pengembangan SPAM di Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Daerah mencanangkan suatu upaya pemenuhan akses aman air minum untuk seluruh warga di DKI Jakarta yang tersurat dalam RPJMD tahun 2017-2022. Pemerintah mendefinisikan akses aman air minum sebagai proporsi masyarakat (jiwa terlayani) yang memiliki akses air minum yang terlindungi yang meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, Penampung Air Hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindungi, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan/atau pembuangan sampah. Air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui mobil tanki, air sumur tidak terlindungi dan mata air tidak terlindungi tidak termasuk akses aman air minum. Meskipun demikian, pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan masih terbatas, yaitu hanya 64,33 % belum mencapai target yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan capaian 100% dimana kondisi ini disebabkan belum terselesainya proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I, walaupun pembangunan beberapa IPA pada tahun 2020 yakni IPA Waduk Tomang Barat dan IPA Pompa Ancol telah terselesaikan, Diharapkan setelah proyek tersebut selesai pasokan air baku bertambah, maka akan dapat memperluas sistem pipanisasi ke wilayah-wilayah yang saat ini belum terlayani.

b. Air Limbah

Sarana dan prasarana pengolahan air limbah (sewerage system) baik melalui sistem pengolahan ditempat (onsite treatment) ataupun melalui sistem pengolahan terpusat (offsite

treatment) di Provinsi DKI Jakarta saat ini masih sangat minim. Hal itu terlihat dari cakupan air limbah perpipaan pada tahun 2020 baru mencapai 17,75%. Hal ini dikarenakan beberapa kendala dalam pengelolaan air limbah permukiman secara terpusat antara lain disebabkan peraturan perundangan belum mendukung, peran serta masyarakat yang masih kurang, faktor pembiayaan yang cukup tinggi, lembaga/institusi pengelola yang masih tumpang tindih serta lemahnya aspek teknologi.

Terkait dengan pemenuhan SPM sub urusan air limbah tahun 2020, Dinas Sumber Daya Air sebenarnya telah merencanakan untuk melaksanakan pembangunan pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) dan pembangunan SPALD-T Skala Permukiman melalui Sistem Perpipaan di 22 lokasi dan Interceptor di 13 lokasi waduk. Namun akibat pandemi COVID-19 kegiatan tersebut mengalami refocusing anggaran, sehingga pembangunannya tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020. Dinas Sumber Daya Air hanya dapat melaksanakan pembangunan SPALD-T pada 2 lokasi di Kepulauan Seribu yakni SPALD-T Pulau Kelapa Dua dan SPALD-T Pulau Sabira dengan kapasitas kecil.

2. Solusi

a. Air Bersih

Untuk memenuhi target cakupan pelayanan air bersih di provinsi DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air akan terus melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan pembangunan SPAM Jatiluhur I dan SPAM Waduk Karian, pembangunan IPA serta waduk air baku untuk meningkatkan jumlah debit atau kapasitas air baku dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat.

b. Air Limbah

Terkait dengan pemenuhan target SPM sub urusan air limbah. Dinas Sumber Daya Air juga akan terus melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan pembangunan terkait Pembangunan *Jakarta Sewerage System*

(JSS) dan memastikan ketersediaan anggaran dalam melaksanakan pembangunan SPALD-T skala permukiman untuk memenuhi pelayanan air limbah di Provinsi DKI Jakarta.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi.

Penerima Pelayanan Dasar :

- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

4.4.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah 100% (seratus persen)

4.4.3 REALISASI

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	100%	100%

- a. Pada Tahun Anggaran 2020 tidak ada satupun surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan penetapan bencana meskipun pada beberapa waktu diantaranya tanggal 1 Januari 2020 telah terjadi Banjir di beberapa sebaran lokasi di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu Pelayanan Minimal dalam urusan Bidang Perumahan dalam hal Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi tidak ada satupun rumah tangga yang menjadi sasaran target

pelayanan. Sehingga pencapaian atas target hal tersebut di atas dipenuhi sebesar 100% (seratus persen).

$$100 \% = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana ditangani pada tahun 2020 (0)}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020}} \times 100 \%$$

- b. Pada Tahun Anggaran 2020, berdasarkan hasil koleksi data pada perangkat daerah terkait, maka tidak ada kegiatan fasilitasi relokasi ke rumah susun sewa yang dimiliki dan di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lokasi berikut di bawah :
- 1) *“Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”* antara lain: (1) sempadan rel kereta api; (2) bawah jembatan; (3) daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); (4) Daerah Sempadan Sungai (DSS); (5) daerah rawan bencana, dan; (6) daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
 - 2) Daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.

Pembangunan rumah susun umum yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sepanjang Tahun Anggaran 2020 tidak ada yang secara khusus diperuntukkan bagi lokasi sebagaimana tercantum pada dua butir tersebut di atas. Adapun sejumlah pembangunan rumah susun sewa yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan bentuk penyediaan hunian bagi sasaran masyarakat yang memenuhi kriteria masyarakat terprogram maupun masyarakat tidak terprogram/ umum yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur Nomor 111 tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sewa, dimana di dalamnya terdapat beberapa kriteria diantaranya meliputi :

- 1) Masyarakat terprogram adalah masyarakat yang terdampak oleh : (1) program pembangunan untuk kepentingan umum; (2) bencana alam; (3) penertiban ruang kota; dan/atau (4) kondisi lain yang sejenis.
- 2) Masyarakat tidak terprogram/ umum adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan penghunian.

Pada kedua kelompok masyarakat tersebut mendapatkan keringanan dalam pembayaran sewa unit hunian dengan memperoleh pengurangan tarif sewa yang besarnya tergantung dari lokasi unit rumah susun, jenis rumah susun dan kelompok masyarakat penghuni.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka pada lokasi kegiatan berikut di bawah :

- 1) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
- 2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau;
- 3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses;

yang perlu dilakukan difasilitasi dengan (1) penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; (2) pemberian subsidi uang sewa; (3) pemberian fasilitas rumah layak.

Untuk itu dapat dilaporkan bahwa :

a. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) :

- 1) Lokasi Program Pemerintah yang belum dapat difasilitasi
Beberapa lokasi yang menjadi target Kegiatan Strategi Daerah (KSD) memiliki sasaran sejumlah masyarakat yang perlu direlokasi baik keluar dari kawasan asal maupun tetap di dalam kawasan asal guna dilakukannya pemanfaatan bidang tanah di atas hunian asal seperti pada program Penataan Kawasan Muara Angke, Jakarta Utara (lahan milik Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta) dan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpadu (*Jakarta Sewerage System/ JSS*) Zona 2 dan Zona 5 (Kegiatan Strategis Daerah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta).

Pada kegiatan Penataan Kawasan Muara Angke, Jakarta Utara sampai saat ini belum terdapat keputusan final antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat yang bertinggal di dalam kawasan terkait dengan titik lokasi hunian baru di dalam kawasan dan bentuk pola hunian yang akan dijadikan hunian baru. Sementara pada program Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpadu *Jakarta Sewerage System*, masih membutuhkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat terkait dengan skema *shelter* (hunian sementara bagi masyarakat) selama pembangunan hunian baru dilakukan dan skema rumah susun yang akan dibangun. Hal tersebut masih perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan pembahasan terkait

dengan lokasi, pola bentuk hunian dan bentuk kepemilikan. Mengingat kedua kegiatan tersebut berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga pendataan masyarakat terdampak akan dilakukan oleh Walikota Administrasi Jakarta Utara. Namun karena pada tahun 2019 kegiatan tersebut masih terkendala dalam kesepakatan dengan masyarakat maka pendataan terhadap masyarakat yang terdampak program pemerintah daerah belum dapat dilakukan.

- 2) Program Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi oleh SPM Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat difasilitasi melalui pelayanan penggantian hak atas penguasaan tanah dan/ atau bangunan umumnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan jalan dan pembangunan badan air pada Kali di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun laporan yang disampaikan baik oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta antara lain :

- Dinas Bina Marga : - (data tidak diperoleh)

- Dinas Sumber Daya Air;

Sejumlah 49 bidang tanah telah mendapatkan fasilitasi untuk Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan pada kegiatan Pengadaan Tanah di Dinas Sumber Daya Air pada tahun Anggaran 2019 dengan luas tanah yang dibebaskan seluas 18.823 m² dengan biaya pembebasan Rp. 93.786.789.954 dengan rincian :

- a) Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan sejumlah 7 Bidang;
- b) Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan sejumlah 2 Bidang;
- c) Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk pembebasan Kali Sekretaris sejumlah 3 Bidang;
- d) Kelurahan Pondok Rangan, Jakarta Timur untuk pembebasan Kali Sunter sejumlah 10 Bidang;
- e) Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk pembebasan Kali Sunter sejumlah 27 Bidang.
- f) Namun dalam hal informasi yang disampaikan tidak didapati keterangan jumlah rumah tangga atau masyarakat yang bertinggal di atas bidang tanah tersebut atau berupa tanah kosong.

- b. Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;
Pada kegiatan pengurangan kawasan kumuh atau peningkatan kualitas permukiman di Provinsi DKI Jakarta maka dapat disampaikan bahwa :
- 1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dua dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman atau dalam hal pengurangan kawasan kumuh yaitu melalui : (1) Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat; dan (2) Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Kedua ketentuan tersebut tidak mengatur untuk dilakukannya fasilitasi atas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan kepada rumah tangga/ masyarakat yang bertempat tinggal di dalam sasaran lokasi yang termuat di dalam ketentuan.
 - 2) Peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan metode *in-situ upgrading* sehingga rumah tangga/ masyarakat yang bertempat tinggal di dalam lokasi sasaran tidak direlokasi ke tempat hunian baru. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi berupa peningkatan prasarana dan sarana permukiman yang merupakan aset milik pemerintah daerah dan tidak menyentuh kepada aset milik privat rumah tangga/ masyarakat melalui kegiatan *Community Action Planning (CIP)* dan *Collaborative Implementation Program (CAP)*.
 - 3) Salah satu lokasi penataan dari sejumlah 21 (dua puluh satu) lokasi kampung yang ditetapkan di dalam Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, yaitu Kampung Akuarium, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara telah berproses sejak awal tahun 2018 untuk dilakukannya fasilitasi penyediaan hunian bagi rumah tangga yang bertinggal di dalam kawasan Kampung Akuarium. Namun sampai dengan saat ini pembangunan fisik dari penyediaan hunian tersebut belum terlaksana karena adanya berbagai macam pertimbangan dan kendala perizinan yang membutuhkan proses pelibatan para pihak yang beragam dan intensif. Merujuk pada kegiatan penataan 21 kampung yang didominasi oleh kendala dalam kepemilikan pertanahan maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Gugus Reforma Agraria melalui Keputusan

Gubernur 162 Tahun 2019 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria jo. Keputusan Gubernur No. 574 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Gubernur 162 Tahun 2019 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang bertugas untuk dapat memotret status kondisi pertanahan saat ini dan kemudian agar ditindaklanjuti dengan dilakukannya kajian terhadap seluruh aspek pertanahan pada seluruh lokasi yang terdapat dalam Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disampaikan bahwa pencapaian dalam pelayanan fasilitasi; (1) Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan; (2) Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa; dan (3) Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni sebesar 100%.

b. Penjelasan Tambahan :

Jumlah Rumah Tangga yang direlokasi ke Rumah Susun Sewa (rusunawa) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sewa sepanjang Tahun 2020 adalah sejumlah **64** Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Rumah Tangga yang difasilitasi direlokasi ke Rusunawa akibat bencana : tidak ada dikarenakan tidak ada satupun surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan penetapan bencana.
- 2) Rumah Tangga yang difasilitasi direlokasi ke Rusunawa akibat Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pembangunan untuk kepentingan umum berjumlah 64 Rumah Tangga/Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari wilayah dengan rincian :

No.	Wilayah Kota Administrasi	No. Surat Walikota	Tanggal Surat Walikota	Program	Jml KK	Rusunawa
1	Jakarta Utara (WJU)	1387/- 1.796.2	19 Oktober 2020	Pembangunan Tanggul Pengamanan NCICD	26 KK	Nagrak, Rorotan
2	Jakarta Timur (WJT)	2363/- 1.796	12 Oktober 2020	Normalisasi Kali Rawa Rengas RT. 008 RW. 08	17 KK	Rawa Bebek, Cakung Barat

3	Jakarta Selatan (WJS)	730/- 1.796.35	28 September 2020	Normalisasi Kali Ciliwung	21 KK	Pengadegan
---	-----------------------	-------------------	-------------------------	------------------------------	-------	------------

$$100 \% = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan (tidak diketahui) + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa (0) + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni (kriteria SPM = 0)}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan (data tidak diketahui)}} \times 100 \%$$

B. Mutu Pelayanan Dasar

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
3.	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
4.	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%

- 2) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau	0	0	0	100%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
	Bangunan				
2.	Penyediaan Rumah Layak Huni	64	64	0	100%

3) Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
3.	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
4.	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%

4) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0	100%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
2.	Penyediaan Rumah Layak Huni (untuk warga relokasi atas Rekomendasi dari Walikota Jakarta Utara)	26 KK	26 KK	0	100%
3.	Penyediaan Rumah Layak Huni (untuk warga relokasi atas Rekomendasi dari Walikota Jakarta Selatan)	21 KK	21 KK	0	100%
4.	Penyediaan Rumah Layak Huni (untuk warga relokasi atas Rekomendasi dari Walikota Jakarta Timur)	17 KK	17 KK	0	100%

Jumlah Rumah Tangga yang direlokasi ke Rumah Susun Sewa (rusunawa) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sewa sepanjang Tahun 2019 adalah sejumlah **64** Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Rumah Tangga yang difasilitasi direlokasi ke Rusunawa akibat Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pembangunan untuk kepentingan umum berjumlah 65 Rumah Tangga/ Kepala Keluarga (KK) yang keduanya berasal dari wilayah dengan rincian :
 - 26 KK relokasi akibat Program Pembangunan Tanggul NCICD Jakarta Utara, ke Rusun Nagrak dan Rusun Rorotan di bawah Pengelolaan Unit Pengelola Rumah Susun Semper, tanggal masuk 22 Oktober 2020 melalui Surat Penetapan Nomor 3847/-1.796.35 tanggal 22 Oktober 2020
 - 18 KK relokasi akibat Program Normalisasi Kali Rengas, ke Rusunawa Rawa Bebek dan Rusunawa Cakung Barat, tanggal masuk 19 Oktober 2020 melalui Surat Penetapan Nomor 3797/-1.796.35 tanggal 19 Oktober 2020
 - 21 KK relokasi akibat Program Normalisasi Kali Ciliwung, ke Rusunawa Pengadegan di bawah pengelolaan Unit Pengelola

Rumah Susun Jatinegara Barat, tanggal masuk..... melalui Surat Penetapan Nomor 4136/-1.796.35 tanggal 18 November 2020

- 2) Rumah Tangga yang difasilitasi direlokasi ke Rusunawa akibat kegiatan penertiban di tingkat Wilayah Kota Administrasi berjumlah 64 Rumah Tangga / Kepala Keluarga (KK) dengan rincian :
 - a) 26 KK ke Rusunawa Nagrak dan Rusunawa Rorotan (UPRS Semper)
 - b) 18 KK ke Rusunawa Rawa Bebek (UPRS Rawa Bebek) dan ke Rusunawa Cakung Barat (UPRS Cakung Barat)
 - c) 21 KK ke Rusunawa Pengadegan (UPRS Jatinegara Barat)

4.4.4 ALOKASI ANGGARAN

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
1.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	1.347.349.977.756	451.607.569.458	405.739.998.174
2.	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	-	-	-

Pada tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengajukan anggaran untuk studi kelayakan dan appraisal di 10 lokasi, namun dengan adanya Surat Edaran Nomor 46/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka anggaran tersebut tidak dilaksanakan.

4.4.5 DUKUNGAN PERSONIL

No	Klasifikasi	Jumlah
1	2	3
A.	Golongan (Jumlah)	256
	1. Golongan IV	40

	2. Golongan III	171
	3. Golongan II	41
	4. Golongan I	4
B.	Eselon (Jumlah)	83
	1. Eselon I	0
	2. Eselon II	0
	3. Eselon III	24
	4. Eselon IV	59
	5. Eselon V	0
	5. Fungsional	0
	6. Staf	208
C	Pendidikan (Jumlah)	291
	1. S3	4
	2. S2	40
	3. S1	163
	4. Diploma	16
	5. SLTA	61
	6. SLTP	5
	7. SD	2

4.4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

Adanya ketentuan khususnya pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah 60 m². Ketentuan ini dinilai sangat sulit diterapkan di Kota-kota besar layaknya Kota Jakarta mengingat ketersediaan lahan (tanah) sebagaimana syarat pemenuhan SPM tersebut untuk diimplementasikan. Relokasi yang sudah berjalan saat ini

Perlu pertimbangan and review terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya spesifikasi pemenuhan SPM terhadap pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana yang mencantumkan spesifikasi luas tanah 60 m².

khususnya bagi Kota dengan lahan kosong minim layaknya Kota Jakarta.

b. Solusi

Perlu pertimbangan dan review terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya spesifikasi pemenuhan SPM terhadap pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana yang mencantumkan spesifikasi luas tanah 60 m². khususnya bagi Kota dengan lahan kosong minim layaknya Kota Jakarta.

4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal penerapan SPM bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dibagi ke dalam 3 (tiga) sub Bidang Urusan yang diatur lebih lanjut melalui :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Bencana Daerah :

- a. pelayanan informasi rawan bencana
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran mencakup pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi (Provinsi)
- b. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kabupaten/Kota)

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi.

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Perangkat Daerah Pelaksana Sub Urusan Bencana Daerah
2. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Pelaksana Sub Urusan Kebakaran Daerah
3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebagai Perangkat Daerah Pelaksana Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.5.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Target Capaian Pencapaian SPM adalah 100 % (seratus persen).

4.5.3 REALISASI

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100%	100%
5.	Pelayanan informasi rawan bencana	Mengukur jumlah kelurahan rawan bencana yang diberikan informasi kebencanaan *catatan : Pertemuan via zoom meeting peserta adalah aparatur dengan pihak kelurahan terkait materi jakarta aman,112,informasi kebencanaan oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan (Pada Tahun 2020 dianggarkan namun terkena rasionalisasi)	82	68
6.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Penganggulangan Bencana *catatan : Dilaksanakan sosialisasi tanpa anggaran.	1.600	1.750
7.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana *catatan : Penyelamatan dan	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
		evakuasi korban bencana terdiri dari : 1. Tim BPBD pada pemulasaran jenazah 2. Korban banjir 3. Korban kebakaran 4. Korban Tanah longsor		
8.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	99,34%

Data Rekapitulasi Kebakaran (periode tahun 2020):

- Frekuensi Kebakaran : 1.505 Kali (Jan-Des 2020)
- Kebakaran diatasi oleh petugas (*response time*) : 1.362 Kali
- Kebakaran diatasi oleh masyarakat : 133 Kali

Adapun Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran memiliki Indikator Utama Pencapaian Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Layanan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) cara perhitungan, yaitu :

$$a. \frac{\text{Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas pada Tahun 2020 dalam tingkat waktu tanggap (Response Time) oleh Petugas Pemadam (Dinas)}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran Tahun 2020}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.362}{1.505} \times 100\%$$

$$= 90,50\%$$

$$b. \frac{\text{Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas pada Tahun 2020 dalam tingkat waktu tanggap (Response Time) oleh Masyarakat}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran Tahun 2020}} \times 100\%$$

$$= \frac{133}{1.505} \times 100\%$$

$$= 8,84\%$$

Adapun nilai indikator pencapaian yaitu Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, didapat dari Nilai a + b.

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 **sebanyak 99, 34%** (90,50% + 8,84%)

Waktu Tanggap (*response time*):

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan Respons time adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman. Menurut, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012, bahwa waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi Indonesia tidak lebih dari 15 menit.

B. Mutu Pelayanan Dasar

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi Provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	100 %
2.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	100 %

- 2) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu Provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Penegakan Perda sesuai SOP	4.270	4.270	0	100 %
2.	Pelaksanaan penegakan Perda	4.270	4.270	0	100 %

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
	sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar				
3.	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	4.270	4.270	0	100 %

3) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi Kab/kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian	0	0	0	100%
2.	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian	0	0	0	100%

4) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu kabupaten/ kota

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Penegakan Perda sesuai SOP	382.959	382.959	0	100%
2.	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	382.959	382.959	0	100%
3.	Pelaksanaan penegakan	382.959	382.959	0	100%

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
	perda menggunakan Sarpras sesuai standar				

5) Pelayanan informasi rawan bencana

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	4 Dokumen	4 Dokumen	-	100
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	2.175.351 jiwa	- Jakarta Pusat : 79.823 - Jakarta Utara : 975.761 - Jakarta Barat : 684.695 - Jakarta Selatan : 97.462 - Jakarta Timur : 337.610 Total : 2.175.351 jiwa	-	100
3.	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	2.175.351 jiwa	2.175.351 jiwa	-	100
4.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	59.602 jiwa	59.602 jiwa	-	100
5.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100 titik	100 titik		100

6) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.175.351 jiwa	3.877.149 jiwa	-	178,23

7) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	95.249 jiwa	95.249 jiwa	-	100
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	95.249 jiwa	95.249 jiwa	-	100
3.	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	11.196.633 jiwa	11.196.633 jiwa	-	100
4.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1 Kali	1 Kali	-	100
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	95.249 jiwa	95.249 jiwa	-	100
6.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1 Kali	1 Kali	-	100

8) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	10.034	10.034	0	100%
2.	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0 *	0	0	100%

4.5.4 ALOKASI ANGGARAN

a. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Provinsi)	251.503.281.240	239.182.001.786	234.353.634.640
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Barat)	5.729.419.500	3.191.676.800	3.191.676.800
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Timur)	1.010.020.000	989.510.000	729.410.000
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Pusat)	4.917.717.950	3.410.244.650	3.033.474.650
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota	4.077.090.020	3.060.624.000	2.655.891.750

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
	Administrasi Jakarta Selatan)			
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Utara)	2.710.778.000	2.306.125.000	2.215.921.800
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)	309.682.120	264.675.364	262.857.000

b. Sub Urusan Bencana Daerah

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
1	Pelayanan informasi rawan bencana	14,679,464,054	2,701,731,629	2,506,387,891
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,242,524,457	484,391,187	420,558,963
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4,858,487,228	5,572,767,012	4,564,829,558

c. Sub Urusan Kebakaran Daerah

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
1	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	470.031.786.049	159.654.233.277	157.481.240.482

4.5.5 DUKUNGAN PERSONIL

a. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Kualifikasi	Satpol PP							Jumlah
		Provinsi	JP	JU	JB	JS	JT	P.1000	
A.	Golongan (Jumlah) - PNS	271	483	409	511	611	605	103	2993
	1. Golongan IV	18	4	2	4	3	3	2	36
	2. Golongan III	96	120	96	132	160	168	28	800

No	Kualifikasi	Satpol PP							Jumlah
		Provinsi	JP	JU	JB	JS	JT	P.1000	
	3. Golongan II	156	356	307	374	442	429	73	2.137
	4. Golongan I	2	4	6	5	6	7	0	30
B.	Eselon (Jumlah) - Gabungan	465	880	710	930	1.196	1132	151	5.464
	1. Eselon I	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Eselon II	2	0	0	0	0	0	0	2
	3. Eselon III	6	1	1	1	1	1	1	12
	4. Eselon IV	19	12	9	11	14	14	6	85
	5. Eselon V	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Fungsional POL PP	7	48	43	51	63	60	26	298
	7. Staf/pelaksana	260	425	370	447	555	525	75	2.657
	8. Arsiparis	3	0	0	0	0	0	0	2
	9. Pegawai Tidak Tetap (PTT)	127	238	170	307	379	368	17	1.606
	10. PJLP	42	156	117	113	184	164	26	802
C.	Pendidikan (Jumlah) - PNS	271	483	409	511	611	605	103	2.993
	1. S3	1	0	0	0	0	0	0	1
	2. S2	20	3	6	9	6	6	2	52
	3. S1	70	105	79	61	110	74	24	523
	4. Diploma	6	5	2	2	5	6	0	26
	5. SLTA	193	365	326	420	485	485	81	2.355
	6. SLTP	6	8	6	17	25	23	0	85
	7. SD	0	0	4	1	2	6	1	14

b. Sub Urusan Kebencanaan Daerah

1) PNS : 66 orang

NO.	KUALIFIKASI	BPBD
A.	Golongan	66
	1. Golongan IV	13
	2. Golongan III	34
	3. Golongan II	19
	4. Golongan I	-
B.	Eselon	66

	1. Eselon I	-
	2. Eselon II	-
	3. Eselon III	5
	4. Eselon IV	12
	5. Eselon V	-
	6. Fungsional	-
	7. Pelaksana	49
C.	Pendidikan	66
	1. S3	-
	2. S2	16
	3. S1	27
	4. Diploma	18
	5. SLTA	5
	6. SLTP	-
	7. SD	-

b. Non PNS : 74 orang

No	Nama	Jabatan
1	Priyanka Prajna Paramitha	Site Office Manager (SPV)
2	A.D.E Putri Madjida	Customer Relation (CR)
3	Dina Nurhidayati	Customer Relation (CR)
4	Ruqoyah	Community Manager
5	Ade Nurmalius Satria	Community Manager
6	Fakhri Adli	Community Manager
7	Ambar Sulistyo Ayu	Community Manager
8	Fadli Mabruhi	Community Manager
9	Hamdallah Perdana Putra	Community Manager
10	Benny Fernando Tampubolon	Community Manager
11	Omar Rijalulhaq	Community Manager
12	Lamhot Edward Sitorus	Community Manager
13	Azid Fathoni	Staff GIS
14	Wishal Mufidah Arfa	Staff GIS
15	Choirul Ridho Nurhuda	Computer Operator/Typist (SO1)
16	Dini	Computer Operator/Typist (SO1)
17	M. Fitroh	Computer Operator/Typist (SO1)
18	Horas Lumban Gaol	Computer Operator/Typist (SO1)
19	Muchtiyanto	Computer Operator/Typist (SO1)
20	Sharifa Ayu Raisa Magis	Computer Operator/Typist (SO2)
21	Ilham Febriza	Computer Operator/Typist (SO2)
22	Dwi Yudha Prakoso	Computer Operator/Typist (SO2)
23	Aulia Shofan Hidayat	Computer Operator/Typist (SO2)
24	Wiwid Haryo Yudanto	Computer Operator/Typist (SO2)

No	Nama	Jabatan
25	Agung Chrisnawan	Petugas Call Center
26	Dedi Damhudi	Petugas Call Center
27	Dwi Setiowati	Petugas Call Center
28	Kufuan	Petugas Call Center
29	Adinda Dwi Anisa	Petugas Call Center
30	Furi Sessanti	Petugas Call Center
31	Anggada	Petugas Call Center
32	Ari Syariat	Petugas Call Center
33	Agung Gunawan	Petugas Call Center
34	Alifani Amaliyah	Petugas Call Center
35	Desmanto	Petugas Call Center
36	Ari Astuti Hanifah	Petugas Call Center
37	Dede Nur Azmi	Petugas Call Center
38	Fiqih	Petugas Call Center
39	Edwin Syarif	Petugas Call Center
40	Eni Mulyani	Petugas Call Center
41	Hairul Amri Purba	Petugas Call Center
42	Kevin Antonio Situmeang	Petugas Call Center
43	Muhdar, S.Kep.Ns	Petugas Call Center
44	Nurhasanah	Petugas Call Center
45	Ola Novita Evilensia Sihaloho	Petugas Call Center
46	Stephanie Caroline	Petugas Call Center
47	Subkhan	Petugas Call Center
48	Therry Desmanto	Petugas Call Center
49	Saihot Simanungkalit	Petugas Call Center
50	Waode Mbolabola	Petugas Call Center
51	Heru Suprpto	Petugas Call Center
52	Megasari	Petugas Call Center
53	Monika	Petugas Call Center
54	Muhammad Faizal Ardiyansyah	Petugas Call Center
55	Muhammad Rifa'i	Petugas Call Center
56	Venny Friska H	Petugas Call Center
57	Zainudin	Petugas Call Center
58	Umar Riyanto	Petugas Kebersihan
59	Sukarsih	Petugas Kebersihan
60.	Ishak Lewi Yanuar	Petugas Logistik Kebencanaan
61.	Mufti Hendra	Petugas Logistik Kebencanaan
62.	Ahmad Wiharja	Petugas Logistik Kebencanaan
63.	Andrew Jonathan	Petugas Logistik Kebencanaan
64.	Azis Husaeny	Petugas Logistik Kebencanaan
65.	Debby Hasmika	Petugas Logistik Kebencanaan

No	Nama	Jabatan
66.	Dicky Mei Pujamara	Petugas Logistik Kebencanaan
67.	Dimas Maulana Fiddin	Petugas Logistik Kebencanaan
68.	Firli Ramadhan	Petugas Logistik Kebencanaan
69.	Hendi Prasetyo	Petugas Logistik Kebencanaan
70.	Ikrom	Petugas Logistik Kebencanaan
71.	Muhammad Rafi	Petugas Logistik Kebencanaan
72.	Wahyu Setiawan	Petugas Logistik Kebencanaan
73.	Zati Krida Nata	Petugas Logistik Kebencanaan
74.	Dede Maulana	Petugas Logistik Kebencanaan

c. Sub Urusan Kebakaran Daerah

1) PNS

No	Kualifikasi	Jumlah (orang)	Ket.
A.	Golongan		
	1. Golongan IV	24	
	2. Golongan III	1284	
	3. Golongan II	1261	
	4. Golongan I	2	
B.	Eselon		
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	1	
	3. Eselon III	12	
	4. Eselon IV	74	
	5. Eselon V	-	
	6. Fungsional	1	
	7. Pelaksana	2483	
C.	Pendidikan		
	1. S3	-	
	2. S2	82	
	3. S1	897	
	4. Diploma	27	
	5. SLTA	1556	
	6. SLTP	7	
	7. SD	2	
	TOTAL	2571	

2) Non PNS

Jabatan Non PNS	Jumlah
Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran (PJLP)	1756

Petugas Kebersihan	132
Petugas Keamanan	114
Petugas M&E	17
Tenaga Ahli Website	2
Petugas Museum	2
Penerima Tamu	2
TOTAL	2025

4.5.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Pengumpulan Data

1. Sub Urusan Bencana Daerah

Masalah :

Proses pengumpulan data memerlukan waktu karena sumber data banyak yang berasal dari setiap kelurahan yang dikumpulkan oleh masing-masing walikota, disisi lain BPBD Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pengumpulan data yang hasilnya sering berbeda sehingga perlu dilakukan validasi.

Solusi :

Dilakukan validasi yang memerlukan waktu karena adanya klarifikasi terhadap data yang berbeda.

b. Penghitungan Kebutuhan

1. Sub Urusan Bencana Daerah

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Jumlah kebutuhan buffer logistik adalah 1% dari jumlah penduduk, namun dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar melibatkan SKPD terkait seperti Dinas Sosial sehingga perlu dilakukan pembahasan bersama agar dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi tepat sasaran.

Solusi :

Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk kebutuhan logistik.

c. Perencanaan dan Penganggaran

1. Permasalahan

Hal yang menjadi masalah dalam penerapan SPM Trantibumlinmas sesuai Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, yaitu:

dalam melaksanakan layanan kerugian materi dan layanan pengobatan selama 1 (satu) tahun apabila warga negara terkena dampak kerugian akibat penegakan perda dan perkada, Satpol PP diwajibkan menganggarkan 2,5% dari anggaran operasional kegiatan Penegakan Perda & Perkada selama 1 (satu) tahun "**tidak dapat dilaksanakan**".

Hal ini dikarenakan :

- a) Mengingat fase perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2020 sudah dilakukan terlebih dahulu di awal tahun 2019 sebelum Per - Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 terbit (diundangkan pada 20 Februari 2019).
- b) Indikator kerugian ringan, sedang dan berat tidak ditetapkan dalam Permendagri Nomor 121 Tahun 2018;
- c) Penganggaran di Pemprov DKI Jakarta menggunakan Prinsip *Money Follow Program*, penganggaran layanan kerugian materi (semen, Batubata, pasir, dsb) dan pengobatan (plester, betadine, alkohol, biaya perawatan rumah sakit, dsb) tidak sejalan dengan output kegiatan penertiban.

2. Solusi

- a) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan surat kepada Kementerian Dalam Negeri RI nomor 1510/-1.751 tanggal 7 Oktober 2019 hal Permohonan Arahan Penerapan SPM Sub Ketenteraman Ketertiban Umum. Adapun tanggapan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI melalui surat NO. 341/-7427/MAK tanggal 4 Desember 2019 hal Penjelasan Penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu, Mekanisme Pemberian Layanan Kerugian

Materi dan Layanan Pengobatan yang memerlukan anggaran lebih dari 2,5% dari anggaran Operasional Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada selama setahun dapat dibiayai oleh anggaran yang tersedia di anggaran Pemerintah Daerah seperti di Pos Belanja Tidak Terduga yang dalam hal ini di Pemprov DKI Jakarta berada di bawah anggaran Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

- b) Perlu adanya revisi Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 mengingat belum jelasnya mekanisme penganggaran 2,5% dari anggaran Operasional Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada.
- c) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tingkat Kelurahan dan merekrut sebanyak 787 orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dengan harapan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih responsif.
- d) Tahun 2020 juga telah direncanakan kegiatan untuk penyusunan regulasi untuk penegakan Perda dan/atau Perkada serta kajian mengenai titik rawan ketentraman dan ketertiban umum.

d. Pelaksanaan

Sub Urusan Kebakaran Daerah

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas, khususnya terkait dengan masalah penanggulangan Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, baik dari faktor internal atau dari faktor eksternal antara lain :

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Permasalahan	Saran Solusi
1	Kemampuan koordinasi petugas dalam pola penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan	Peningkatan kapasitas personil melalui pendidikan dan pelatihan.

No	Permasalahan	Saran Solusi
	bencana dilapangan masih kurang terkoordinir dengan baik.	
2	Belum optimalnya kemampuan petugas dilapangan dalam penggunaan peralatan baik unit maupun pendukungnya.	Peningkatan kapasitas personil melalui pendidikan dan pelatihan.
3	Belum optimalnya tingkat kedisiplinan petugas baik pada saat jaga, tugas cadangan maupun pada saat tugas pemadaman kebakaran.	Peningkatan disiplin personil dan melakukan pengawasan serta monitoring terhadap personil.
4	Banyaknya petugas yang memasuki usia pensiun atau diatas 50 tahun.	Perlunya rekrutmen personil khusus tenaga operasional.
5	Keterampilan petugas PHL belum memenuhi standar.	Peningkatan kapasitas personil melalui pendidikan dan pelatihan.
6.	Kemampuan Petugas dalam Taktik dan Strategi Operasi Pemadaman belum optimal	Penerapan Insiden Command System dan terus melakukan evaluasi serta perbaikan
7.	Belum terciptanya iklim organisasi yang baik dan kompetitif	Perbaikan manajemen SDM , Seleksi Terbuka dalam perekrutan Jabatan jabatan operasional berdasarkan standar kualifikasi dan prosedur penilaian yang adil dan transparan sehingga mendorong iklim organisasi yang berprestasi dan kompetitif

b. Peralatan Pemadaman

No	Permasalahan	Saran Solusi
1	Belum optimalnya penggunaan dan perawatan dari peralatan yang dimiliki.	Peningkatan keterampilan personil dalam penggunaan peralatan.
2	Kerusakan mobil-mobil pompa yang membutuhkan perbaikan/pemeliharaan.	Perlunya percepatan waktu pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan
3	Kurangnya peralatan komunikasi dan kerusakan radio komunikasi yang dimiliki petugas	Perlunya pengadaan dan peningkatan perawatan secara berkala/kontinu terhadap peralatan komunikasi.

c. Sarana dan Prasarana

No	Permasalahan	Saran Solusi
----	--------------	--------------

1	Kurangnya ketersediaan pos – pos Damkar dan sektor – sektor Damkar untuk lokasi di tengah pemukiman penduduk sebagai ujung tombak upaya penanggulangan bahaya kebakaran.	Pembangunan pos – pos Damkar dan kantor - kantor sektor diperbanyak dan di tempatkan di lokasi - lokasi yang rawan bencana kebakaran.
2	Hydrant kebakaran yang ada kurang berfungsi dengan baik atau debit airnya tidak memenuhi standar. Dari total hidran sebanyak 1.349 buah, sejumlah 878 buah dalam kondisi baik, 411 buah kondisi rusak dan 60 hilang.	Pembenahan jalur hydrant yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang agar jalur hydrant kota mandiri / terpisah dengan jalur air untuk masyarakat umum agar debit air untuk hydrant kota sesuai dengan standart.

1. Faktor Eksternal

a. Masyarakat

No	Permasalahan	Saran Solusi
1	Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran masih kurang.	Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, dasa wisma, anggota ppsu / kelurahan agar lebih peduli terhadap ancaman bahaya kebakaran yang mungkin terjadi di lingkungan tempat mereka tinggal.
2	Kondisi dan situasi pada saat kejadian menghambat pelaksanaan operasi penanganan kejadian kebakaran, seperti sikap sebagian warga masyarakat yang cenderung destruktif, akses jalan ke dan menuju lokasi terhambat.	Perlunya sosialisasi bagi masyarakat dan pelatihan dalam bentuk gladi bagi masyarakat dan personel sesuai dengan rencana operasi di daerah tersebut.
3.	Masih banyaknya Masyarakat yang harus datang langsung ke Pos Damkar (1.309 kali) untuk melaporkan Kejadian sehingga informasi terlambat / lebih lambat diterima oleh petugas dibandingkan melalui Telepon Darurat 112	Perlunya Sosialisasi yang lebih masiv dan berkelanjutan terkait Nomor Panggilan Darurat Jakarta Siaga 112 oleh Instansi terkait.

b. Instansi terkait

No	Permasalahan	Saran Solusi
1	Terlambatnya instansi terkait yang berhubungan dengan bahaya kebakaran dan setiap ada bencana kebakaran.	Mengadakan peningkatan koordinasi dengan instansi – instansi terkait dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya di wilayahnya masing – masing.
2	Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana.	
3	Kurang optimalnya peran instansi terkait dalam penanganan perilaku masyarakat yang destruktif pada saat kejadian	

c. Kondisi lingkungan

No	Permasalahan	Saran Solusi
1	Kurang teraturnya penataan pemukiman penduduk dan pedulinya masyarakat dalam rasa aman dan nyaman dari ancaman bahaya kebakaran.	Mengadakan penyuluhan pada daerah rawan kebakaran dan lingkungan tanggap bencana serta melaksanakan pembinaan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan, pembinaan Balakar dan Program Pemberdayaan Wanita dan Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
2	Masih terdapat pengelola/pemilik bangunan yang kurang peduli dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	Perlunya optimalisasi pembinaan terhadap pemilik/pengelola bangunan dan penegakan hukum sesuai perda yang berlaku.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Tingkat Provinsi terdiri atas :

- a. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial
- b. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial
- c. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial
- d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial
- e. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi

- f. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota

Sedangkan untuk Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi.

Adapun ketentuan terhadap kriteria penerima, mutu pelayanan dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Pada perjanjian kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, sasaran strategis “meningkatkan cakupan pelayanan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal” dengan indikator kinerja “persentase ketercapaian pemenuhan standar pelayanan minimal

bidang urusan sosial” memiliki target sebesar 79,40% pada Triwulan IV. Sasaran dari SPM pada perjanjian kinerja tersebut adalah Lansia, Disabilitas, dan Anak terlantar. Target 79,40% adalah penjumlahan dari ketiga sasaran penerima manfaat tersebut. Target yang dituliskan pada perjanjian kinerja merupakan target untuk pemenuhan kebutuhan dasar Lansia, Disabilitas, dan Anak terlantar luar panti yang dipenuhi kebutuhannya melalui kartu, seperti Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak.

Penerima pelayanan pada SPM Bidang Sosial untuk setiap jenis pelayanan dasar merupakan Warga Negara Indonesia dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Permensos 9 Tahun 2018. Pada tingkat daerah, pelayanan dasar urusan sosial diselenggarakan secara terpusat di Provinsi dan tidak terbagi per wilayah terutama pada aspek rehabilitasi sosial dalam panti. Penjabaran target dan realisasi capaian layanan dasar per jenis dapat dilihat pada subbab selanjutnya.

4.6.3 REALISASI

A. Realisasi Capaian Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam	Jumlah Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
	Panti Sosial			
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%
6.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	93%
7.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
8.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	95%
9.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%
10.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	100%

B. Mutu Pelayanan Dasar

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	3.072	3.219	0	100%
2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%
3.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%
4.	Penyediaan Sandang	3.072	3.219	0	100%
5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	21	0	0	0%
6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%
7.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%
8.	Penyediaan Alat bantu	20	20	0	100%
9.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	2.990	3.010	0	100%
10.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	2.990	3.010	0	100%
11.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	2.990	3.010	0	100%

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
12.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	2.990	3.010	0	100%
13.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	2.990	2.835	175	94%
14.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	101	101	0	100%
15.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	171	171	0	100%

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Pengasuhan				
2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia	1105	2301	-	208%
3.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Anak				
4.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat				
5.	Penyediaan Sandang	1105	2595	-	235%
6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak	11	73	-	664%
7.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti				

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
	Anak				
8.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anakdan Merujuk Ke Panti Masyarakat				
9.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	1105	2301	-	208%
10.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	1105	1170	-	106%
11.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	208	1001	-	481%
12.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	-	436	-	
13.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	-	1379	-	
14.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	125	-	
15.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	173	-	
16.	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	30	30	0	100%

3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia	1.375	1.531	-	111%

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia	-	-	-	-
3.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
4.	Penyediaan Sandang	1.375	1.531	-	111%
5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia	9	79	-	878%
6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia	-	-	-	-
7.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
8.	Penyediaan Alat bantu	-	144	-	
9.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial	1.375	844	531	61%
10.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	1.375	1.203	172	87%
11.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	211	569	-	270%
12.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk	-	1.428	-	
13.	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	-	1.454	-	

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
14.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	97	-	
15.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	79	-	
16.	Pemulasaraan	-	281	-	

4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	1230	2065	-	167%
2.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	-	-	-	-
3.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
4.	Penyediaan Sandang	1230	2065	-	167%
5.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	4	58	-	1450%
6.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang	-	-	-	-

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
	Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis				
7.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	-	-	-	-
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	1230	2065	-	167%
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	1230	2065	-	167%
10.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	1230	2065	-	167%
11.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		1810	-	
12.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		883		
13.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	-	-	-	-
14.	Pemulangan ke Daerah Asal	-	-	-	-

5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Penyediaan Permakanan	23000	23000	0	100%
2.	Penyediaan Sandang	8694	8694	0	100%
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	0	0	0
4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	0	0	0	0
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	600	600	0	100%

6) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial

Kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial dipenuhi melalui bantuan sosial dalam bentuk dana langsung untuk menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang diatur pada Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas.

Penerima bantuan sosial PKD Penyandang Disabilitas menerima bantuan sosial sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan yang diatur dalam Keputusan Gubernur No. 410 Tahun 2020 tentang Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas. Kebutuhan dasar yang dipenuhi melalui besaran tersebut adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.

Pada penyelenggaraannya, pemberian bantuan sosial PKD Penyandang Disabilitas didanai melalui APBD Badan

Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Sosial berlaku sebagai pemberi rekomendasi tertulis yang kemudian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berikut rincian hasil distribusi Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta pada Tahun 2020:

No	Wilayah	Target	Realisasi
1	Jakarta Barat	1.327	1.202
2	Jakarta Timur	1.995	1.786
3	Jakarta Selatan	1.848	1.691
4	Jakarta Pusat	1.987	1.930
5	Jakarta Utara	3.066	2.896
6	Kep. Seribu	70	64
TOTAL		10.293	9.569

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	10.293	9.569	724	93%
6.	Penyediaan Sandang	10.293	9.569	724	93%
7.	Penyediaan Alat bantu	746	649	0	87%
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	10.293	9.569	724	93%
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	-
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	-	-	-	-
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	10.293	9.569	724	93%
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-

7) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial

Pada tahun 2020, pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar melalui Kartu Anak Jakarta ditunda pelaksanaannya karena masih proses penyusunan kajian dari J-PAL setelah melakukan *Pilot Project* di Cilincing pada tahun 2019.

Pemberian pelayanan dasar untuk anak terlantar di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 dilakukan oleh 106 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Non Panti Sosial Asuhan Anak di lima (5) wilayah dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Jumlah LKSA	Jumlah Binaan
1	Jakarta Selatan	29	1.674
2	Jakarta Timur	9	1.958
3	Jakarta Pusat	39	555
4	Jakarta Barat	29	2.866
5	Jakarta Utara	77	2.482
Total		183	9.537

Pelayanan LKSA Non-PSAA didanai secara mandiri dan oleh CSR untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tidak mampu, anak yatim, dan anak yatim piatu.

Lembaga luar panti yang juga memberikan pelayanan dasar untuk anak telantar adalah LKSA Rumah Singgah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Jumlah LKSA	Jumlah Binaan
1	Jakarta Selatan	5	321
2	Jakarta Timur	8	854
3	Jakarta Pusat	3	199
4	Jakarta Barat	2	261
5	Jakarta Utara	6	605
Total		24	2.240

Selain LKSA Non-PSAA dan Rumah Singgah, terdapat Taman Anak Sejahtera yang juga memberikan pelayanan dasar untuk anak balita telantar, dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Jumlah LKSA	Jumlah Binaan
1	Jakarta Selatan	6	322
2	Jakarta Timur	4	93
3	Jakarta Pusat	1	68
4	Jakarta Barat	1	66
5	Jakarta Utara	1	46

No	Wilayah	Jumlah LKSA	Jumlah Binaan
Total		13	595

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	12.372	12.372		100%
6.	Penyediaan Sandang	-	-	-	-
7.	Penyediaan Alat bantu	-	-	-	-
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	-
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	-	-	-	-
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	12.372	12.372		100%
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-

8) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial

Kebutuhan dasar bagi lanjut usia telantar di luar panti sosial dipenuhi melalui bantuan sosial dalam bentuk dana langsung untuk menunjang biaya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang diatur pada Peraturan Gubernur No. 100 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia.

Penerima bantuan sosial PKD Lansia menerima bantuan sosial sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan yang diatur dalam Keputusan Gubernur No. 409 Tahun 2020 tentang Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia. Kebutuhan dasar yang

dipenuhi melalui besaran tersebut adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.

Pada penyelenggaraannya, pemberian bantuan sosial PKD Lansia didanai melalui APBD Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Sosial berlaku sebagai pemberi rekomendasi. Rekomendasi tertulis disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berikut rincian hasil distribusi Kartu Lansia Jakarta pada Tahun 2020:

No	Wilayah	Target	Realisasi
1	Jakarta Barat	12.617	12.035
2	Jakarta Timur	23.178	22.209
3	Jakarta Selatan	10.591	10.020
4	Jakarta Pusat	13.309	12.663
5	Jakarta Utara	17.083	16.064
6	Kep. Seribu	746	658
TOTAL		77.524	73.649

Selain itu, pada tahun 2020 Lanjut Usia Luar Panti juga diberikan pelayanan oleh 29 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang telah berganti nama menjadi PUSAKA (Pusat Santunan Keluarga). Pada tahun 2020 PUSAKA membina sejumlah 7.814 lanjut usia luar panti dan memberikan penyediaan permakanan serta pemeriksaan Kesehatan.

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	77.524	73.649	3.875	95%
6.	Penyediaan Sandang	77.524	73.649	3.875	95%
7.	Penyediaan Alat bantu				
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	77.524	73.649	3.875	95%
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	-
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	-	-	-	-

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
	Anak Terlantar				
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	77.524	73.649	3.875	95%
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-

9) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sebelas (11) lembaga pada tahun 2020 memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di luar panti dengan rincian sebagai berikut:

No	Lembaga	Jumlah Penerima Manfaat
1	Yayasan Insan Amalia	40
2	Yayasan Karya Putra Indonesia Mandiri	221
3	Yayasan Erbe	424
4	Yayasan Balarenik	479
5	LKS Bhakti Nurul Iman	272
6	Yayasan Kumala	186
7	Swara Peduli	337
8	Yayasan Setia Kawan Raharja (Sekar)	264
9	Yayasan Rumpun Anak Pesisir	263
10	Yayasan Uswatun Hasanah	170
11	Yayasan KDM	125

No	Lembaga	Jumlah Penerima Manfaat
	Total	2.781

Dalam rangka pandemi Covid-19, sebelas (11) Lembaga di atas memberikan kelengkapan kesehatan seperti *hand sanitizer* dan masker, pemberian makanan siap saji selama satu bulan, sandang, dan melayani *rapid test* melalui pendanaan mandiri.

Selain itu, Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial (5) Wilayah Kota Administrasi pada totalnya telah melakukan penjangkauan PMKS pada 300 titik rawan untuk kemudian diberikan layanan rujukan dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Jumlah PMKS
1	Provinsi DKI Jakarta	267
2	Jakarta Pusat	799
3	Jakarta Utara	898
4	Jakarta Barat	683
5	Jakarta Selatan	752
6	Jakarta Timur	1.177
	Total	4.576

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	2.781	2.781		100%
6.	Penyediaan Sandang	2.781	2.781		100%
7.	Penyediaan Alat bantu				
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	2.781	2.781		100%
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	-
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	-	-	-	-

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	-	-	-	-
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	-	4576	-	-

10) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian
1.	Penyediaan Permakanan	298.586	298.586	-	100%
2.	Penyediaan Sandang	4.850	4.850	-	100%
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	175	175	-	100%
4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	0	0	-	0
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	600	600	-	100%

4.6.4 ALOKASI ANGGARAN

a. APBD

Penetapan Anggaran tahun 2020 didasarkan pada Pergub Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019. Anggaran belanja Dinas Sosial dan jajarannya adalah sebesar Rp419.642.523.929,-.

Anggaran belanja SKPD/UKPD pada tahun 2020 mengalami perubahan atas Pergub 113 Tahun 2020. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan arahan Gubernur melalui SE Sekda Provinsi DKI Jakarta No. 46 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Pnanganan Corona Virus Disease (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional untuk *refocusing* atau memfokuskan anggaran pada penyelenggaraan program prioritas sesuai APBD dalam Tahun 2020 terutama untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya.

Sesuai dengan arahan Sekda tersebut, total pagu Dinas Sosial dan jajarannya pada APBD-P 2020 menjadi sejumlah Rp328.063.383.301,- dan penganggaran untuk pencapaian SPM berubah dari sejumlah Penetapan APBD seperti penjabaran per jenis pelayanan di atas, menjadi:

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	72.617.861.159	58.871.169.467	58.169.472.513
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial	35.759.318.884	29.661.388.862	28.699.067.012
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	43.415.913.126	36.787.408.769	36.400.647.275

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp.)
		APBD	APBD-P	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Telantar di dalam Panti Sosial	33.984.790.249	27.930.897.145	27.686.750.132
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	15.439.951.249	11.020.824.061	10.704.789.879
6.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	2.858.134.070	2.078.001.750	2.078.001.750
7.	Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis Telantar di luar Panti Sosial	25.892.834.764	25.852.308.270	25.465.635.648
8.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	11.143.188.902	14.813.559.941	14.629.604.315

Pemenuhan kebutuhan dasar luar panti untuk disabilitas, anak, dan lanjut usia telantar dilakukan melalui Dinas Sosial dengan anggaran yang ada pada BPKD yaitu dalam bentuk Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.

b. Sumber Pendanaan Lain

Seluruh panti pemerintah yang terhitung sebagai capaian SPM yaitu sebanyak tujuh (7) panti anak, enam (6) panti disabilitas, empat (4) panti lanjut usia, dan tiga (3) panti gelandangan dan pengemis, mendapatkan pendanaan atau penganggaran melalui APBD Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan panti swasta didanai dari sumber yang bervariasi seperti pendanaan dari Yayasan yang membawahi panti swasta tersebut, CSR, hingga donasi pribadi/kelompok.

4.6.5 DUKUNGAN PERSONIL

a. PNS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah PNS	Keterangan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	105	Panti Sosial Disabilitas
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia	78	Panti Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah PNS	Keterangan
	Telantar di dalam Panti Sosial		Lansia
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial	123	Panti Sosial Anak
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial	47	Panti Sosial Gepeng
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	5	Sie. PSKB Bid. Perlindungan Sosial
6	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	28	Sie. Perlindungan Sosial dan PFM Sudin Sosial
	Total	386	

b. Non PNS

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial, PNS dibantu oleh sejumlah tenaga Non-PNS. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial dasar, tenaga non-PNS merupakan tenaga pelayanan sosial yang membantu memberikan pelayanan aktivitas sehari-hari pada warga binaan sosial di panti pemerintah. Selain itu dalam penyelenggaraan pelayanan tanggap darurat bencana, tenaga non-PNS yang membantu adalah petugas sosial kesiapsiagaan bencana pada tingkat provinsi maupun wilayah.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah	Keterangan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	238	Tenaga Pelayanan Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	211	Tenaga Pelayanan Sosial
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial	208	Tenaga Pelayanan Sosial
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	123	Tenaga Pelayanan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah	Keterangan
	di dalam Panti Sosial		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	24	Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana
6	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	66	Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana
	Total	870	

Selain Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana, terdapat 1.550 relawan sosial yaitu Taruna Siaga Bencana yang terdiri dari petugas pendistribusian, petugas *rescue*, petugas *shelter*, dan petugas posko.

4.6.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar urusan sosial masih mengalami sedikit kendala. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kesulitan yang dihadapi terutama pada data mutu layanan di luar panti karena pemberian pemenuhan kebutuhan dasar luar panti yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah melalui pemberian bantuan sosial tunai yang berbentuk kartu.

b. Penghitungan Kebutuhan

Kebutuhan untuk pelayanan dasar urusan sosial dapat dihitung dengan cukup baik karena didasarkan pada realisasi/capaian n-1 yang dijadikan proyeksi tahun berikutnya.

c. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran pada pelayanan dasar urusan sosial didasarkan pada Lampiran 1 dan 2 Permensos 9 Tahun 2018. Permasalahan yang ditemui adalah menentukan target jumlah WBS yang akan dilayani, tetapi saat ini mekanisme penentuan target jumlah WBS yang dilayani direncanakan sesuai dengan target Renstra SKPD yang mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah dan rata-rata WBS tiap tahunnya.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan pelayanan urusan sosial pada tahun 2020 terkendala dalam hal pelaksanaan bimbingan sosial karena tidak dapat melakukan kegiatan bimbingan yang menimbulkan kerumunan dan bepergian. Sehingga bimbingan sosial dilaksanakan di dalam panti saja dan mempertimbangkan protokol kesehatan.

e. Pelaporan

Dalam penyusunan laporan SPM, urusan sosial mengalami kendala karena item pada tiap output dan outcome tidak disertai dengan definisi operasional sehingga penuangan data yang SKPD miliki dengan yang harus diisikan pada laporan seringkali menemui ketidaksesuaian.

Diperlukan sinkronisasi dan penyesuaian pemberian definisi operasional untuk pengisian laporan mutu layanan SPM urusan sosial agar dapat lebih terukur dan tertata dengan baik dan benar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan LPPD tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 lebih sederhana (*simple*) dibandingkan dengan penyusunan LPPD sebelumnya. Dalam masa transisi ini masih diakui harus dilakukan penyesuaian data-data yang selama ini tidak diperlukan.

Dari Proses penyusunan LPPD 2020 ini, semakin terasa pentingnya pengelolaan Data Pemerintahan, dengan tantangan dan harapan ke depan :

1. setiap Perangkat Daerah diharapkan mengadministrasikan dengan baik seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk indikator kinerja dari mulai indikator *input* (masukan), indikator *output* (keluaran), indikator *outcome* (hasil), indikator *benefit* (manfaat), dan indikator *impact* (dampak);
2. Pemerintah Daerah memiliki e-data (data elektronik) yang dikelola secara holistik dan berkelanjutan
3. memadupadankan (harmonisasi) antara indikator kinerja dengan Indikator RPJMD dan Indikator Kinerja Kunci, agar indikator perencanaan *in line* dengan indikator pada pelaporan.

Adanya IKK *Outcome* dan IKK *Output* membuat data lebih terstruktur, serta menunjukkan *cascading*. Meskipun secara kuantitatif jumlah IKK tidak banyak, tetapi data yang diperlukan sangat banyak terutama data *output*. Dengan perubahan IKK ini sangat dimungkinkan terjadinya peningkatan atau penurunan nilai kinerja Daerah, karena : (1) IKK yang selama ini menyumbang nilai tinggi atau nilai rendah tidak lagi menjadi bagian dari indikator yang dinilai, (2) Skala Penilaian berubah dari 1 - 4 menjadi 1 – 5, dan (3) Data pendukung setiap IKK *Output* belum tentu siap 100%.

Bagi Provinsi DKI Jakarta ada beberapa Indikator yang bila tidak “dimodifikasi” atau tidak “disesuaikan” tidak dapat diisi sebagaimana diatur dalam

Permendagri 18 Tahun 2019. Bila hanya menggunakan IKK Provinsi maka Provinsi DKI Jakarta tidak melaporkan seluruh kinerjanya, sedangkan bila mengakomodir IKK Kabupaten/Kota perlu modifikasi dan penyesuaian, mengingat seluruh kewenangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi.

Dilihat dari ketersediaan data, diperlukan banyak data individu per sektor dalam bentuk data *by name by address* untuk setiap jenis data. Data tersebut hanya bisa didapat bila dilakukan melalui sensus.

Dari hasil analisa terhadap substansi LPPD terdapat beberapa data, perhitungan atau indikator yang kurang tepat, antara lain :

1. SPM Pendidikan.

- a. Mendapatkan data usia sekolah sesuai dengan tingkatannya relatif mudah, tetapi mendapatkan data anak yang sekolah tidaklah mudah. Di Jakarta tidak semua anak usia sekolah bersekolah di Jakarta. Banyak dari mereka sekolah di luar daerah, di luar negeri, mungkin ada yang *homeschooling*, pesantren dan lain-lain.

Data Potensi Pendidikan (Dapodik) yang ada di Dinas Pendidikan belum bisa mendata keberadaan semua anak usia sekolah. Data di yang ada BPS maupun data Dinas Kependudukan belum sampai detil, sementara kebutuhan data sudah mulai detil seperti anak berkebutuhan khusus atau anak peserta pendidikan kesetaraan.

- b. Dalam semua kelompok usia sekolah dimungkinkan ada anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas) atau ikut kesetaraan. Sebaiknya Perhitungan SPM untuk semua kelompok usia sekolah, baik untuk sekolah reguler, pendidikan khusus maupun sekolah kesetaraan menggunakan pembagi yang sama sesuai kelompoknya, agar didapat angka riil jumlah anak yang sudah memenuhi SPM.

2. SPM Kesehatan.

- a. Salah satu masalah adalah tidak semua warga Negara berada di daerah sesuai data kependudukan, sehingga Petugas Kesehatan tidak dapat menjangkau pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk

yang menjadi targetnya. Misal untuk pengecekan tekanan darah dan diabetes melitus untuk warga usia di atas 15 tahun.

- b. Pelayanan kesehatan tidak selalu menggunakan fasilitas kesehatan Daerah, sehingga untuk mendapatkan data kesehatan individu warga sesuai SPM memerlukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan Pusat, Swasta dan perorangan (dokter praktek).

3. SPM Perumahan

Luasan tanah untuk rumah relokasi minimal 60 m². Untuk Provinsi DKI Jakarta ketentuan tersebut tidak aplikatif, karena pembangunan perumahan tidak lagi horizontal (*landed*) tetapi sudah vertikal (rumah susun), karena keterbatasan lahan.

4. SPM Bencana

Untuk penerima informasi bencana masih menggunakan satuan “warga” yang sebaiknya “keluarga”, karena bayi dan lansia tertentu tidak mungkin ikut sosialisasi atau paham informasi bencana.

5. SPM Sosial

Belum ada Sensus Disabilitas termasuk spesifikasinya, baik oleh BPS maupun Dinas Kependudukan, sementara data populasi Disabilitas diperlukan oleh beberapa Dinas dalam rangka pelayanan publik, serta perhitungan SPM.

B. Saran

1. Sebagaimana dimaklumi bahwa otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan 33 provinsi lainnya, khususnya tentang ruang lingkup dan besaran kewenangan. Secara umum, Daerah dengan kewenangan yang lebih besar tidak bisa disamakan dengan Daerah yang kewenangannya lebih kecil/sedikit, karena akan terjadi penilaian terhadap seluruh IKK di 33 provinsi akan dibandingkan dengan penilaian sebagian IKK di Jakarta. Untuk itu otonomi khusus dan besaran kewenangan di Provinsi DKI Jakarta perlu dipertimbangkan dalam proses evaluasi, penilaian maupun dalam pembangunan aplikasi.

2. Sensus Penduduk selama ini dilaksanakan oleh Pusat dan berlaku secara Nasional, disarankan :
- a. Semaksimal mungkin seluruh penduduk Indonesia tersensus, yang terelaborasi dalam Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, yang kemudian *diupdate* secara berkala dan berkelanjutan oleh Daerah secara bertingkat. Tujuannya agar data Daerah dan data Pusat realtif sama.
 - b. Substansi Sensus Penduduk diperluas sesuai dengan kebutuhan data pelayanan publik yang bersifat dasar. Tujuannya agar tidak banyak sektor yang melakukan sensus. Perlu pelibatan Daerah secara aktif agar Daerah tidak berperan sebagai pengguna data saja, tetapi aktif sebagai penginventaris data juga.
3. Perlu reviu kembali terhadap beberapa satuan data dan perhitungan dalam SPM dengan melibatkan unsur Daerah sebagai pelaksana kebijakan.
4. Dalam banyak hal, pembangunan data individu warga Negara yang bersifat elektronik sudah bersifat mendesak, terlebih di Negara Kesatuan termasuk Indonesia. Data tersebut tentunya ada yang bersifat terbuka ada yang bersifat tertutup sesuai dengan klasifikasinya.
5. Pada kerangka yang lebih besar, semua data pemerintahan seharusnya sudah tersedia secara elektronik, sehingga mudah dicari, mudah diaolah dan mudah disajikan.

Mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu dan hasil evaluasi, LPPD ini dapat terus disempurnakan secara regulasi maupun aplikasinya.